



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS STRATEGIS PEMBANGUNAN  
KABUPATEN MUNA**

**T E S I S**

**LA ODE ABDUL MIRAD TUMADA  
MPM : 1006791650**

**FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK  
JAKARTA  
JANUARI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS STRATEGIS PEMBANGUNAN  
KABUPATEN MUNA**

**T E S I S**

**Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar  
Magister Ekonomi (M.E)**

**LA ODE ABDUL MIRAD TUMADA  
MPM : 1006791650**

**FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK  
KEKHUSUSAN EKONOMI PERENCANAAN KOTA DAN DAERAH  
JAKARTA  
JANUARI 2012**

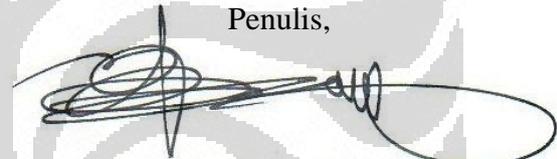
## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa tugas tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Jakarta, Januari 2012 ,

Penulis,



(LA ODE ABD MIRAD TUMADA)

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Jakarta, Januari 2012 ,

LA ODE ABDUL MIRAD TUMADA  
NPM. 1006791650



( \_\_\_\_\_ )

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

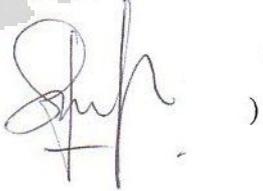
N a m a : LA ODE ABDUL MIRAD TUMADA  
NPM : 1006791650  
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP)  
Judul Tesis : ANALISIS STRATEGI PEMBANGUNAN  
KABUPATEN MUNA

Telah berhasil dipertahankan di hadapan dewan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (MPKP-FE UI).

### DEWAN PENGUJI

Penguji : DR. SONNY HARRY B. HARMADI (  )

Penguji : PAKSI C. WALANDOUW, SE, MA (  )

Pembimbing : TITISSARI, SE, MT, M.Sc (  )

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Januari, 2012

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan tesis ini dengan judul Analisis Pembangunan Kabupaten Muna dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Tesis ini dibuat dalam upaya menyelesaikan tugas akhir perkuliahan pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih sangat jauh dari sempurna, baik isi maupun bahasanya, hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman serta waktu yang digunakan untuk penyelesaian penulisan tesis ini. Untuk itulah penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan dari tesis ini.

Pada kesempatan pertama, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang kepada Ibu Titissari, SE,MT,M.Sc yang telah memberikan bimbingan sejak awal penelitian hingga selesainya karya akhir ini, penulis juga sampaikan terimakasih kepada segenap pengajar di Program Studi MPKP Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama mengikuti kuliah serta kepada segenap staf dan pegawai MPKP yang telah banyak membantu kelancaran kegiatan belajar.

Tak lupa pula penulis sampaikan terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Muna yang telah memberikan kesempatan dan dukungan bagi penulis dan juga penulis ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Ibunda Wa Ode Ndoile dan ayahnda Alm. La Ode Illaihi, kedua mertua, kakak dan adik, serta kepada istriku Wa Ode Rahmawaktu dan anakku yang tercinta Wa Ode Sakinah Nur Madani, dengan penuh kesabaran selalu menyertai penulis selama mengikuti pendidikan.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenaan membalas kebaikan bagi semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini. Semoga tesis yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua.....Amin.

Jakarta, Januari 2012.



Penulis

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini ;

N a m a : LA ODE ABDUL MIRAD TUMADA  
N P M : 1006791650  
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP).  
Fakultas : E k o n o m i  
Jenis Karya : T e s i s

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul “ ANALISIS STRATEGI PEMBANGUNAN KABUPATEN MUNA “ Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai Pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : Januari 2012

Yang menyatakan,



( LA ODE ABDUL MIRAD TUMADA )

## ABSTRAK

Berdasarkan pada tingkat perkembangan pembangunan daerah di Indonesia, Kabupaten Muna dikategorikan sebagai salah satu kabupaten tertinggal, sehingga diperlukan berbagai strategi dan kebijakan dalam rangka pengembangan pembangunan daerahnya. Penelitian ini menggunakan metode Location Quotient (LQ) untuk menganalisis potensi sektor basis dan non basis daerah serta kemampuan kompetitifnya dibandingkan dengan daerah di atasnya. Selanjutnya dengan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) menganalisis strategi dan kebijakan dalam rangka pengembangan pembangunan wilayah di Kabupaten Muna

Sruktur perekonomian Kabupaten Muna selama lima tahun terakhir masih didominasi oleh tiga sektor utama dan juga merupakan sektor basis daerah yakni sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa-jasa. Sektor ekonomi yang paling tinggi pertumbuhannya adalah sektor pertambangan dan penggalian tumbuh 18,23 persen, sedangkan sektor ekonomi yang paling rendah pertumbuhannya adalah sektor pertanian yang tumbuh sebesar 4,78 persen.

Berdasarkan tipologi, wilayahnya Kabupaten Muna memiliki satu sektor ekonomi yang sangat berpotensi untuk dikembangkan yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran dan ada dua sektor yang potensial untuk dikembangkan yaitu pertanian dan jasa-jasa serta ada lima sektor yang perlu untuk dikembangkan lebih lanjut yaitu sektor industri pengolahan, listrik gas dan air bersih, bangunan, pengangkutan dan komunikasi dan keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

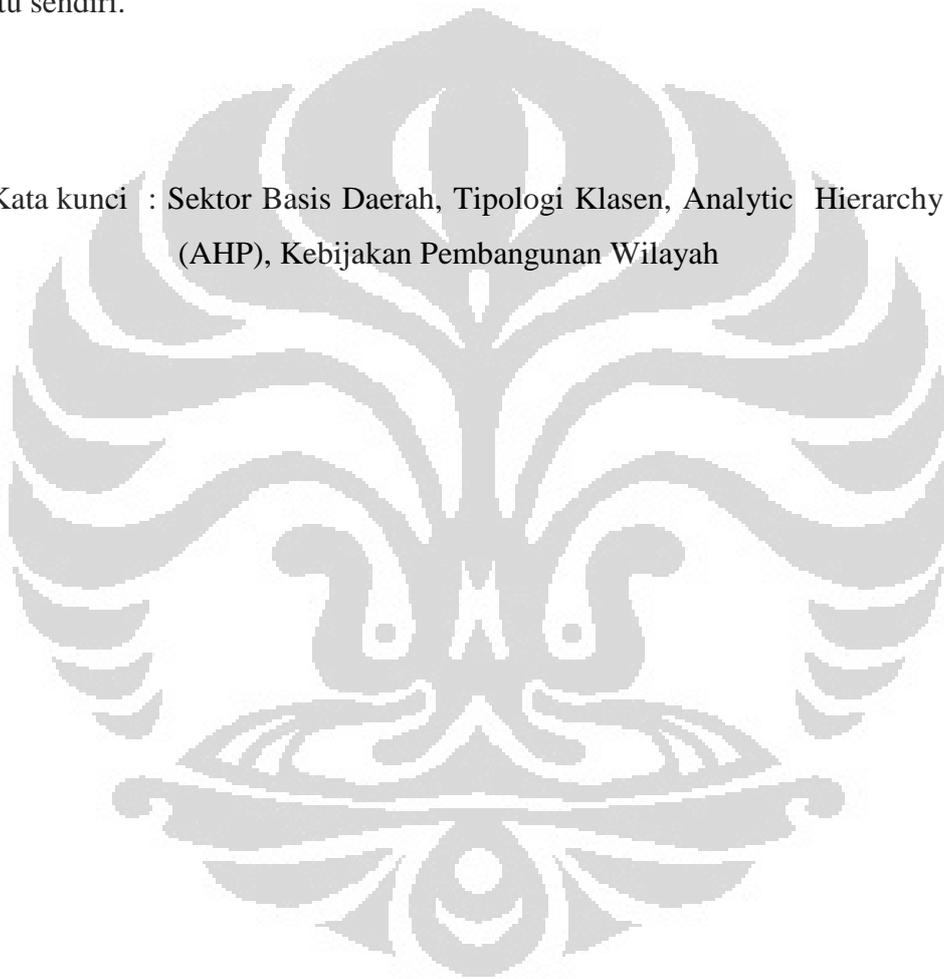
Melalui analisis AHP dilakukan analisis mengenai strategi dan kebijakan pengembangan pembangunan wilayah, maka pembenahan dari aspek kualitas sumber daya manusia terutama pendidikan dan pelatihan menjadi prioritas pertama, selanjutnya dari sisi pemasaran daerah pada prioritas kedua serta penyediaan infrastruktur fisik menjadi prioritas berikutnya.

Dengan teridentifikasinya potensi sektor-sektor basis daerah yang mampu memberikan nilai kontribusi bagi sebagian besar masyarakat dan pemerintah serta upaya perbaikan dari berbagai kriteria strategi dan kebijakan terhadap pengembangan pembangunan wilayah terutama dari sisi peningkatan kualitas

sumber daya manusia dalam hal ini prioritas pendidikan dan pelatihan, maka keinginan untuk menciptakan percepatan pengembangan pembangunan wilayah akan menjadi kenyataan.

Pemerintah Kabupaten Muna diharapkan mengagendakan secara sinergis sekaligus melaksanakannya, sehingga kebijakan pembangunannya tepat sasaran juga menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan struktur perekonomian daerah, sehingga akan bermuara pada kemajuan dan kesejahteraan rakyat muna itu sendiri.

Kata kunci : Sektor Basis Daerah, Tipologi Klasen, Analytic Hierarchy Process (AHP), Kebijakan Pembangunan Wilayah



## ABSTRACT

Based on the level of development of regional development in Indonesia, Muna categorized as one of the districts lagging behind, necessitating a variety of strategies and policies in order to develop regional development. This study uses a method Location Quotient (LQ) to analyze the potential of the base and non base region as well as its competitive ability compared with the area above it. Furthermore, the method of Analytic Hierarchy Process (AHP) to analyze the strategies and policies in the framework of regional development at Muna

Structure regency economics Muna during the last five years been dominated by three main sectors and is also a sector basis ie the area of agriculture, trade, hotels and restaurants and services sector. Economic sector is the most high-growth mining and quarrying sector grew 18.23 percent, while the lowest sectors of the economy is growing agricultural sector grew by 4.78 percent.

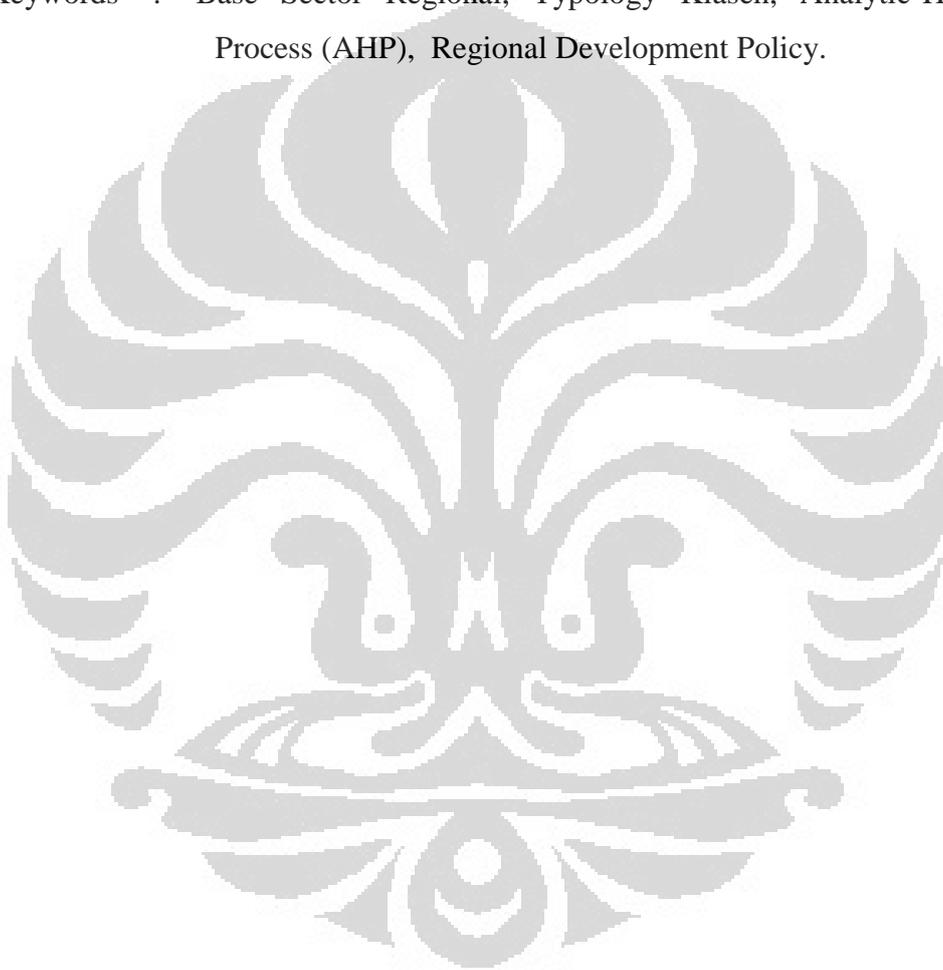
Based on the typology, Muna area has a high potential economic sectors to develop the trade, hotels and restaurants and there are two sectors with the potential to develop the agriculture and services and there are five sectors which need to be further developed the manufacturing sector , electricity gas and water supply, construction, transport and communications and finance, leasing and corporate services.

Through the AHP analysis conducted an analysis of strategies and regional development policies, the improvement of the quality aspects of human resources, especially education and training to be the first priority, then from the marketing side of the area on the second priority and the provision of physical infrastructure into the next priorities.

With the identification of potential regional base of sectors that can provide most of the value of contributing to society and the government and improvement efforts of various criteria and policy strategies for regional development especially in terms of improving the quality of human resources in this case the realms of education and training, the desire to create the acceleration of regional development will become a reality.

Muna government is expected to be synergistic as well as implement the agenda, so that the targeted development policies also create conditions conducive to the growth of regional economic structure, so that would lead to the advancement and welfare of the people themselves Muna.

Keywords : Base Sector Regional, Typology Klasen, Analytic Hierarchy Process (AHP), Regional Development Policy.



## DAFTAR ISI

|  | HAL  |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL .....  | i    |
| SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....                           | ii   |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....                              | iii  |
| HALAMAN PENGESAHAN .....   | iv   |
| KATA PENGANTAR .....   | v    |
| LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....                    | vi   |
| ABSTRAK .....  | vii  |
| DAFTAR ISI .....   | xi   |
| DAFTAR TABEL .....   | xiii |
| DAFTAR GAMBAR .....  | xv   |
| DAFTAR LAMPIRAN .....  | xvii |
| <br>   |      |
| 1. PENDAHULUAN .....   | 1    |
| 1.1 Latar Belakang .....   | 1    |
| 1.2 Perumusan Masalah .....  | 6    |
| 1.3 Ruang lingkup/Batasan Masalah .....                            | 6    |
| 1.4 Tujuan Penelitian .....  | 7    |
| 1.5 Manfaat Penelitian .....                                       | 7    |
| 1.6 Sistematika Penulisan .....                                    | 7    |
| 1.7 Keterbatasan Penelitian .....                                  | 8    |
| <br>   |      |
| 2. TINJAUAN PUSTAKA .....  | 9    |
| 2.1 Pengertian Perencanaan Pembangunan Nasional .....              | 9    |
| 2.2 Pendekatan Dalam Perencanaan Pembangunan .....                 | 13   |
| 2.3 Sektor Potensial Dalam Pengembangan Wilayah .....              | 16   |
| 2.3.1 Tipologi Ekonomi Regional .....                              | 17   |
| 2.3.2 Differential Shift (Sd) .....                                | 19   |
| 2.4 Model Ekonomi Basis Untuk Perencanaan Pembangunan Daerah ..... | 19   |
| 2.4.1 Konsep Ekonomi Basis .....                                   | 19   |
| 2.4.2 Tekhnik Analisis Sektor Basis .....                          | 25   |
| 2.4.3 Beberapa Penjelasan Tentang Tekhnik Location Quotient .....  | 28   |
| 2.5 Konsep Dasar Analytical Hierarchy Process (AHP) .....          | 31   |
| 2.5.1 Konsep Dasar AHP .....                                       | 31   |
| 2.5.2 Karakteristik Umum Model AHP .....                           | 33   |
| 2.5.3 Prinsip-Prinsip Dasar (AHP) .....                            | 35   |
| <br>   |      |
| 3. METODOLOGI PENELITIAN .....                                     | 39   |
| 3.1 Jenis dan Sumber Data .....                                    | 39   |
| 3.2 Metode Analisis Data .....                                     | 39   |
| 3.3 Perumusan Model Persamaan .....                                | 39   |
| 3.3.1 Analisis Location Quotient (LQ) .....                        | 39   |
| 3.3.2 Analisa Differential Shift (Sd) .....                        | 40   |
| 3.3.2 Analytical Hierarchy Process (AHP) .....                     | 41   |

|       |   |     |
|-------|---|-----|
| 4.    | GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .....  | 56  |
| 4.1   | Potensi Ekonomi Dan Sosial Budaya .....   | 56  |
| 4.1.1 | Kondisi Penduduk Kabupaten Muna .....   | 56  |
| 4.1.2 | Tenaga Kerja .....  | 58  |
| 4.1.3 | Volume Perdagangan .....  | 60  |
| 4.1.4 | Pendidikan .....  | 61  |
| 4.1.5 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....  | 62  |
| 4.2   | Ketersediaan Sarana dan Prasarana .....   | 63  |
| 4.2.1 | Kondisi Jalan .....   | 63  |
| 4.2.2 | Sarana dan Prasarana Transportasi .....   | 64  |
| 4.3   | Perekonomian Daerah .....   | 65  |
| 4.3.1 | Struktur Ekonomi .....  | 65  |
| 4.3.2 | Pertumbuhan Ekonomi Regional .....  | 66  |
| 4.3.3 | PDRB Perkapita .....  | 67  |
| 4.4   | Pemerintahan Umum .....   | 68  |
| 4.4.1 | Sumber Daya Aparatur .....  | 68  |
| 4.4.2 | Kondisi Kelembagaan .....   | 69  |
| 5.    | PEMBAHASAN .....  | 70  |
| 5.1   | Gambaran Umum Program RPJMD Kabupaten Muna .....  | 70  |
| 5.1.1 | Program RPJMD 2006-2010 .....   | 70  |
| 5.1.2 | Program RPJMD 2010-2015 .....   | 72  |
| 5.2   | Analisis Location Quotient .....  | 77  |
| 5.3   | Analisis Typology Klassen .....   | 92  |
| 5.4   | Strategi Kebijakan Pengembangan Pembangunan Wilayah<br>(Analisis Dengan Metode AHP) ..... | 94  |
| 5.4.1 | Penyusunan Hirarki Dan Kuesioner .....  | 94  |
| 5.4.2 | Aspek Perioritas Kebijakan Pengembangan<br>Pembangunan Wilayah .....                      | 100 |
| 5.4.3 | Analisis Perioritas Kebijakan Pengembangan<br>Pembangunan Wilayah .....                   | 104 |
| 5.5   | Implikasi Kebijakan .....   | 112 |
| 6.    | P E N U T U P .....   | 114 |
| 6.1   | Kesimpulan .....  | 114 |
| 6.2   | S a r a n .....   | 116 |
|       | DAFTAR PUSTAKA .....  | 117 |

## DAFTAR TABEL

|  | HAL |
|--|-----|
| Tabel 3.1 Contoh Formula Matriks Perbandingan Berpasangan .....  | 51  |
| Tabel 3.2 Skala Perbandingan Saaty .....   | 52  |
| Tabel 3.3 Nilai Random Indeks (RI) .....   | 54  |
| Tabel 4.1 Persentase Penduduk Usia 15 th Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin di Kab. Muna Tahun 2009 .....            | 58  |
| Tabel 4.2 Persentase Penduduk Usia 15 th Keatas Menurut Lapangan Pekerjaan dan Jenis Kelamin Tahun 2009 .....                    | 59  |
| Tabel 4.3 Volume dan Nilai Perdagangan Hasil Bumi dan Laut Antar Pulau Menurut Jenis Barang di Kab. Muna Tahun 2009 .....        | 60  |
| Tabel 4.4 Persentase Penduduk Usia 3-6 Tahun Menurut Keikutsertaan Pendidikan Pra Sekolah di Kab. Muna Tahun 2009 .....          | 62  |
| Tabel 4.5 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Muna Tahun 2008-2009 .....  | 62  |
| Tabel 4.6 Perkembangan Jumlah Transportasi Darat di Kab. Muna Tahun 2007-2009 .....  | 64  |
| Tabel 4.7 Kondisi Umum Sarana Perhubungan di Kab. Muna Tahun 2009 .....  | 64  |
| Tabel 4.8 Klasifikasi Sumber Daya Aparatur Pemkab Muna Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2009 .....                               | 68  |
| Tabel 4.9 Kondisi Infrastruktur Kelembagaan Pemerintahan Kab. Muna Tahun 2009 .....  | 69  |
| Tabel 5.1 Arah Kebijakan Pembangunan Kab.Muna 2010-2015 .....  | 72  |
| Tabel 5.2 LQ Sektor Lapangan Usaha Kab. Muna Dalam Lingkungan Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2009 .....                   | 78  |
| Tabel 5.3 Peranan Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kab. Muna Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2005-2009 .....                        | 80  |
| Tabel 5.4 Peranan Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB Kabupaten Muna Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2005-2009 ..... | 81  |
| Tabel 5.5 LQ Sektor Industri Pengolahan Kab. Muna Dalam Lingkungan Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2009 .....              | 82  |

|            |   |     |
|------------|---|-----|
| Tabel 5.6  | Peranan Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kabupaten Muna Tahun 2005-2009 .....   | 83  |
| Tabel 5.7  | LQ Sektor Listrik dan air Bersih Kab. Muna Dalam Lingkungan Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2009 .....                      | 83  |
| Tabel 5.8  | Peranan Sektor Listrik dan Air Bersih Terhadap PDRB Kabupaten Muna Tahun 2005-2009 .....  | 84  |
| Tabel 5.9  | LQ Sektor Konstruksi/Bangunan Kab. Muna Dalam Lingkungan Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2009 .....                         | 84  |
| Tabel 5.10 | Peranan Sektor Konstruksi/Bangunan Terhadap PDRB Kabupaten Muna Tahun 2005-2009 .....   | 85  |
| Tabel 5.11 | Peranan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Terhadap PDRB Kabupaten Muna Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2005-2009 .....        | 87  |
| Tabel 5.12 | LQ Sektor Pengangkutan dan komunikasi Kab. Muna Dalam Lingkungan Prop. Sulawesi Tenggara Th 2005-2009 .....                       | 87  |
| Tabel 5.13 | Peranan Sektor Angkutan dan Komunikasi Terhadap PDRB . Kab. Muna Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2005-2009 .....                   | 88  |
| Tabel 5.14 | LQ Sektor Keuangan,Persewaan & Jasa Perusahaan Dalam Lingkungan Prop. Sulawesi Tenggara Th 2005-2009 .....                        | 89  |
| Tabel 5.15 | Peranan Sektor Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan Terhadap PDRB Kabupaten Muna Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2005-2009 ..... | 90  |
| Tabel 5.16 | Peranan Sektor Jasa-Jasa Terhadap PDRB Kabupaten Muna Ata Dasar Harga Berlaku Tahun 2005-2009 .....                               | 92  |
| Tabel 5.17 | Pembagian Sektor Ekonomi Kabupaten Muna Menurut Tipologinya Tahun 2005-2009 .....   | 93  |
| Tabel 5.18 | Bobot Final strategi Kebijakan Pengembangan Pembangunan Wilayah Kabupaten Muna .....  | 111 |

## DAFTAR GAMBAR

|   | HAL |
|---|-----|
| Gambar 1.1 Kontribusi Sektor Pertanian, Perdagangan dan Jasa-Jasa Terhadap Kabupaten Muna Tahun 2005-2009 .....                       | 3   |
| Gambar 1.2 Indeks Gini Kabupaten Muna 2004-2009 .....   | 4   |
| Gambar 3.1 Hirarki strategi Kebijakan Pengembangan Pembangunan Wilayah .....  | 43  |
| Gambar 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Muna Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Tahun 2009 .....                                    | 56  |
| Gambar 4.2 Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2009 .....   | 57  |
| Gambar 4.3 Persentase Penduduk 10 Tahun keatas Menurut Tingkat Pendidikan yang ditamatkan Tahun 2009 .....                            | 61  |
| Gambar 4.4 Panjang Jalan Propinsi Dan Kabupaten .....   | 63  |
| Gambar 4.5 Peranan Sektor Ekonomi Dalam PDRB Kabupaten Muna Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009 .....                                 | 65  |
| Gambar 4.6 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Muna dan Sulawesi Tenggara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005-2009 .....                      | 66  |
| Gambar 4.7 Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Muna Tahun 2005-2009 .....   | 67  |
| Gambar 5.1 LQ Sektor Pertanian Kabupaten Muna Dalam Lingkungan Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2009 .....                       | 79  |
| Gambar 5.2 LQ Sektor Pertambangan dan Penggalian Kabupaten Muna Dalam Lingkungan Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2009 .....     | 81  |
| Gambar 5.3 LQ Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Kabupaten Muna Dalam Lingkungan Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2009 ..... | 86  |
| Gambar 5.4 LQ Sektor Jasa-Jasa Kabupaten Muna Dalam Lingkungan Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2009 .....                       | 91  |
| Gambar 5.5 Hirarki Strategi Kebijakan Pengembangan Pembangunan Wilayah .....  | 95  |
| Gambar 5.6 Hirarki Persentase Aspek Strategi Kebijakan Pengembangan Pembangunan Wilayah .....   | 101 |

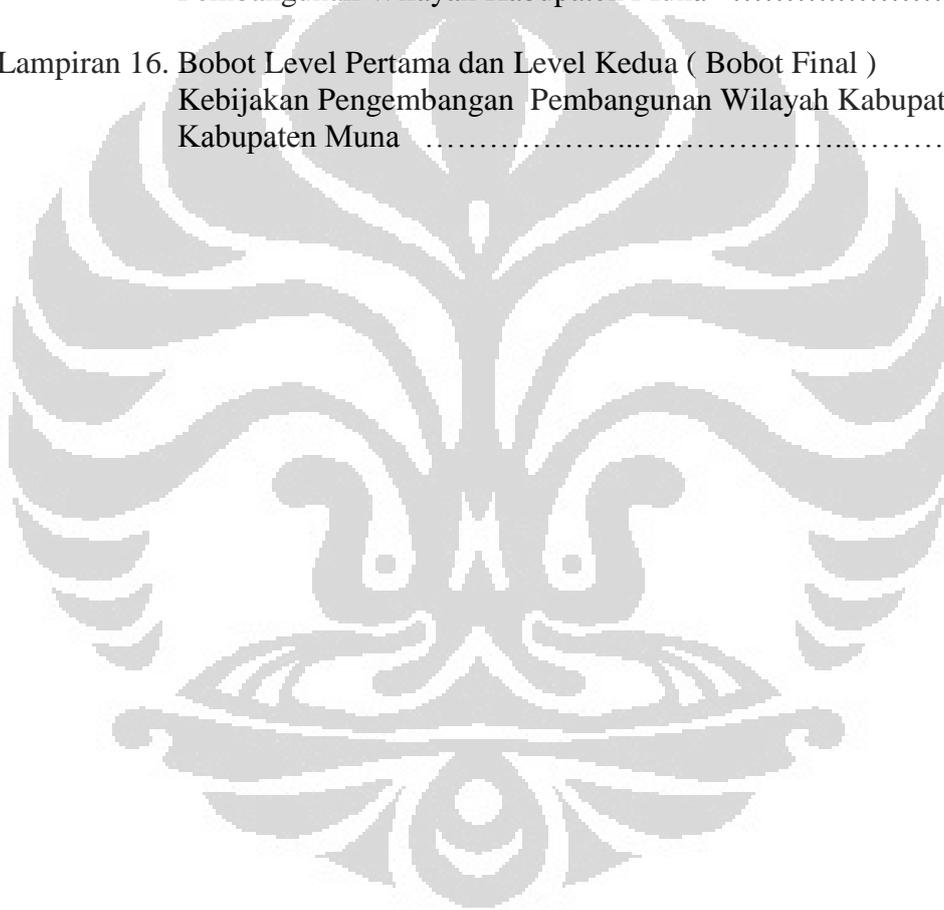
|            |   |     |
|------------|---|-----|
| Gambar 5.7 | Bobot Level Pertama Aspek Prioritas Strategi Kebijakan Pengembangan Pembangunan Wilayah ..... | 104 |
| Gambar 5.8 | Bobot Final Kriteria Kebijakan Pengembangan Pembangunan Wilayah Kabupaten Muna .....          | 106 |



## DAFTAR LAMPIRAN

|   | HAL |
|---|-----|
| ILampiran 1. Peta Administrasi Kabupaten Muna .....   | 121 |
| Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2009 Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 .....                  | 122 |
| ILampiran 3. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Muna Tahun 2005-2009 Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 .....                             | 124 |
| ILampiran 4. Perhitungan Komponen Differential Shift (Sd) Kab. Muna Terhadap Prop. Sulawesi Tenggara Tahun 2005 -2009 .....   | 126 |
| ILampiran 5. Kuesioner AHP bagi Responden atas Perumusan Perumusan Strategi Kebijakan Pengembangan Pembangunan Wilayah di Kabupaten Muna .....                          | 127 |
| ILampiran 6. Nilai Geometrik Mean (Geomean) Aspek Pengembangan Kebijakan Pembangunan Wilayah Kab. Muna (Pembobotan Secara Total dari nilai keseluruhan Responden) ..... | 151 |
| ILampiran 7. Matriks Pair-wise Aspek Pengembangan Pembangunan Wilayah Kabupaten Muna .....  | 152 |
| ILampiran 8. Matriks Priority Aspek Pengembangan Pembangunan Wilayah Kabupaten Muna .....   | 152 |
| ILampiran 9. Nilai Consistency Indeks (CI) dan Consistency Ratio (CR) Kebijakan Pengembangan Pembangunan Wilayah Kabupaten Muna .....                                   | 153 |
| ILampiran 10. Nilai Random Indeks (RI) .....  | 153 |
| Lampiran 11. Nilai Geomean Kriteria Kebijakan Pengembangan Pembangunan Wilayah Kabupaten Muna .....   | 154 |
| ILampiran 12. Matriks Pair-wise & Matriks Priority Analisi Kriteria Aspek Pengembangan Kualitas SDM Dalam Rangka Pengembangan Pembangunan Wilayah Kabupaten Muna .....  | 155 |

|   |     |
|---|-----|
| ILampiran 13. Matriks Pair-wise & Matriks Priority Analisis Kriteria Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung Dalam Rangka Pengembangan Pembangunan Wilayah Kab. Muna ..... | 156 |
| ILampiran 14. Matriks Pair-wise & Matriks Priority Analisis Kriteria Aspek Pelayanan Publik Dalam Rangka Pengembangan Pembangunan Wilayah Kabupaten Muna .....                | 157 |
| ILampiran 15. Matriks Pair-wise dan Matriks Priority Analisis Kriteria Aspek Promosi Daerah Dalam Rangka Pengembangan Pembangunan Wilayah Kabupaten Muna .....                | 158 |
| ILampiran 16. Bobot Level Pertama dan Level Kedua ( Bobot Final ) Kebijakan Pengembangan Pembangunan Wilayah Kabupaten Kabupaten Muna .....                                   | 159 |



# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Penelitian.

Dalam perkembangan pemerintahan modern semua negara baik negara-negara kesatuan maupun yang berbentuk federasi, semakin mempercayakan berbagai urusan pemerintahan kepada daerah, terutama mengenai urusan-urusan yang langsung menyangkut kepentingan rakyat serta yang pelaksanaannya tidak harus seragam di semua wilayah. Urusan-urusan yang menyangkut keselamatan negara seperti keuangan, pertahanan dan keamanan serta hubungan luar negeri seluruhnya ditangani oleh pemerintah pusat.

Konsep perencanaan pembangunan daerah pada era otonomi sekarang ini mengalami perubahan dari pradigma perencanaan model *top down* ke model *bottom up*. Perubahan demikian secara eksplisit berpengaruh terhadap eksistensi pemerintahan daerah sebagai badan perencana. Perencanaan yang dilakukan oleh suatu daerah haruslah didasarkan pada kondisi, potensi, masalah dan peluang yang ada yang terdapat di daerah yang bersangkutan, maka konsep pembangunan yang baik akan lebih menjamin tercapainya tujuan dari perencanaan pembangunan daerah itu sendiri. Oleh karenanya penelitian yang mendalam tentang keadaan tiap daerah harus dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang berguna bagi penentuan perencanaan pembangunan daerah yang bersangkutan.

Ketika Indonesia memasuki babak baru dalam hal hubungan pemerintah pusat dan daerah pada 1 Januari 2001, secara efektif memulai babak baru dalam penerapan Otonomi Daerah yang luas dan bertanggung jawab. Sehingga konsekuensinya daerah otonom mempunyai keleluasaan yang cukup besar dalam mengurus daerahnya masing-masing..

Amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi Daerah dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui

peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pada otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing, melalui prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam pembangunan, meningkatkan daya guna potensi dan keanekaragaman sumber daya.

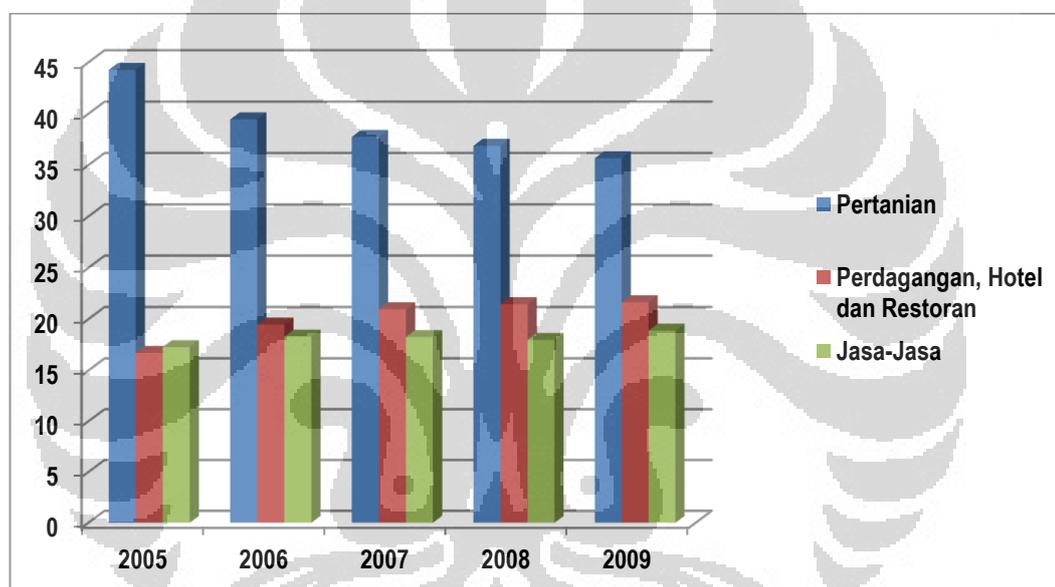
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, diharapkan Pemerintah Daerah mampu menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri sesuai dengan hak dan kewajibannya. Pemberian kewenangan yang luas kepada daerah tersebut memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan pada tingkat nasional, pembangunan pada tingkat daerah maupun pembangunan antar daerah. Keharmonisan pembangunan tersebut dimulai sejak perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat, walaupun undang-undang tersebut secara jelas menyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, namun dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah tetap harus memperhatikan antara perencanaan pembangunan pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota dan antar pemerintah daerah, sehingga pencapaian tujuan daerah mendukung pencapaian tujuan nasional. Aspek hubungan tersebut memperhatikan kewenangan yang diberikan, baik yang terkait dengan hubungan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, pelayanan umum maupun keuangan dengan memperimbangkan kondisi strategis dan tantangan pembangunan.

Terkait dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muna selama periode tahun 2007- 2009 atas dasar harga konstan tahun 2000 daerah tersebut mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 7.43 persen per tahun. Angka ini masih lebih

rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 7.56 persen. Sektor ekonomi yang paling tinggi pertumbuhannya adalah sektor pertambangan dan penggalian tumbuh 18,23 persen, sedangkan sektor ekonomi yang paling rendah pertumbuhannya adalah sektor pertanian yang tumbuh sebesar 4,78 persen yang diakibatkan oleh turunnya beberapa produksi tanaman pangan antara lain jagung.

Dilihat dari struktur perekonomiannya, seperti terlihat pada gambar 1.1, Kabupaten Muna selama lima tahun terakhir masih didominasi oleh tiga sektor yaitu pertanian, Perdagangan, Hotel dan Restoran dan Jasa-Jasa.



Gambar 1.1 Kontribusi Sektor Pertanian, Perdagangan dan Jasa-asa Terhadap Kab. Muna Tahun 2005 - 2009

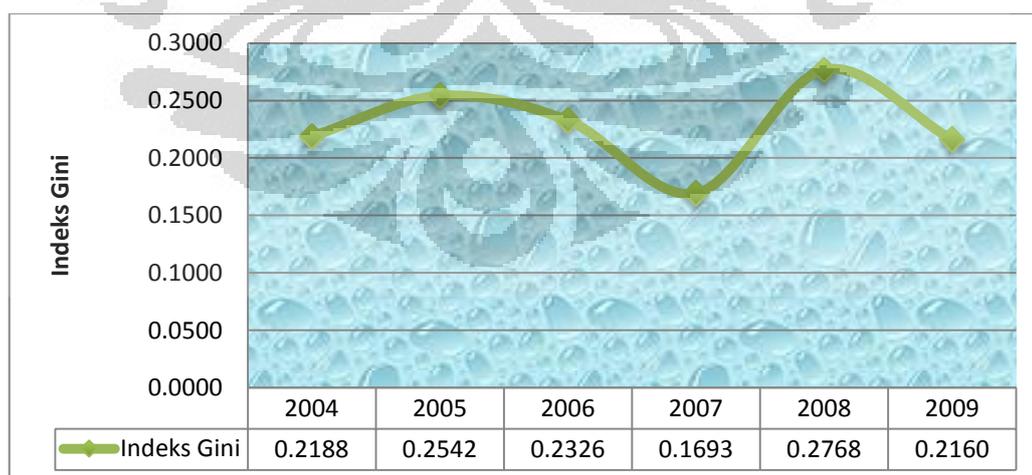
Sumber : BPS Kab. Muna 2005-2009

Kontribusi sektor pertanian masih mendominasi namun dari tahun ketahun terus mengalami penurunan. Tahun 2005 kontribusi sektor ini sebesar 44,27 persen, tahun 2006 sektor pertanian masih mendominasi struktur perekonomian Kabupaten Muna sebesar 39,45 persen dan tahun 2007 turun menjadi 37,75 persen. Tahun 2008 dan 2009 peranan sektor pertanian terus menurun terhadap PDRB. Pada tahun 2008 kontribusi sektor pertanian sebesar 36,88 persen turun menjadi 35,67 persen tahun 2009. Kontribusi terbesar sektor pertanian pada tahun 2009 bersumber dari sub sektor tanaman pangan yaitu sebesar 11,50 persen

kemudian sub sektor perikanan sebesar 9,89 persen, menyusul sub sektor peternakan dan hasilnya sebesar 6,73 persen, sub sektor tanaman perkebunan sebesar 5,46 persen, sedangkan sub sektor yang memberikan kontribusi terkecil adalah sub sektor kehutanan yaitu sebesar 2,10 persen.

Tingkat pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Muna tahun 2009 atas harga berlaku berjumlah Rp. 9.736.368, lebih kecil dibanding dengan pendapatan perkapita Sulawesi Tenggara berjumlah Rp.12.111.337. Ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Muna masih berada dibawah tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara

Dari ukuran indeks gini seperti pada gambar 1.2, selama periode tahun 2004 hingga tahun 2009, angka indeks gini tampak berfluktuasi. Pada tahun 2004, indeks gini sebesar 0,2188 mengalami kenaikan 0.0354 point pada tahun 2005 menjadi sebesar 0,2542 dan menurun 0,0216 poin lagi pada tahun 2006 menjadi 0,2326. Pada tahun 2007, angka indeks gini terus mengalami penurunan menjadi 0,1693 poin, pada tahun 2008 meningkat 0,1075 poin menjadi 0,2768, dan pada tahun 2009 mengalami penurunan 0,0608 poin menjadi 0,2160. Sehingga berdasarkan ukuran indeks gini, menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Muna tergolong rendah (*low inequality*)



Gambar 1.2 Indeks Gini Kabupaten Muna Tahun 2004-2009

Sumber : BPS Kab. Muna 2005-2009

Cita-cita yang ingin dicapai oleh masyarakat di Kabupaten Muna diwujudkan melalui Visi dan Misi kabupaten. Salah satu tolok ukur dari keadaan yang dicita-citakan tersebut adalah mewujudkan pertumbuhan perekonomian daerah dengan akselerasi yang lebih dinamis, berkesinambungan dan terdepan di Sulawesi Tenggara serta didukung oleh sendi-sendi kemandirian lokal yang kokoh dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat, berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran serta meningkatnya peran dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya alam.

Pencapaian tersebut berlandaskan pada kemampuan perekonomian yang bertumpu kepada daya dukung sumber daya lokal dan memantapkan penataan pembangunan daerah di segala bidang dengan menekankan pada upaya penguatan daya saing perekonomian, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta penyelenggaraan pemerintah yang mengedepankan prinsip good government dan clean governance.

Sejalan dengan cita-cita tersebut, maka untuk mencapai tujuan pembangunan daerah ditetapkan beberapa sasaran pembangunan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2010-2015 dalam upaya untuk mendukung pengembangan pembangunan wilayah di Kabupaten Muna yang diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah serta diikuti oleh peningkatan/pemerataan pendapatan perkapita diatas rata-rata pertumbuhan nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan iklim investasi yang kondusif.

Oleh karenanya segenap kekuatan dan sumber daya lokal dimanfaatkan semaksimal mungkin demi tercapainya kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, sehingga pembangunan ekonomi ditempatkan sebagai suatu sarana guna mencapai kesejahteraan. Salah satu cara untuk mancapai cita-cita tersebut adalah dengan mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor usaha yang terdapat pada PDRB sehingga dapat memposisikan sektor tersebut sebagai basis sekaligus menjadi potensi unggulan daerah di Kabupaten Muna.

## **1.2. Perumusan Masalah.**

Secara umum perencanaan pembangunan di daerah tidak didasarkan pada kondisi dan potensi yang dimiliki, sehingga daerah tersebut sulit untuk menentukan prioritas pembangunan secara optimal melalui alokasi sumber daya yang ada. Dengan kondisi seperti ini kebijakan pembangunan yang dilaksanakan tanpa arah yang relevan. Akibatnya alokasi sumber daya pembangunan kurang tepat sehingga hasil-hasil pembangunan yang diperoleh juga tidak optimal. Untuk ini diperlukan adanya suatu landasan yang dapat menjadi bahan perencanaan pembangunan itu sendiri, yakni dengan menganalisis profil daerah melalui model-model ilmiah.

Dengan melihat kondisi perekonomian Kabupaten Muna, berbagai permasalahan yang timbul berkenaan dengan hal tersebut adalah :

1. Bagaimana kondisi dan potensi sektor lapangan usaha baik berupa sektor basis maupun sektor non basis di Kabupaten Muna.
2. Bagaimana strategi dan kebijakan pengembangan pembangunan Kabupaten Muna.

## **1.3. Ruang Lingkup/Batasan Masalah**

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara. Permasalahan dalam penulisan tesis ini dibatasi pada lingkup analisis sektor-sektor basis dan non basis Kabupaten Muna, serta analisis strategi dan kebijakan dalam rangka pengembangan pembangunan wilayah di Kabupaten Muna .

Adapun data-data yang diperlukan untuk penelitian ini meliputi data PDRB Kabupaten Muna dan PDRB Propinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Muna dalam angka, Propinsi Sulawesi Tenggara dalam Angka, Data Pokok Pembangunan Daerah, Evaluasi Pembangunan Daerah, data RPJMD dan lain-lain yang relevan dengan penelitian ini.

#### **1.4. Tujuan Penelitian.**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sektor-sektor basis dan non basis serta menganalisis strategi dan kebijakan dalam rangka pengembangan pembangunan di Kabupaten Muna.

#### **1.5. Manfaat Penelitian.**

Adapun dari hasil dari penelitian tesis ini diharapkan dapat diperoleh manfaat antara lain :

1. Sebagai sumbangan pemikiran khususnya dalam bidang perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam membuat strategi dan kebijakan dalam rangka pengembangan pembangunan wilayah dimasa yang akan datang dengan mengelaborasi pendekatan perencanaan sektoral dan kewilayahan (regional).
2. Menjadi bahan acuan bagi kajian ataupun penelitian sejenis.

#### **1.6. Sistematika penulisan .**

Sistematika penulisan tesis ini disusun dalam lima bab, dengan rincian pembahasan sebagai berikut :

*Bab pertama*, merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang latar belakang penelitian, permasalahan, ruang lingkup/batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan..

*Bab kedua*, memuat tentang tinjauan pustaka yang mencakup mengenai pengertian-pengertian serta konsep analisis kebijakan, konsep perencanaan pembangunan, perencanaan regional, teori pertumbuhan ekonomi, konsep basis ekonomi, analisis mengenai kebijakan publik serta konsep dan dimensi pembangunan berkelanjutan.

*Bab ketiga* menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang terdiri atas jenis dan sumber data, metode analisis data, perumusan model persamaan yang digunakan seperti analisis Location Quotient (LQ) dan *Analytical Hierarchy Process (AHP)*.

*Bab keempat*, menjelaskan tentang gambaran umum daerah penelitian yang berkenaan dengan kondisi wilayah, ketersediaan sarana dan prasarana serta kondisi perekonomian daerah Kabupaten Muna.

*Bab kelima*, merupakan pembahasan tentang analisis kondisi dan potensi sektor-sektor basis dan non basis daerah yang dianalisis dengan menggunakan pendekatan Location Quotient (LQ) serta analisis mengenai strategi dan kebijakan pembangunan wilayah yang dianalisis dengan menggunakan pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP).

*Bab keenam*, adalah penutup yang memuat tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran bagi pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Muna.

### **1.7. Keterbatasan Penelitian.**

Dalam penelitian tesis ini yang mengkaji mengenai strategi pembangunan Kabupaten Muna terdapat beberapa keterbatasan antara lain :

- Dalam penelitian tesis ini tidak menganalisis mengenai dampak multiplier dari sector perekonomian Kabupten dan terbatas hanya pada analisis Location Quotien (LQ) dengan melihat kondisi dan potensi sector basis dan non basis daerah yang dihitung berdasarkan nilai kegiatan produksi PDRB di Kabupaten Muna, sehingga nilai produksi tersebut seringkali tidak mencerminkan apakah kegiatan produksi itu berdampak bagi perekonomian daerah tersebut.
- Dalam menganalisis pertumbuhan ekonomi daerah difokuskan pada analisis Differential Shift (Sd) ini dilakukan untuk menganalisis mengenai Tipologi Klasen dan tidak menganalisis komponen pada Proposinal Shift (Sp)
- Keterbatasan metode AHP pada penelitian tesis ini adalah tidak dapat memastikan tingkat konsistensi dari setiap responden, sehingga dapat saja menurut penulis bahwa responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah ekspert dibidangnya tetapi menurut orang lain tidak demikian.
- Dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan jawaban kuesioner yang konsisten dari responden expert dalam penilaian dan perbandingan antar pilihan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pengertian Perencanaan Pembangunan Regional.**

Definisi yang terpisah-pisah mengenai perencanaan sangat banyak dijumpai pada berbagai macam literatur, namun demikian beberapa ciri-ciri tertentu yang terdapat dari perencanaan pada umumnya dapat diidentifikasi. Menurut *John Glasson*, Ciri-ciri pokok dari perencanaan umum mencakup serangkaian tindakan berurutan yang ditujukan pada pemecahan persoalan-persoalan di masa akan datang. Persoalan-persoalan perencanaan memang beraneka ragam, namun terlihat kecenderungan bahwa terutama mengenai persoalan-persoalan ekonomi dan sosial, periode perencanaan, cakrawala waktu dari masa akan datang juga bermacam-macam sesuai dengan tipe dan tingkat perencanaan, namun demikian semua perencanaan mencakup suatu proses yang berurutan. Secara umum bahwa perencanaan mencakup suatu proses yang berurutan yang dapat diwujudkan sebagai konsep dari sejumlah tahapan seperti:

- Identifikasi persoalan.
- Perumusan tujuan-tujuan umum dan sasaran yang lebih khusus dan dapat diukur.
- Identifikasi pembatas-pembatas yang mungkin.
- Proyeksi keadaan di masa akan datang.
- Pencarian dan penilaian berbagai arah kegiatan alternatif.
- Penyusunan suatu rencana yang dipilih yang di dalamnya dapat tercantum sesuatu perumusan kebijaksanaan atau strategi dan juga suatu rencana yang definitif.

Selanjutnya *Friedman (John Glasson : Pengantar Perencanaan Regional)* menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu cara berpikir mengenai persoalan-persoalan sosial dan ekonomi yang berorientasi pada masa akan datang dan sangat berkenaan dengan hubungannya antara tujuan dan keputusan-keputusan kolektif serta kebijakan dan program yang menyeluruh. Bilamana cara berpikir ini diterapkan maka dapat dikatakan bahwa perencanaan sedang dilaksanakan.

Perencanaan sebagai suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Dari definisi ini ada empat elemen dasar perencanaan, yakni :

a. Perencanaan berarti memilih.

Perencanaan merupakan proses memilih diantara berbagai kegiatan yang diinginkan karena tidak semua yang diinginkan tersebut dapat dilakukan dan tercapai secara simultan.

b. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumberdaya.

Penggunaan istilah sumber daya disini menunjukkan segala sesuatu yang dapat dianggap berguna dalam pencapaian suatu tujuan tertentu. Sumber daya di sini dapat mencakup sumber daya alam misalnya tanah, air, bahan tambang, hutan dan sebagainya, sumber daya manusia, sumberdaya modal dan sumber daya keuangan. Perencanaan menyangkut proses pengambilan keputusan tentang bagaimana penggunaan sumber daya yang tersedia sebaik-baiknya. Oleh karenanya kuantitas dan kualitas sumber daya tersebut sangat berpengaruh dalam proses memilih di antara berbagai pilihan serta tindakan-tindakan yang ada.

c. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan.

Konsep ini muncul berkenaan dengan sifat dan proses penetapan tujuan. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh seorang perencana adalah bahwa tujuan-tujuan mereka kurang dapat diartikulasikan secara tepat. Seringkali tujuan-tujuan tersebut didefinisikan secara kurang tegas, karena seringkali tujuan-tujuan tersebut ditetapkan oleh pihak lain (pemimpin politik misalnya).

d. Perencanaan untuk masa depan.

Salah satu elemen penting dalam perencanaan adalah elemen waktu. Tujuan-tujuan perencanaan dirancang untuk dicapai pada masa yang akan datang dan oleh karena itu perencanaan berkaitan dengan masa depan.

Sementara itu *Arthur Lewis*, pemenang hadiah nobel dibidang ilmu Ekonomi dalam bukunya yang berjudul *The Principles Of Economic Paninning*, membagi perencanaan dalam enam pengertian :

- *Pertama*, dalam banyak literatur istilah perencanaan seringkali dihubungkan dengan faktor letak geografis, bangunan tempat tinggal dan lainnya. Di negara sedang berkembang hal ini sering disebut dengan istilah perencanaan kota dan negara atau perencanaan tata guna tanah atau perencanaan fisik atau perencanaan kota dan daerah yang berkaitan dengan tata guna tanah yang didasarkan pada fungsi dan kegiatan.
- *Kedua*, perencanaan mempunyai arti keputusan penggunaan dana pemerintah di masa yang akan datang jika pemerintah memiliki dana untuk dibelanjakan.
- *Ketiga*, ekonomi berencana adalah ekonomi dimana setiap unit produksi hanya memanfaatkan sumber daya manusia, bahan baku dan peralatan yang dialokasikan dengan jumlah tertentu dan menjual produknya hanya kepada perusahaan atau perorangan yang ditunjuk oleh pemerintah.
- *Keempat*, perencanaan terkadang berarti bahwa setiap penentuan sasaran produksi oleh pemerintah apakah itu untuk perusahaan negara (BUMN) atau perusahaan swasta. Pemerintah di sebagian besar negara berkembang menerapkan perencanaan seperti ini, walaupun hanya untuk suatu cabang industri tertentu atau produk/jasa yang dianggap strategis.
- *Kelima*, penetapan sasaran untuk perekonomian secara keseluruhan dengan maksud untuk mengalokasikan semua tenaga kerja, devisa, bahan mentah dan sumber daya lainnya ke berbagai bidang perekonomian.
- *Keenam*, perencanaan terkadang dipakai untuk menggambarkan sarana yang digunakan pemerintah untuk memaksakan sasaran-sasaran yang ditetapkan sebelumnya kepada badan usaha swasta.

Perencanaan merupakan proses yang berkesinambungan dan tidak bisa dipisah-pisah dalam waktu singkat. Karenanya rencana lima tahun yang sedang berlangsung merupakan proyeksi dan kelanjutan dari rencana sebelumnya dan akan mengantar perencanaan berikutnya. Perencanaan adalah gerakan berkesinambungan menuju tujuan yang diinginkan dan karena itu, semua keputusan penting harus dibuat oleh badan yang mengetahui tujuan tersebut dan tujuan sosial di belakangnya. Bahkan dalam jangka waktu lima tahunpun harus selalu mempertimbangkan rencana jangka panjang.

Perencanaan yang dibuat dalam rangka pengembangan pembangunan wilayah dimaksudkan agar mempunyai arah dan sasaran dengan melihat perubahan-perubahan yang sesuai dengan tujuan yang sesuai pada tahap perencanaan, sehingga dengan demikian pelaksanaannya dapat dikendalikan dan hasil yang dicapai dapat diukur sesuai dengan kehendak dalam pembangunan tersebut. Menurut *Arsyad*, fungsi perencanaan pembangunan secara umum adalah:

- Dengan perencanaan, diharapkan terdapatnya suatu pengarah kegiatan dan adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan.
- Dengan perencanaan, dapat dilakukan suatu perkiraan potensi-potensi, prospek-prospek pengembangan, hambatan, serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang.
- Perencanaan memberikan kesempatan untuk mengadakan pilihan yang terbaik.
- Dengan perencanaan, dilakukan penyusunan skala prioritas dari segi pentingnya tujuan.
- Perencanaan sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk mengadakan evaluasi.

Perencanaan pembangunan regional merupakan suatu entitas ekonomi dengan unsur-unsur interaksi yang beragam. Aktivitas ekonomi wilayah diidentifikasi berdasarkan analisa ekonomi regional, yaitu dievaluasi secara komparatif dan kolektif terhadap kondisi dan kesempatan ekonomi skala wilayah.

Kebijakan pembangunan wilayah merupakan keputusan atau tindakan oleh pejabat pemerintah berwenang atau pengambil keputusan publik guna mewujudkan suatu kondisi pembangunan. Sasaran akhir dari kebijakan pembangunan tersebut adalah untuk dapat mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial secara menyeluruh sesuai dengan keinginan dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Dalam perkembangannya di Indonesia, berbagai pendekatan telah diterapkan. Pada dasarnya, perkembangan pendekatan pengembangan wilayah ditujukan untuk mengefisienkan pembangunan berdasarkan evaluasi pelaksanaan pendekatan sebelumnya serta disesuaikan pada tuntutan dalam kurun waktu tertentu.

Banyak cara dapat diterapkan dalam rangka pengembangan wilayah, mulai dari konsep pengembangan sektoral, basic needs approach sampai penataan ruang (pengaturan ruang secara terpadu melalui proses pemanfaatan sumber daya alam secara sinergi dengan pengembangan sumber daya manusia dan lingkungan hidup untuk mencapai pembangunan berkelanjutan).

Pengembangan wilayah dalam periode tahun 2000-an telah mengalami penyesuaian dalam penerapannya hingga terbentuk paradigma baru pengembangan wilayah/kawasan di era otonomi ini. Dalam paradigma baru ini, penataan wilayah lebih desentralistik (bottom-up approach) dan penyusunan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) disiapkan pemerintah daerah bersangkutan dengan mengikutsertakan masyarakat (public participation).

Alternatif pengganti perencanaan di era otonomi ini adalah penataan ruang wilayah/kawasan yang mempunyai konsep dan karakteristik berikut:

- Pendekatan bottom-up dan melibatkan semua pelaku pembangunan.
- Transparan dalam perencanaan, implementasi dan pengendalian.
- Memberi perhatian besar pada tuntutan jangka pendek.
- Realistis terhadap tuntutan dunia usaha dan masyarakat.
- Berwawasan luas, dengan perhatian pada kawasan lebih detail.
- Rencana dapat dijadikan pedoman investasi.
- Menjaga dan meningkatkan mutu lingkungan sambil mendorong dan memfasilitasi pembangunan.
- Mempunyai visi pembangunan dan manajemen pembangunan (applicable).

## **2.2. Pendekatan Dalam Perencanaan Pembangunan**

Dalam perencanaan pembangunan, pendekatan wilayah dimaksudkan untuk melihat pemanfaatan ruang serta interaksi berbagai kegiatan dalam ruang wilayah sehingga terlihat perbedaan fungsi ruang yang satu dengan ruang lainnya. Perencanaan pembangunan juga memperhatikan bagaimana ruang tersebut saling berinteraksi untuk diarahkan kepada tercapainya kehidupan yang efisien dan nyaman. Perbedaan fungsi dapat terjadi karena perbedaan lokasi, perbedaan potensi, dan perbedaan aktivitas utama pada masing-masing ruang yang harus diarahkan untuk

bersinergi agar saling mendukung penciptaan pertumbuhan yang serasi dan seimbang.

Pendekatan wilayah dalam pengertian sempit adalah memperhatikan ruang dengan segala kondisinya. yang melalui analisis diketahui bahwa masih ada ruang yang belum dimanfaatkan atau penggunaannya masih belum optimal. kemudian direncanakan kegiatan apa yang sebaiknya diadakan pada lokasi tersebut sehingga penggunaan ruang tersebut menjadi serasi dan efisien dan memberikan kemakmuran yang optimal bagi masyarakat.

Dengan pendekatan wilayah dimungkinkan untuk melihat dan memperhatikan potensi SDA, SDM, teknologi, sosial budaya, letak geografis dan lain-lainnya dari suatu daerah, kemudian dimanfaatkan untuk melakukan kerja sama antar daerah untuk bersinergi dan saling mendukung demi memperoleh manfaat bersama yang sebesar-besarnya. Daerah harus menyadari bahwa untuk mengembangkan dan membangun daerah secara optimal tidaklah mungkin dapat dilakukan sendiri-sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki daerahnya saja tanpa melibatkan daerah lain. Hal ini disebabkan masing-masing daerah mempunyai latar belakang kekuatan yang berbeda, baik menyangkut economic resources maupun kultur masyarakat, demografi dan geografi. Daerah muka dan daerah belakang, maupun berbagai akses yang ada.

Dalam mewujudkan kerjasama antar daerah dengan pendekatan wilayah tersebut, perencanaan pembangunan kabupaten/kota harus mampu melihat dan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang dimilikinya agar lebih berdaya guna dengan memberikan kesempatan bagi daerah lain untuk memanfaatkannya. Demikian pula sebaliknya, memperhatikan fasilitas daerah lain yang dapat dimanfaatkan oleh daerahnya dengan pertimbangan jika fasilitas tersebut disediakan oleh daerahnya akan memerlukan dana dan pengorbanan yang cukup besar sehingga tidak efisien.

Pengamatan potensi daerah sendiri dan potensi daerah lain dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun langkah-langkah perencanaan pembangunan melalui pendekatan wilayah. Dengan melakukan kerjasama antar pemerintah daerah, akan terbuka kesempatan untuk mengatasi masalah-masalah bersama. Dengan melibatkan dua atau lebih pemerintah daerah, masalah tersebut dapat diselesaikan dengan

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada daerah-daerah yang menjalin kerja sama tersebut. Tentu saja ada hal-hal tertentu yang dapat ditangani oleh daerah secara mandiri tanpa melibatkan daerah lain,

Dalam perencanaan pembangunan, baik itu perencanaan nasional maupun perencanaan daerah, dapat dilakukan dengan dua cara pendekatan, yaitu pendekatan sektoral dan pendekatan regional (wilayah). Sebagaimana kita ketahui, pendekatan sektoral memfokuskan perhatiannya pada sektor-sektor kegiatan yang ada di wilayah tersebut dan mengelompokkan kegiatan ekonomi menurut sektor-sektor yang sejenis. Sedangkan pendekatan wilayah (regional) melihat pemanfaatan ruang serta interaksi-interaksi berbagai kegiatan dalam ruang suatu wilayah. Dengan demikian pendekatan wilayah melihat perbedaan fungsi ruang yang satu dengan ruang lainnya dan mengamati bagaimana ruang itu saling berinteraksi untuk diarahkan pada pencapaian efisiensi dan kenyamanan yang optimal demi kemakmuran daerahnya (Miraza H, 2004).

Menurut Budiharsono, 1989 ada dua pendekatan dalam pembangunan suatu wilayah, yaitu pendekatan sektoral dan regional. Pendekatan sektoral dimulai dengan pertanyaan yang menyangkut sektor apa yang dikembangkan untuk mencapai suatu tujuan pembangunan nasional. Pertanyaan selanjutnya adalah berapa banyak yang harus diproduksi, dengan cara atau teknologi apa dan kapan produksi dimulai. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan susulan yaitu dimana aktivitas tiap sektor akan dilaksanakan dan diikuti oleh kebijakan apa, strategi apa dan langkah-langkah apa yang perlu diambil.

Berbeda dengan pendekatan sektoral, pada pendekatan regional lebih menitikberatkan pada pertanyaan daerah mana yang perlu mendapat prioritas untuk dikembangkan. Kemudian sektor apa yang sesuai dikembangkan di masing-masing daerah. Indonesia memerlukan gabungan kedua pendekatan tersebut. Hal ini penting tidak hanya dari segi konsep, namun juga dari segi pelaksanaan, khususnya yang menyangkut koordinasi pembangunan di daerah.

Pendekatan wilayah (regional) memandang wilayah sebagai kumpulan dari bagian-bagian wilayah yang lebih kecil dengan potensi dan daya tarik serta daya dorong yang berbeda-beda, yang mengharuskan mereka menjalin hubungan untuk

mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Mengembangkan dan membangun suatu wilayah harus meliputi berbagai daerah pinggiran sehingga dapat menciptakan manfaat potensi ekonomi daerah dan wilayah yang pada saatnya menciptakan daya saing ekonomi yang kuat untuk wilayah tersebut. Perencanaan wilayah mencakup berbagai kehidupan yang komprehensif (satu sama lain saling bersentuhan), yang semuanya bermuara pada upaya meningkatkan kehidupan masyarakat. Berbagai faktor dalam kehidupan seperti ekonomi, politik, dan sosial serta budaya maupun adat istiadat, berbau dalam sebuah perencanaan wilayah yang cukup kompleks. Perencanaan wilayah diharapkan dapat menciptakan sinergi untuk memperkuat posisi pengembangan dan pembangunan wilayah.

Dari uraian ini jelaslah bahwa pendekatan wilayah (regional) pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota merupakan suatu keharusan, jika kabupaten/kota ingin mencapai hasil yang optimal dan efisien. Namun, pendekatan regional harus dipadukan dengan pendekatan sektoral karena masing-masing mempunyai kemampuan dalam menyelesaikan suatu pembangunan.

### **2.3. Sektor Potensial Dalam Pengembangan Wilayah .**

Persoalan pokok dalam pembangunan daerah sering terletak pada sumberdaya dan potensi yang dimiliki guna menciptakan peningkatan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut ada kerjasama Pemerintah dan masyarakat untuk dapat mengidentifikasi potensi-potensi yang tersedia dalam daerah dan diperlukan sebagai kekuatan untuk pembangunan perekonomian wilayah.

Pengembangan wilayah diartikan sebagai semua upaya yang dilakukan untuk menciptakan pertumbuhan wilayah yang ditandai dengan pemerataan pembangunan dalam semua sektor dan pada seluruh bagian wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat terjadi secara serentak pada semua tempat dan semua sektor perekonomian, tetapi hanya pada titik-titik tertentu dan pada sektor-sektor tertentu pula. Disebutkan juga bahwa investasi diprioritaskan pada sektor-sektor utama yang berpotensi dan dapat meningkatkan pendapatan wilayah dalam jangka waktu relatif singkat (Glasson, 1990).

Dari definisi tersebut diatas dimaksudkan bahwa wilayah yang memiliki potensi berkembang lebih besar akan berkembang lebih pesat, kemudian pengembangan wilayah tersebut akan merangsang wilayah sekitarnya. Bagi sektor yang memiliki potensi berkembang lebih besar cenderung dikembangkan lebih awal yang kemudian diikuti oleh perkembangan sektor lain yang kurang potensial.

Dalam pengembangan wilayah, pengembangan tidak dapat dilakukan serentak pada semua sektor perekonomian akan tetapi diprioritaskan pada pengembangan sektor-sektor perekonomian yang potensi berkembangnya cukup besar. Karena sektor ini diharapkan dapat tumbuh dan berkembang pesat yang akan merangsang sektor-sektor lain yang terkait untuk berkembang mengimbangi perkembangan sektor potensial tersebut.

Perkembangan ekonomi suatu wilayah membangun suatu aktivitas perekonomian yang mampu tumbuh dengan pesat dan memiliki keterkaitan yang tinggi dengan sektor lain sehingga membentuk forward linkage dan backward linkage. Pertumbuhan yang cepat dari sektor potensial tersebut akan mendorong polarisasi dari unit-unit ekonomi lainnya yang pada akhirnya secara tidak langsung sektor perekonomian lainnya akan mengalami perkembangan.

Jadi disimpulkan bahwa pengembangan suatu sektor ekonomi potensial dapat menciptakan peluang bagi berkembangnya sektor lain yang terkait, baik sebagai input bagi sektor potensial maupun sebagai imbas dari meningkatnya kebutuhan tenaga kerja sektor potensial yang mengalami peningkatan pendapatan. Hal inilah yang memungkinkan pengembangan sektor potensial dilakukan sebagai langkah awal dalam pengembangan perekonomian wilayah dan pengembangan wilayah secara keseluruhan.

### **2.3.1. Tipologi Ekonomi Regional.**

Karakteristik tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi daerah berdasarkan anakisa Tipologi Klassen (Sjahrizal, 1997) digunakan untuk mengetahui gambaran tentang struktur pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan perkapita daerah dengan menentukan rata-rata

pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan perkapita sebagai sumbu horizontal.

Daerah yang diamati dapat dibagi menjadi empat klasifikasi yaitu daerah cepat maju dan cepat tumbuh (High growth and high income), daerah maju tapi tertekan (high income but low growth), daerah berkembang cepat (high growth but low income) dan daerah relatif tertinggal (low growth and low income). Kriteria yang digunakan untuk membagi daerah adalah sebagai berikut:

- 1). Daerah cepat maju dan cepat tumbuh (High growth and high income) adalah laju pertumbuhan PDRB dan pendapatan perkapita lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan dan pendapatan perkapita rata-rata nasional.
- 2). Daerah maju tapi tertekan. (high income but low growth) yaitu daerah yang relatif maju, tapi dalam beberapa tahun terakhir laju pertumbuhan menurun akibat tertekannya kegiatan utama daerah yang bersangkutan. Daerah ini merupakan daerah yang telah maju tapi dimasa mendatang pertumbuhannya tidak akan begitu cepat walaupun potensi pengembangan yang dimiliki pada dasarnya sangat besar. Daerah ini mempunyai pendapatan perkapita lebih tinggi tapi tingkat pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional.
- 3). Daerah berkembang cepat (high growth but low income) adalah daerah yang dapat berkembang cepat dengan potensi pengembangan yang dimiliki sangat besar tapi belum diolah sepenuhnya secara baik. Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah sangat tinggi, namun tingkat pendapatan perkapita yang mencerminkan dari tahap pembangunan yang telah dicapai sebenarnya masih relatif rendah. Daerah ini memiliki tingkat pertumbuhan tinggi tetapi tingkat pendapatan perkapita lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional.
- 4). Daerah relatif tertinggal (low growth and low income) adalah daerah yang masih mempunyai tingkat pertumbuhan dan pendapatan perkapita lebih rendah dari pada rata-rata nasional.

### 2.3.2. Differential Shift (Sd).

Differential Shift (Sd) merupakan komponen lokasional atau komponen regional yang mengukur besarnya shift regional netto yang diakibatkan oleh sektor-sektor tertentu yang tumbuh lebih cepat atau lebih lambat pada daerah yang bersangkutan dibanding dengan daerah di atasnya.

Suatu daerah yang mempunyai keuntungan-keuntungan lokasional, seperti halnya sumberdaya yang baik atau potensial, akan memiliki diferensial shift yang positif, sedangkan daerah yang secara lokasional tidak menguntungkan akan mempunyai diferensial shift yang negatif. Menurut Glasson, komponen Differential Shift (Sd) memisahkan unsur-unsur pertumbuhan regional yang bersifat intern akibat dari pengaruh faktor-faktor yang bekerja di dalam daerah yang bersangkutan. Suatu daerah dapat saja mempunyai keunggulan komparatif dibandingkan dengan daerah lain, oleh karena lingkungan mendorong suatu sektor untuk tumbuh lebih cepat.

Differential Shift (Sd) mempunyai beberapa kelebihan, antara lain sederhana dan datanya dapat mudah diperoleh, menggambarkan pemisahan kontribusi nasional dengan pertumbuhan/kinerja daerah melalui dampak intra daerah. Namun demikian ada juga beberapa kritik atas model ini antara lain bahwa ini merupakan model untuk satu wilayah, bukan untuk antar wilayah (Richardson, H.W).

## 2.4. Model Ekonomi Basis Untuk Perencanaan Pembangunan Daerah.

### 2.4.1. Konsep Ekonomi Basis.

Dalam perekonomian regional terdapat kegiatan-kegiatan basis dan kegiatan-kegiatan bukan basis. Menurut Glasson (1990) kegiatan-kegiatan basis (*Basic activities*) adalah kegiatan mengekspor barang-barang dan jasa keluar batas perekonomian masyarakatnya atau memasarkan barang dan jasa mereka kepada orang yang datang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan kegiatan bukan basis (*Non basic activities*) adalah kegiatan menyediakan barang yang dibutuhkan oleh orang yang bertempat tinggal didalam batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan ini tidak mengekspor barang, jadi luas lingkup produksi dan daerah pasar yang terutama bersifat lokal. Implicit didalam pembagian kegiatan-kegiatan ini terdapat

hubungan sebab akibat yang membentuk teori basis ekonomi.

Suatu ukuran yang digunakan dalam basis ekonomi adalah tenaga kerja dan nilai tambah bruto (NTB). Namun satuan data tenaga kerja sulit dilakukan karena adanya perbedaan-perbedaan dari definisi tenaga kerja itu sendiri. Sedangkan NTB lebih mudah dari pelaksanaannya karena datanya relatif lebih mudah didapat sampai level wilayah kabupaten. Formula yang digunakan dalam basis ekonomi pada dasarnya adalah sebagai berikut :

$$T = B + NB$$

$$NB = aT$$

Dimana :

T : Kegiatan Total

B : Sektor Basis

NB : Sektor non Basis

a : % bagian dari non Basis

Jika persamaan tersebut disubstitusikan maka akan didapat :

$$T = B + aT$$

$$T - aT = B$$

$$T(1-a) = B$$

$$T = 1/(1-a) B$$

$$1 / (1-a) = \text{multiplier}$$

Rumus tersebut menyatakan bahwa sektor non basis mendapat bagian dari pendapatan sektor basis yang besarnya tercermin dalam nilai a, nilai ini mengasumsikan tidak adanya kemungkinan dari sektor basis untuk mendapatkan bagian dari sektor non basis, a dalam persamaan di atas menunjukkan peningkatan/penurunan absolute dalam aktivitas ekonomi local (sector non basis) terhadap aktivitas total. Dari persamaan tersebut dapat diartikan bahwa pembangunan ekonomi dari proses pertumbuhan digerakkan oleh permintaan daerah lain. Menurut Glasson (1990) Pendekatan secara tidak langsung mengenai pemisahan antara kegiatan basis dan kegiatan bukan basis dapat menggunakan salah satu ataupun gabungan dari tiga metode yaitu :

- a. Menggunakan asumsi-asumsi atau metode arbetrer sederhana

Mengasumsikan bahwa semua industri primer dan manufaktur adalah Basis, dan semua industri Jasa adalah bukan basis, metode tidak memperhitungkan adanya kenyataan bahwa dalam sesuatu kelompok industri bisa terdapat industri-industri yang menghasilkan barang yang sebagian diekspor atau dijual kepada lokal atau ke duanya.

b. Metode *Location Quotient* (LQ).

Metode *Location Quotient* (LQ) adalah salah satu teknik pengukuran yang paling terkenal dari model basis ekonomi untuk menentukan sektor basis atau non basis. Metode ini digunakan untuk menghitung kapasitas ekspor suatu perekonomian (wilayah) dan juga untuk mengetahui derajat kemandirian suatu sektor di perekonomian wilayah tersebut. Dalam proses penghitungannya analisis LQ menggunakan perbandingan antara kondisi perekonomian suatu wilayah dengan perekonomian acuan yang meliputi daerah yang lebih besar. Metode ini relative tidak terlalu sulit, karena prosesnya sederhana dan tidak membutuhkan banyak data, sehingga mudah dilakukan dengan cepat. Satuan dalam penelitian LQ dapat berupa satuan jumlah tenaga, hasil produksi, nilai tambah.

Pendekatan yang dilakukan melalui analisis LQ pada dasarnya mengacu pada pendekatan basis ekonomi yang melihat ekspor sebagai sumber pendapatan utama sektor basis. Berakaitan dengan itu maka pada tingkat lokal dibutuhkan pengetahuan tentang sektor yang memiliki kemampuan ekspor, sehingga dengan teknik LQ dapat juga digunakan untuk mengetahui jenis jenis sektor yang memiliki kapasitas ekspor dalam suatu perekonomian lokal tertentu sehingga nilai LQ juga sering digunakan sebagai indikator yang menunjukkan keunggulan komparatif suatu lokasi. Konsep teori basis ekonomi berpandangan bahwa pendapatan dari ekspor merupakan faktor penggerak utama bagi kegiatan suatu perekonomian lokal. Oleh karena itu kinerja perekonomian sangat tergantung pada faktor eksternal khususnya permintaan dari luar wilayah.

Menurut (Richardson, 1977). Aktivitas perekonomian regional digolongkan dalam dua sektor kegiatan, yaitu aktivitas basis dan non basis. Kegiatan basis merupakan kegiatan yang berorientasi ekspor (barang dan jasa) keluar batas wilayah

perekonomian yang bersangkutan, sedangkan kegiatan non basis merupakan kegiatan berorientasi local yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat dalam batas wilayah perekonomian yang bersangkutan. Kelebihan dari teori ini adalah mudah diterapkan, sederhana dan dapat menjelaskan struktur perekonomian suatu daerah serta dampak umum dari perubahan-perubahan jangka pendek. Keterbatasan teori ini tidak terlalu ketat dan dapat menjadi landasan yang sangat bermanfaat bagi peramalan jangka pendek .

Teori basis ekonomi menurut Arsyad Lincolin (1997), bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Strategi pembangunan daerah yang muncul yang didasarkan pada teori ini adalah penekanan terhadap arti penting bantuan kepada dunia usaha yang meiiipunyai pasar secara nasional maupun intemasional. Kelemahan model ini adalah ini didasarkan pada permintaan eksternal bukan internal. Pada akhirnya akan menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kekuatan-kekuatan pasar secara nasional maupun global. Namun demikian, model ini sangat berguna untuk menentukan keseimbangan antara jenis-jenis industri dan sektor yang dibutuhkan masyarakat untuk mengembangkan stabilitas ekonomi

Sedangkan teori basis ekonomi menurut (Robinson Tarigan,2005), mendasarkan pandangan bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Kegiatan ekonomi dikelompokkan atas kegiatan basis dan kegiatan nonbasis. Hanya kegiatan basis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut.

Bertambah banyaknya kegiatan basis dalam suatu daerah akan menambah arus pendapatan kedalam daerah yang bersangkutan, menambah permintaan barang dan jasa sehingga akan menimbulkan kenaikan volume kegiatan. Sebaliknya berkurangnya kegiatan basis akan mengurangi pendapatan suatu daerah dan turunnya permintaan terhadap barang dan jasa dan akan menurunkan volume kegiatan. Kegiatan basis mempunyai peranan penggerak pertama (*Prime mover role*) dimana setiap perubahan mempunyai *efek multiplier* terhadap perekonomian regional. Aktivitas basis memiliki peranan sebagai penggerak utama (*primer mover*) dalam pertumbuhan suatu wilayah. Semakin besar

ekspor suatu wilayah ke wilayah lain akan semakin maju pertumbuhan wilayah tersebut, dan demikian sebaliknya. Setiap perubahan yang terjadi pada sektor basis akan menimbulkan efek ganda (multiplier effect) dalam perekonomian regional (Adisasmita, 2005).

Sektor basis adalah sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah karena mempunyai keuntungan kompetitif (Competitive Advantage) yang cukup tinggi. Sedangkan sektor non basis adalah sektor-sektor lainnya yang kurang potensial tetapi berfungsi sebagai penunjang sektor basis atau service industries (Sjafrizal, 2008). Sektor basis ekonomi suatu wilayah dapat dianalisis dengan teknik Location Quotient (LQ), untuk mengetahui seberapa besar tingkat spesialisasi sektor basis atau sektor unggulan (leading sectors).

Teknik analisis Location Quotient (LQ) dapat menggunakan variabel tenaga kerja atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah sebagai indikator pertumbuhan wilayah. Location Quotient merupakan rasio antara jumlah tenaga kerja pada sektor tertentu atau PDRB terhadap total jumlah tenaga kerja sektor tertentu atau total nilai PDRB suatu daerah dibandingkan dengan rasio tenaga kerja dan sektor yang sama dengan daerah yang lebih tinggi (referensi).

Inti dari model ekonomi basis adalah arah dan pertumbuhan suatu daerah akan ditentukan oleh sektor-sektor yang mengekspor produknya ke daerah atau bahkan ke negara lain. Oleh karena itu seringkali model basis ekonomi disebut juga model basis ekspor.

Model basis ekonomi atau basis ekspor dalam perencanaan pembangunan daerah sebenarnya diambil atau diadopsi dari model ekonomi makro atau model pertumbuhan ekonomi nasional. Seperti diketahui ada 2 (dua) model pertumbuhan ekonomi nasional secara makro yaitu : pertama, model yang menganggap faktor-faktor dari dalam ( internal) sebagai pemacu pertumbuhan dan kedua, model yang menganggap faktor-faktor dari luar (eksternal) sebagai pemacu pertumbuhan.

Model yang menganggap faktor internal sebagai pemacu pertumbuhan memakai alat fungsi produksi dimana pertumbuhan akan dipengaruhi oleh antara lain modal dan sumberdaya manusia yang dimiliki suatu negara. Sedangkan model yang menganggap faktor eksternal sebagai pemacu pertumbuhan, menganggap

antara lain kegiatan perdagangan internasional atau hubungan ekonomi internasional sebagai pemacu pertumbuhan suatu negara.

Model Basis Ekonomi mengadopsi model pertumbuhan ekonomi makro-nasional yang menganggap bahwa faktor-faktor eksternal seperti perdagangan luar negerilah yang dapat memacu pertumbuhan. Adopsi model-model ekonomi makro-nasional ke model perencanaan pembangunan daerah terpaksa dilakukan karena ilmu ekonomi regional yang menjadi induk dari perencanaan daerah masih relatif muda dibanding ilmu ekonomi makro (nasional). Jadi adopsi dilakukan karena model atau teknik yang spesifik dalam ekonomi regional belum ada atau belum berkembang.

Adopsi tersebut menurut Harry W Richardson (1977), sebenarnya mengandung kelemahan karena: (1) Karakteristik ekonomi nasional dan regional atau daerah sangatlah berbeda. Ekonomi nasional misalnya bisa ditutup atau menutup diri dari hubungan ekonomi negara lain. Akan tetapi ekonomi daerah tidak bisa berbuat demikian. Jadi ekonomi daerah bersifat lebih terbuka daripada ekonomi nasional. (2) biasanya ketersediaan data ekonomi daerah lebih terbatas dan kurang sempurna dibanding data ekonomi nasional. Akibatnya kebutuhan data dalam model ekonomi makro nasional seringkali gagal dipenuhi bila model tersebut diadopsi untuk ekonomi daerah atau regional., (3) ekonomi daerah atau regional mengandung banyak variabel diluar kontrol pemerintah daerah (variabel eksogen). Hal ini disebabkan oleh tingkat keterbukaan daerah yang tinggi dan keterbatasan wewenang pemerintah daerah dibanding pemerintah nasional..

Meskipun memiliki banyak keterbatasan tetapi adopsi model basis ekonomi untuk perencanaan pembangunan daerah dari model pertumbuhan ekonomi makro nasional tetap berguna.

#### **2.4.2. Teknik Analisis Sektor Basis**

Ada beberapa teknik analisis yang biasa dipakai untuk mengidentifikasi sektor basis sebuah kota atau kabupaten. Beberapa teknik analisis itu antara lain :

##### **1. Teknik Arbitrer Sederhana**

Menurut teknik ini sektor yang merupakan sektor basis adalah sektor industry atau manufaktur. Sedangkan sektor lain adalah sektor non-basis. Hal ini

didasarkan pada kenyataan bahwa hanya sektor industri manufaktur lah yang mampu menghasilkan produk secara massa sehingga mampu memenuhi kebutuhan daerah itu sendiri sekaligus kebutuhan dari luar daerah tersebut. Di samping itu karena sifat produksinya maka dampak terhadap penyerapan kesempatan kerjanya juga lebih besar.

## 2. Teknik Location Quotient.

Teknik ini digunakan untuk menentukan sektor basis ada beberapa macam antara lain:

a. Location Quotient atas dasar tenaga kerja per sektor dengan rumus :

$$LQ = (X_{ij} / X_j) / (Y_i / Y)$$

Keterangan :

LQ : Indeks Location Quotient

X<sub>ij</sub> : Jumlah Tenaga Kerja yang bekerja di sektor i di Kabupaten atau Kota j.

X<sub>j</sub> : Jumlah Total Tenaga kerja di Kabupaten atau Kota J

Y<sub>i</sub> : Jumlah Tenaga Kerja disektor I di propinsi atau daerah acuan lain.

Y : Jumlah total tenaga kerja di Propinsi atau daerah acuan lain.

b. Location Quotient atas dasar PDRB dengan rumus :

$$LQ = (X_{ij} / X_j) / (Y_i / Y)$$

Keterangan :

LQ : Indeks Location Quotient

X<sub>ij</sub> : Nilai PDRB sektor i di kabupaten atau kota j.

X<sub>j</sub> : Nilai PDRB total di Kabupaten atau kota j

Y<sub>i</sub> : Nilai PDRB sektor i di Propinsi atau daerah acuan lain

Y : Nilai PDRB total i di Propinsi atau daerah acuan lain

Justifikasi untuk kuosien lokasi baik atas dasar tenaga kerja maupun PDRB adalah ;

- Jika  $LQ > 1$  maka suatu sektor dikatakan sektor basis.

- Jika  $LQ = 1$  maka dikatakan suatu sektor mendekati sebagai sektor basis

( beberapa penulis mengkategorikan sektor yang LQ nya 1 adalah sektor basis ).

- Jika  $LQ < 1$  maka suatu sektor bukan merupakan sektor basis

c. Location Quotient Atas Dasar Komoditi atau Produksi Suatu Wilayah.

Location Quotient jenis ini memang tidak dipakai untuk menentukan sektor basis tetapi biasanya digunakan untuk menentukan apakah komoditi yang merupakan hasil suatu wilayah merupakan komoditi unggulan atau tidak (lihat misalnya Tri Wahyu, Dkk, 2002). Namun untuk melengkapi pengetahuan ada baiknya dijelaskan di sini. Adapun rumus yang dipakai adalah :

$$LQ = (X_{ij} / X_j) / (Y_i / Y)$$

Keterangan :

LQ : Indeks Location Quotient

$X_{ij}$  : Jumlah nilai produksi komoditi  $i$  di suatu sektor /subsektor di sektor  $i$  di Kabupaten atau kota  $j$ .

$X_j$  : Nilai produksi total semua komoditi di suatu sektor /subsektor di sektor  $i$  di Kabupaten atau kota  $j$ .

$Y_i$  : Jumlah nilai produksi komoditi  $i$  di suatu sektor /subsektor di propinsi atau daerah acuan lain.

$Y$  : Nilai produksi total semua komoditi di suatu sektor /subsektor di sektor  $i$  di Propinsi atau daerah acuan lain .

Justifikasi untuk kuosien lokasi baik atas dasar nilai produksi suatu komoditi adalah :

- Jika  $LQ > 1$  maka komoditi tersebut merupakan komoditi unggulan suatu wilayah
- Jika  $LQ = 1$  maka dikatakan suatu komoditi mendekati sebagai komoditi unggulan suatu wilayah. Beberapa penulis mengkategorikan komoditi yang LQ nya 1 adalah komoditi unggulan.
- Jika  $LQ < 1$  maka suatu komoditi bukan merupakan komoditi unggulan.

Model ekonomi makro nasional untuk perencanaan pembangunan daerah, dalam teknik analisis LQ ini akan tampak bahwa ternyata Indek LQ ini mengadopsi dari Indeks Revealed Comparative Advantage (RCA) untuk menentukan komoditi dimana suatu negara itu mempunyai keunggulan komparatif dibanding negara-

negara lain dalam teori perdagangan internasional . Adapun rumus dari Rumus Indeks Revealed Comparative Advantage (RCA) adalah sebagai berikut :

$$RCA_{ij} = (X_{ij} / X_j) / (W_j / W)$$

Keterangan :

- X<sub>ij</sub> : Nilai ekspor komoditi j dari negara i.
- X<sub>j</sub> : Nilai ekspor total semua komoditi dari negara i
- W<sub>j</sub> : Nilai ekspor komoditi j di dunia atau wilayah yang lebih luas dari Negara i (mis. Suatu kawasan perdagangan bebas dimana Negara i menjadi anggota .
- W : Nilai eksporttotal semua komoditi di dunia atau wilayah yang lebih luas dari negara i (mis. Suatu kawasan perdagangan bebas dimana Negara i menjadi anggota .

Justifikasi dari nilai Indeks RCA adalah sebagai berikut:

- RCA  $ij > 1$  berarti komoditi j di negara i mempunyai keunggulan komparatif sebagai komoditi ekspor dibandingkan negara-negara lain di dunia atau di kawasan acuan lain (misal di kawasan perdagangan bebas di mana negara i menjadi anggota).
- RCA  $ij = 1$  berarti komoditi j di negara i mendekati komoditi yang mempunyai keunggulan komparatif sebagai komoditi ekspor dibandingkan negara-negara lain di dunia atau di kawasan acuan lain (misal di kawasan perdagangan bebas di mana negara i menjadi anggota).
- RCA  $ij < 1$  berarti komoditi j di negara i tidak mempunyai keunggulan komparatif sebagai komoditi ekspor dibandingkan negara-negara lain di dunia atau di kawasan acuan lain (misal di kawasan perdagangan bebas di mana negara i menjadi anggota)

### 3. Teknik Kebutuhan Minimum

Tekhnik ini merupakan modifikasi dari teknik Location Quotient (LQ) dengan menggunakan distribusi minimum dan bukannya distribusi rata-rata dari penyerapan tenaga kerja yang diperlukan untuk menopang suatu sektor di suatu daerah. Untuk suatu daerah (Kabupaten atau Kota) yang pertama-tama dihitung adalah persentase tenaga kerja daerah yang bekerja di setiap sektor. Persentase

terkecil digunakan sebagai ukuran kebutuhan minimum bagi sektor tersebut. Persentase minimum ini dipergunakan sebagai batas.

Suatu sektor yang menyerap tenaga kerja di atas persentase penyerapan tenaga kerja minimum dianggap sebagai sektor basis. Dengan metode seperti itu maka sering dikatakan bahwa Teknik Kebutuhan Minimum ini lebih arbitrer (acak) dibanding Teknik Location Quotient (LQ)

### 2.4.3. Beberapa Penjelasan Tentang Teknik Location Quotient

Dibanding dua teknik yang lain untuk mengetahui sektor basis di suatu daerah, maka Teknik LQ yang paling sering digunakan. Alasannya karena teknik LQ lebih pasti atau tidak acak (arbitrer) dibanding dua teknik yang lain. Akan tetapi ada beberapa penjelasan mengenai teknik LQ ini.

- Pertama, mengenai asumsi yang dipakai dalam teknik ini. Ada 2 (dua) asumsi penting dalam Teknik LQ yaitu : pertama, pola permintaan penduduk daerah yang dihitung LQ nya sama dengan pola permintaan penduduk daerah yang lebih luas atau daerah acuan; dan kedua, permintaan dari suatu daerah akan dipenuhi dari daerah itu sendiri, baru kekurangannya akan diimpor dari daerah lain.

Pada kenyataannya kedua asumsi tersebut sulit dipenuhi. Asumsi keseragaman pola permintaan antara daerah yang dihitung dengan pola permintaan daerah acuan sering tidak terbukti dalam praktek karena perbedaan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan misalnya: pendapatan, harga barang, dan selera. Asumsi kedua pun sangat jarang dipenuhi dalam praktek. Kebutuhan penduduk suatu daerah seringkali langsung dipenuhi dari daerah lain karena di daerahnya sendiri tidak ada produksi untuk produk atau jasa yang dimaksud. Tidak adanya produksi produk atau jasa yang dimaksud karena tidak adanya keunggulan komparatif di daerah itu bagi produksi produk atau jasa yang dimaksud. Demikian juga ada kemungkinan produksi suatu daerah tidak dikonsumsi oleh penduduknya sendiri melainkan oleh penduduk asing. ( Glasson ).

- Kedua, menyangkut mana yang sebaiknya digunakan apakah teknik LQ yang dihitung berdasar tenaga kerja sektoral ataukah LQ berdasarkan PDRB.

Richardson 1977) berpendapat bahwa bahwa penggunaan teknik LQ atas dasar tenaga kerja sektoral lebih baik dibandingkan teknik LQ yang dihitung berdasar PDRB. Seperti diketahui PDRB hanya menunjukkan nilai kegiatan produksi di suatu daerah. Nilai produksi tersebut seringkali tidak mencerminkan apakah kegiatan produksi itu mempunyai dampak positif bagi perekonomian daerah itu. Seringkali kegiatan produksi di suatu daerah tidak terkait dengan ekonomi daerah itu karena memakai tenaga kerja, peralatan dan bahan baku dari luar daerah atau bahkan dari negara lain.

Banyak contoh kasus seperti itu di daerah-daerah di Indonesia. Misalnya: "PT Freeport" di Papua yang memakai tenaga kerja asing dan peralatan dari luar negeri. Akibatnya nilai PDRB Papua tinggi, Perusahaan Free Port kaya, tetapi penduduk asli Papua tetap miskin. Oleh karena itu LQ yang dihitung berdasarkan tenaga kerja lebih mencerminkan suatu sektor sebagai sektor yang benar-benar basis atau menjadi tumpuan daerah tersebut.

- Ketiga, menyangkut perhitungan LQ yang seringkali hanya pada satu titik waktu pengamatan saja. Bagaimana kalau lama kelamaan suatu sektor terus merosot kinerjanya sehingga tidak menjadi basis lagi. Untuk menjawab pertanyaan ini memang idealnya LQ tidak dihitung hanya pada satu titik waktu pengamatan saja, melainkan selama rentang waktu (periode) tertentu. Dengan cara demikian akan diketahui mana sektor yang merupakan sektor basis yang sejati artinya bisa bertahan pada kurun waktu tertentu.
- Keempat, menyangkut pertanyaan mengapa yang dipilih untuk dijadikan sektor pemacu pertumbuhan ekonomi daerah adalah sektor yang LQ nya lebih besar dari

satu atau merupakan sektor basis. Pertanyaan itu timbul karena konsekuensi dari dipilihnya suatu sektor sebagai sektor basis dalam perencanaan pembangunan daerah adalah biasanya sektor itu akan diperlakukan istimewa misalnya mendapatkan alokasi anggaran yang besar. Bukankah ini suatu langkah yang keliru, sebab suatu sektor yang sudah maju tidak perlu campurtangan pemerintah yang terlalu besar.

Campurtangan pemerintah antara lain lewat alokasi anggaran yang besar justru dibutuhkan oleh sektor- sektor yang bukan sektor basis (atau yang LQ

nya lebih kecil dari satu). Terhadap pertanyaan ini dapat dikemukakan jawaban bahwa secara tersembunyi atau implisit, asumsi lain yang melandasi teknik analisis LQ adalah bahwa filosofi pembangunan yang dianut adalah *Trickle Down Effect* artinya untuk efisiensi pemerintah daerah akan mengalokasikan dananya pada sektor yang kuat dengan harapan sektor yang kuat itu akan menularkan pertumbuhannya pada sektor yang kurang kuat. Kalau pemerintah daerah kurang yakin bahwa filosofi tersebut berjalan maka memang sektor-sektor non basis lah yang harus lebih diutamakan.

- Kelima, menyangkut masih terlalu globalnya hasil dari analisis menggunakan teknik LQ. Misalnya sudah ditemukan bahwa sektor basis di suatu daerah adalah sektor pertanian. Lalu timbul pertanyaan sub ,sektor apa atau pada komoditi apa. Oleh karena itu para ahli ekonomi regional sepakat bahwa teknik analisis LQ hanya teknik analisis awal. Ia harus dilengkapi dengan alat analisis lain yang bisa lebih mendetailkan analisis, misalnya dengan analisis deskriptif kualitatif yang tajam.
- Keenam menyangkut hal-hal kualitatif yang tidak tercermin dalam alat analisis kuantitatif seperti LQ. Atau dengan kata lain perlu dijelaskan lebih detail hal-hal di balik angka LQ yang telah dihitung. Misalnya saja apa faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi yang membuat suatu sektor menjadi sektor basis di suatu daerah. Sehingga disini dibutuhkan alat analisis deskriptif kualitatif . jadi misalnya bila ditemukan sektor basis Kota Semarang adalah sektor perdagangan maka bisa ditelusur dari aspek historis mengapa demikian. Jawabannya antara lain karena sejak dulu Kota Semarang memang merupakan Kota pusat perdagangan sehingga secara historis kultural memang sektor perdagangan layak menjadi sektor basis Kota Semarang.

## **2.5. Analytical Hierarchy Process (AHP).**

### **2.5.1. Konsep Dasar AHP.**

Metode Analytical Hierrchy Process (AHP) dikembangkan oleh Prof. Thomas Lorie Saaty dari Wharton Business School di awal tahun 1970, yang digunakan untuk mencari rangking atau urutan prioritas dari berbagai alternatif

dalam pemecahan suatu permasalahan. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang senantiasa dihadapkan untuk melakukan pilihan dari berbagai alternatif. Disini diperlukan penentuan prioritas dan uji konsistensi terhadap pilihan-pilihan yang telah dilakukan. Dalam situasi yang kompleks, pengambilan keputusan tidak dipengaruhi oleh satu faktor saja melainkan multifaktor dan mencakup berbagai jenjang maupun kepentingan.

Metode ini didesain untuk menangkap persepsi orang yang ahli dibidangnya dengan permasalahan tertentu melalui prosedur yang didesain untuk sampai pada tingkat preferensi diantara berbagai set alternatif, sehingga metode ini dianggap sebagai model objective – multikriteria (Azis,1994).

Pada dasarnya AHP adalah metode yang memecah suatu masalah yang kompleks dan tidak terstruktur ke dalam kelompok-kelompoknya, mengatur kelompok-kelompok tersebut ke dalam suatu heirarki, memasukkan nilai numerik sebagai pengganti persepsi manusia dalam melakukan perbandingan relatif dan akhirnya dengan suatu sintesa ditentukan elemen mana yang mempunyai prioritas tertinggi. Prinsip AHP adalah memberikan bobot tiap faktor, variabel, dan indikator dengan perbandingan antar faktor, variabel, indikator satu sama lainnya. Bobot yang lebih besar dari suatu indikator, menunjukkan indikator yang lebih penting dibandingkan indikator lainnya dalam menentukan strategi kebijakan perekonomian pada suatu daerah.

Analytical Hierarchy Process (AHP) dapat menyederhanakan masalah yang kompleks dan tidak terstruktur, strategik dan dinamik menjadi bagiannya, serta menjadikan variabel dalam suatu hirarki (tingkatan). Masalah yang kompleks dapat diartikan bahwa kriteria dari suatu masalah yang begitu banyak (multikriteria), struktur masalah yang belum jelas, ketidakpastian pendapat dari pengambil keputusan, pengambil keputusan lebih dari satu orang, serta ketidakakuratan data yang tersedia.

Metode ini membantu memecahkan persoalan yang kompleks dengan menstruktur suatu hirarki kriteria, pihak yang berkepentingan, hasil dan dengan menarik berbagai pertimbangan guna mengembangkan bobot atau prioritas. Metode ini juga menggabungkan kekuatan dari perasaan dan logika yang bersangkutan pada

berbagai persoalan, lalu mensintesis berbagai pertimbangan yang beragam menjadi hasil yang cocok dengan perkiraan kita secara intuitif sebagaimana yang dipresentasikan pada pertimbangan yang telah dibuat. Selain itu AHP juga memiliki perhatian khusus tentang penyimpangan dari konsistensi, pengukuran dan ketergantungan di dalam dan di luar kelompok elemen strukturnya.

AHP mentoleransi tingkat konsistensi sebesar kurang dari 10%, apabila lebih dari 10% maka responden dianggap tidak konsisten dalam menjawab pertanyaan dan diperbolehkan melakukan perbaikan atas penilaian yang diberikan

Konsistensi dalam hal ini diartikan sebagai intensitas hubungan antar elemen yang didasarkan pada kriteria tertentu, saling membenarkan secara logis. Pengujian konsistensi dilakukan sebagai cara untuk melihat konsistensi jawaban penilaian pasangan terhadap perbandingan maupun struktur hierarki permasalahan. Hal tersebut dikarenakan pada kenyataannya menunjukkan bahwa sangat tidak mungkin untuk memperoleh jawaban responden yang absolut konsisten

Pengolahan data dilakukan dengan mentabulasikan hasil wawancara penelitian dalam bentuk tabel untuk kemudian dihitung nilai geometrianya (*geometric mean*), yaitu nilai sentral yang dianggap mewakili nilai seluruh data yang diperoleh dari nilai kualifikasi persepsi dikalikan satu dengan lainnya dan dicari pangkat dari jumlah responden.

### **2.5.2. Karakteristik Umum Model AHP**

The Analytic Hierarchy Process, yang selanjutnya disebut AHP, adalah salah satu bentuk model pengambilan keputusan yang pada dasarnya berusaha menutupi semua kekurangan dari model-model sebelumnya. Peralatan utama model ini adalah sebuah hirarki fungsional dengan input utamanya persepsi manusia. Dengan hirarki, suatu masalah yang kompleks dan tidak terstruktur dipecah ke dalam kelompok-kelompoknya dan kemudian kelompok-kelompok tersebut diatur menjadi sebuah bentuk hirarki.

Perbedaan mencolok antara model AHP dengan model pengambilan keputusan lainnya terletak pada jenis inputnya. Model-model yang sudah ada umumnya memakai input yang kuantitatif atau berasal dari data sekunder. Otomatis,

model tersebut hanya dapat mengolah hal-hal kuantitatif pula. Model AHP memakai persepsi manusia yang dianggap 'ekspert' sebagai input utamanya. Kriteria 'ekspert' di sini bukan berarti bahwa orang tersebut haruslah jenius, pintar, bergelar doctor dan sebagainya tetapi lebih mengacu pada orang yang mengerti benar permasalahan yang diajukan, merasakan akibat suatu masalah atau punya kepentingan terhadap masalah tersebut.

Karena menggunakan input yang kualitatif (persepsi manusia) maka model ini dapat mengolah juga hal-hal kualitatif disamping hal-hal yang kuantitatif. Pengukuran hal-hal kualitatif, seperti telah dijelaskan di atas, menjadi hal yang sangat penting mengingat makin kompleksnya permasalahan di dunia dan tingkat ketidakpastian yang makin tinggi. Sebagai contoh, pengukuran kerugian akibat polusi tidak sepenuhnya dapat dihitung secara kuantitatif karena ada hal-hal yang masih sulit diukur. Apabila hal-hal tersebut diabaikan, ada kemungkinan terjadi kesalahan besar dalam pengukuran dampak polusi meskipun mungkin juga tingkat kesalahannya tidak terlalu besar.

Dengan model AHP, pengukuran kerugian akibat polusi tersebut dilakukan secara menyeluruh lewat persepsi seseorang yang mengerti benar permasalahan tersebut. Dalam penilaiannya, orang tersebut akan memperhitungkan juga hal-hal yang tidak bias diukur tadi disamping hal-hal yang bisa diukur. Jadi bisa dikatakan bahwa model AHP adalah suatu model pengambilan keputusan yang komprehensif, memperhitungkan hal-hal kuantitatif dan kualitatif sekaligus.

Kelebihan lain model AHP dibandingkan model pengambilan keputusan lainnya terletak pada kemampuan memecahkan masalah yang multiobjectives dan multicriterias. Kebanyakan model yang sudah ada memakai single objective dengan multicriteria. Model Linear Programming, misalnya, memakai satu tujuan dengan banyak kendala (kriteria). Kelebihan model AHP ini lebih disebabkan oleh fleksibilitasnya yang tinggi terutama dalam pembuatan hirarkinya. Sifat fleksibel tersebut membuat model AHP dapat menangkap beberapa tujuan dan beberapa kriteria sekaligus dalam sebuah model atau sebuah hirarki. Bahkan model tersebut bisa juga memecahkan masalah yang mempunyai tujuan-tujuan yang saling berlawanan, kriteria-kriteria yang saling berlawanan dan tujuan serta kriteria yang

saling berlawanan dalam sebuah model. Karenanya, keputusan yang dilahirkan dari model AHP tersebut sudah akan memperhitungkan berbagai tujuan dan berbagai kriteria yang berbeda-beda atau bahkan saling bertentangan satu sama lain. Dengan kondisi tersebut,, maka model AHP dapat pulaa dipergunakan secara fleksibel dalam artian mempunyai bentuk hirarki yang fleksibel. Masalah-masalah seperti konflik, perencanaan, proyeksi, alokasi sumber daya adalah beberapa dari banyak masalah yang dapat diselesaikan dengan baik oleh model AHP.

Di samping kelebihan-kelebihan yang dimilikinya, model AHP tidak luput dari beberapa kelemahan yang dapat berakibat fatal. Ketergantungan model ini pada input berupa persepsi seorang ekspert akan membuat hasil alhir dari model ini menjadi tidak ada artinya apabila si ekspert memberikan penilaian yang keliru. Kondisi ini ditambah dengan belum adanya kriteria yang jelas untuk seorang ekspert, membuat orang sering ragu-ragu dalam menanggapi solusi yang dihasilkan model ini. Kebanyakan orang akan bertanya apakah persepsi dari seseorang ekspert itu dapat mewakili kepentingan orang banyak atau tidak dan apakah si responden tersebut pantas dianggap ekspert atau tidak.

Keragu-raguan seperti ini tidak lain diakibatkan oleh kenyataan bahwa setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda dengan orang lain. Karenanya untuk membuat model AHP ini diterima masyarakat perlu diberikan kriteria dan batasan tegas dari seorang ekspert serta meyakinkan masyarakat untuk menganggap bahwa persepsi si ekspert itu dapat mewakili pendapat masyarakat, paling tidak sebagian besar masyarakat.

Kelemahan lain, yang sebenarnya bisa disebut kelebihan, dari model AHP terletak pada bentuknya sendiri yang terlihat sangat sederhana. Bagi para pengambil keputusan yang terbiasa dengan model-model kuantitatif yang rumit akan menganggap bahwa bentuk model AHP yang terlihat sederhana bukanlah model yang cocok untuk pengambilan keputusan. Pendapat mereka, semakin rumit suatu model dan semakin banyak perhitungan yang dilakukan, makin tinggi keakuratan model tersebut tanpa mereka sadari bahwa model yang rumit tadi belum menyinggung hal-hal yang kualitatif. Berdasarkan kelemahan ini sebenarnya model AHP juga menunjukkan kelebihanannya. Untuk para pengambil keputusan tingkat

tinggi yang biasanya adalah orang-orang sibuk, model AHP dapat dengan cepat dimengerti dan apabila mereka ingin melakukan simulasi adanya perubahan pada salah satu elemen, maka dengan mudah dapat dilakukan analisa sensitivitas.

Satu keunggulan lagi dari model AHP, apabila dikaitkan dengan kepentingan politik suatu negara, adalah sifatnya yang demokratis. Dalam proses perencanaan pembangunan, seringkali masyarakat merasa diabaikan perannya dan keinginannya sehingga semua rencana pembangunan yang disusun pemerintah tidak mengenai sasarannya secara penuh. Dengan menggunakan model AHP, masyarakat dimungkinkan turut serta dalam proses perencanaan pembangunan lewat proses pembuatan hirarki dan pengisian kuesioner bersama-sama aparat pemerintah. Melalui cara ini, diharapkan persepsi masyarakat dapat dimengerti pemerintah dan diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan. Sehingga pada akhirnya pembangunan tidak hanya bersifat top-down tetapi juga bottom-up.

### **2.5.3. Prinsip-Prinsip Dasar Analytical Hierarchy Process (AHP)**

Dalam menyelesaikan persoalan dengan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) memiliki beberapa prinsip dasar yang harus dipahami antara lain:

#### *1. Decomposition*

Pengertian decomposition adalah memecahkan atau membagi problema yang utuh menjadi unsur-unsurnya ke bentuk hirarki proses pengambilan keputusan, dimana setiap unsur atau elemen saling berhubungan. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, pemecahan dilakukan terhadap unsur-unsur sampai tidak mungkin dilakukan pemecahan lebih lanjut, sehingga didapatkan beberapa tingkatan dari persoalan yang hendak dipecahkan. Struktur hirarki keputusan tersebut dapat dikategorikan sebagai complete dan incomplete. Suatu hirarki keputusan disebut complete jika semua elemen pada suatu tingkat memiliki hubungan terhadap semua elemen yang ada pada tingkat berikutnya, sementara hirarki keputusan incomplete kebalikan dari hirarki yang complete yakni tidak semua unsur pada masing-masing jenjang mempunyai hubungan. Pada umumnya problem nyata mempunyai karakteristik struktur yang incomplete.

Bentuk-bentuk struktur dekomposisi adalah, tingkat pertama tujuan keputusan (Goal), tingkat kedua kriteria-kriteria, tingkat ketiga alternatif - alternatif. Hirarki permasalahan disusun untuk membantu proses pengambilan keputusan dengan memperhatikan seluruh elemen keputusan yang terlibat dalam sistem. Sebagian besar masalah menjadi sulit untuk diselesaikan karena proses pemecahannya dilakukan tanpa memandang masalah sebagai suatu sistem dengan suatu struktur tertentu.

## *2. Comparative Judgement*

Comparative Judgement dilakukan dengan penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkatan di atasnya. Penilaian ini merupakan inti dari AHP karena akan berpengaruh terhadap urutan prioritas dari elemen-elemennya. Hasil dari penilaian ini lebih mudah disajikan dalam bentuk matrix pair-wise comparisons yaitu matriks perbandingan berpasangan memuat tingkat preferensi beberapa alternatif untuk tiap kriteria. Skala preferensi yang digunakan yaitu skala 1 yang menunjukkan tingkat yang paling rendah (equal importance) sampai dengan skala 9 yang menunjukkan tingkatan yang paling tinggi (extreme importance).

## *3. Synthesis of Priority*

Synthesis of Priority dilakukan dengan menggunakan eigen vektor method untuk mendapatkan bobot relatif bagi unsur - unsur pengambilan keputusan.

## *4. Logical Consistency*

Logical Consistency merupakan karakteristik penting AHP. Hal ini dicapai dengan mengagresikan seluruh eigen vektor yang diperoleh dari berbagai tingkatan hirarki dan selanjutnya diperoleh suatu vektor composite tertimbang yang menghasilkan urutan pengambilan keputusan.

Model AHP didasarkan pada pair-wise comparison matrix, dimana elemen-elemen pada matriks tersebut merupakan judgement dari decision maker. Seorang decision maker akan memberikan penilaian, mempersepsikan, ataupun memperkirakan kemungkinan dari suatu hal/peristiwa yang dihadapi. Matriks tersebut terdapat pada setiap level of hierarchy dari suatu struktur model AHP yang membagi habis suatu persoalan.

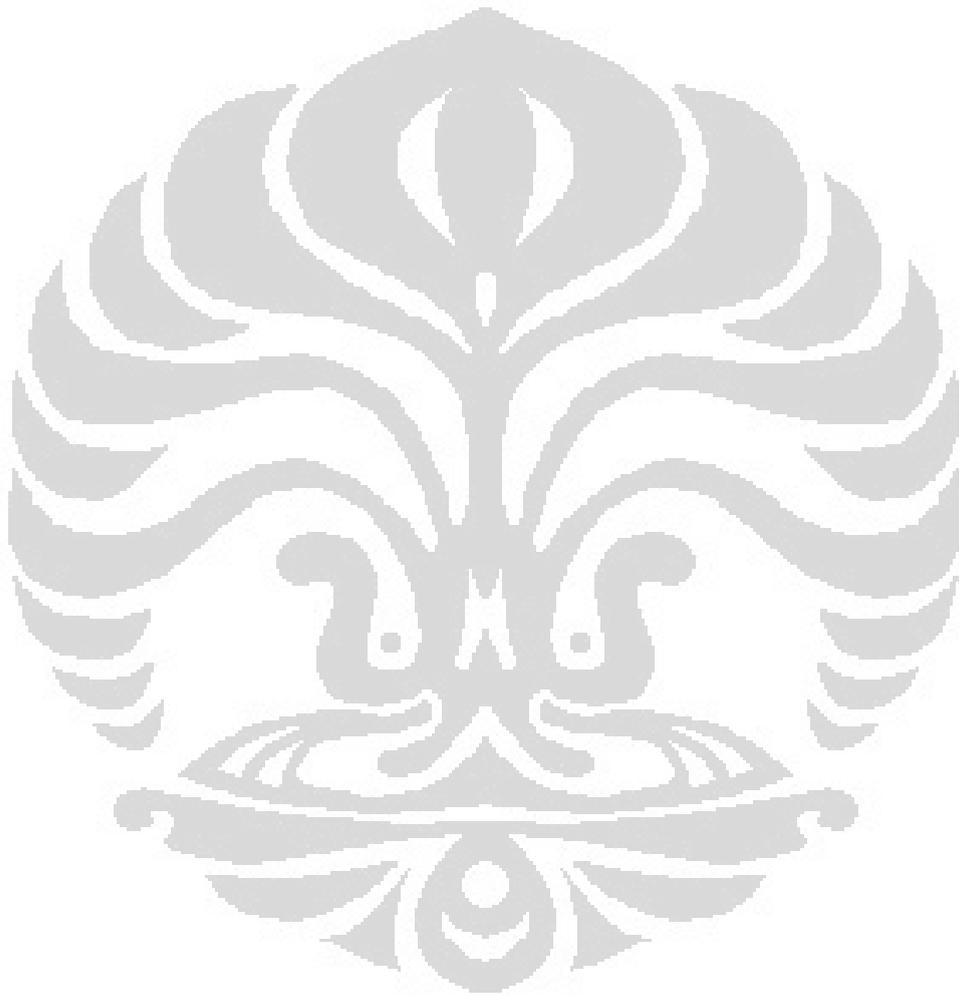
Analytic Hierarchy Process (AHP) mempunyai landasan aksiomatik yang terdiri dari :

1. *Resiprocal Comparison*, yang mengandung arti bahwa matriks perbandingan berpasangan yang terbentuk harus bersifat berkebalikan. Misalnya, jika A adalah  $k$  kali lebih penting dari pada B maka B adalah  $1/k$  kali lebih penting dari A.
2. *Homogeneity*, yaitu mengandung arti kesamaan dalam melakukan perbandingan. Misalnya, tidak dimungkinkan membandingkan jeruk dengan bola tenis dalam hal rasa, akan tetapi lebih relevan jika membandingkan dalam hal berat.
3. *Dependence*, yang berarti setiap level mempunyai kaitan (complete hierarchy) walaupun mungkin saja terjadi hubungan yang tidak sempurna (incomplete hierarchy).
4. *Expectation*, yang berarti menonjolkan penilaian yang bersifat ekspektasi dan preferensi dari pengambilan keputusan. Penilaian dapat merupakan data kuantitatif maupun yang bersifat kualitatif.

Secara umum pengambilan keputusan dengan metode AHP didasarkan pada langkah-langkah berikut:

1. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan.
2. Membuat struktur hirarki yang diawali dengan tujuan umum, dilanjutkan dengan hirarki aspek dan selanjutnya adalah kriteria pilihan yang ingin di ranking.
3. Membentuk matriks perbandingan berpasangan (pair-wise) yang menggambarkan kontribusi relatif atau pengaruh setiap hirarki terhadap masing-masing tujuan atau kriteria yang setingkat di atasnya. Perbandingan dilakukan berdasarkan pilihan atau judgement dari pembuat keputusan dengan menilai tingkat kepentingan suatu hirarki dibandingkan dengan hirarki lainnya.
4. Menormalkan data yaitu dengan membagi nilai dari setiap elemen di dalam matriks yang berpasangan dengan nilai total dari setiap kolom.
5. Menghitung nilai eigen vector dan menguji konsistensinya, jika tidak konsisten maka pengambilan data (preferensi) perlu diulangi. Nilai eigen vector yang dimaksud adalah nilai eigen vector maksimum yang diperoleh dengan menggunakan matlab maupun dengan cara manual.

6. Mengulangi langkah 3, 4 dan 5 untuk seluruh tingkat kriteria .
7. Menghitung eigen vector dari setiap matriks perbandingan berpasangan. Nilai eigen vector merupakan bobot dari setiap elemen. Langkah ini untuk mensintesis pilihan dalam penentuan prioritas elemen-elemen pada tingkat hirarki terendah sampai dengan pencapaian tujuan.
8. Menguji konsistensi hirarki, jika tidak memenuhi  $CR < 0,100$ , maka penilaian harus diulang kembali.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang ada di wilayah Kabupaten Muna berupa :

- Data sekunder yang meliputi data fasilitas-fasilitas (ekonomi, sosial, pemerintahan), jumlah penduduk, data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal (Bappeda dan PM ) Kabupaten Muna , Peraturan Daerah ( PERDA) Tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Muna, buku, buletin dan publikasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- Data primer berupa pendapat responden yang dilakukan melalui questionnaire dan wawancara dengan para stakeholder, antara lain pihak pemerintah Kabupaten Muna, DPRD sebagai mitra pemerintah, Bappeda, pihak LSM, Akademisi serta kalangan masyarakat.

#### **3.2. Metode Analisis Data.**

Penelitian ini menggunakan dua peralatan analisis, yaitu analisis kualitatif yang menggunakan data primer dari hasil penelitian lapangan dan analisis deskriptif dengan menggunakan data sekunder.

#### **3.3. Perumusan Model Persamaan .**

##### **3.3.1. Analisa Location Quotient (LQ)**

Analisa Location Quotient (LQ) yang dihitung dalam penelitian ini adalah analisis yang berdasarkan sektor PDRB yang menunjukkan nilai kegiatan produksi di suatu daerah. Pada dasarnya teknik analisa ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor di daerah yang diamati dalam hal ini Kabupaten Muna dengan kemampuan sektor yang sama di daerah yang lebih luas ( Propinsi Sulawesi Tenggara) yang diformulasikan dengan persamaan sebagai berikut :

$$LQ_r = \frac{(X_i^r / X^r)}{(X_i^n / X^n)} \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan :

- $LQ_r$  : Nilai Location Quotient Daerah  
 $X_i^r$  : Output sektor  $i$  daerah  $r$   
 $X^r$  : Output total daerah  $r$   
 $X_i^n$  : Output sektor  $i$  daerah  $n$  yang lebih tinggi tingkatannya.  
 $X^n$  : Output total daerah  $n$  yang lebih tinggi tingkatannya.

Dari persamaan ini dapat diketahui apakah sektor  $i$  merupakan sektor basis atau sektor non basis pada suatu daerah, dengan ketentuan jika :

$LQ > 1$  artinya sektor tersebut adalah sektor basis

$LQ < 1$  artinya sektor tersebut adalah sektor non basis

$LQ = 1$  artinya sektor tersebut adalah sektor swasembada / self sufficient.

### 3.3.2. Analisa Differential Shift (Sd)

Differential Shift (Sd) ini merupakan analisa yang melihat perubahan sektor tertentu pada suatu daerah yakni daerah Kabupaten Muna akibat dari pengaruh pertumbuhan masing-masing sektor di daerah tersebut dibandingkan dengan perubahan sektor pada daerah yang lebih tingkatannya yakni Propinsi Sulawesi Tenggara, dengan persamaan sebagai berikut :

$$Sd = ( X_{i0}^* ( ( X_{int} / X_{ino} ) - ( X_{nt} / X_{no} ) ) )$$

- Dimana :
- $t$  : Terminal period / periode akhir
  - $o$  : Periode awal
  - $X_r$  : PDRB Regional Kabupaten Muna
  - $X_n$  : PDRB Regional Propinsi Sulawesi Tenggara

Nilai Differential Shift (Sd) bisa positif, bisa juga negatif. Bila positif berarti menunjukkan bahwa keadaan struktur perekonomian di daerah bersangkutan sudah baik, dimana regional tumbuh dibawah rata-rata nasional atau daerah di atasnya

### **3.3.3. Analytical Hierarchy Process (AHP).**

#### **a. Penyusunan Hirarki Perioritas**

Untuk menganalisis strategi kebijakan dalam rangka pengembangan pembangunan wilayah, dirumuskan berdasarkan persepsi pelaku yang ahli dibidangnya. Hal ini dilakukan dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Responden yang dimaksud dalam penelitian AHP ini meliputi para stakeholder antara lain :

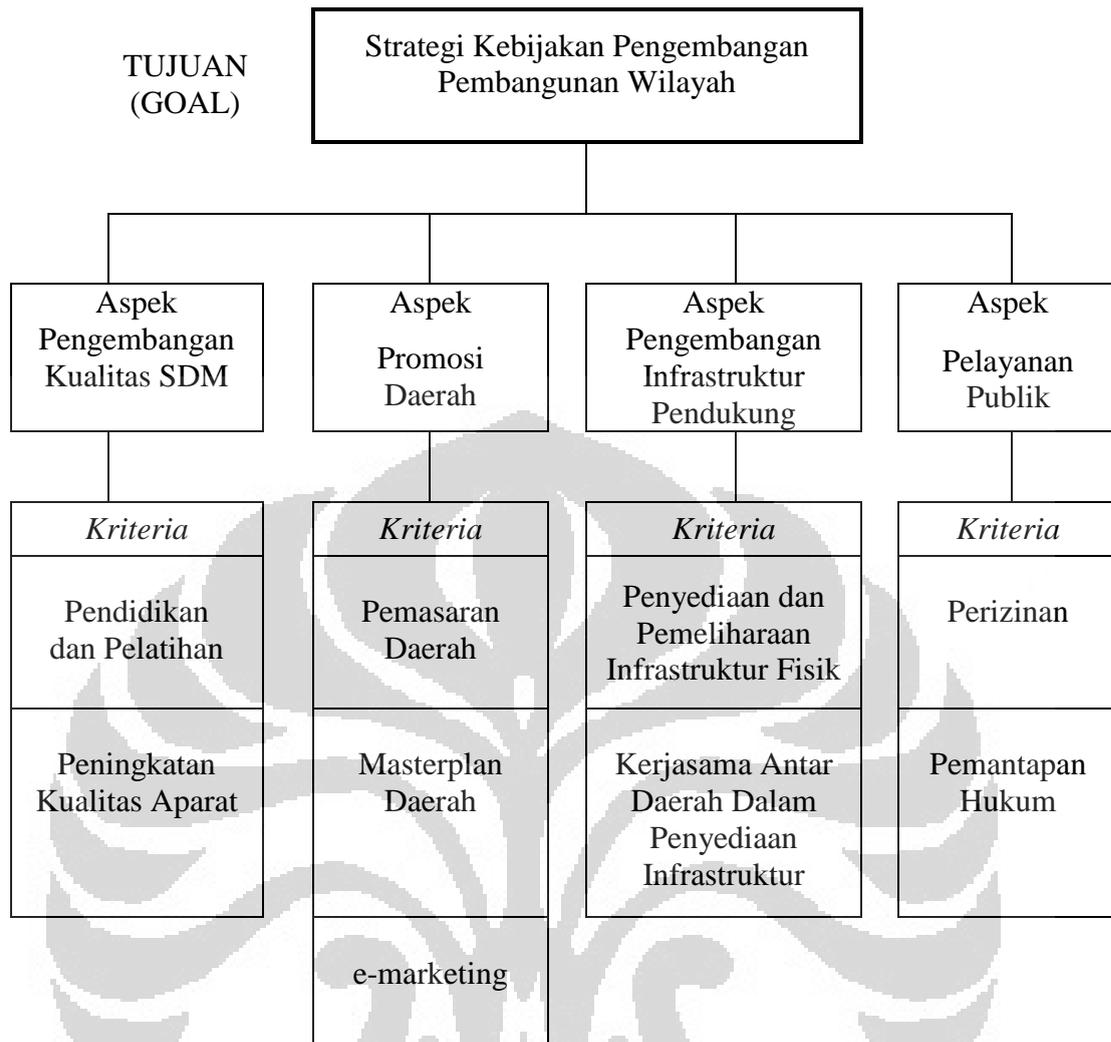
1. Tokoh birokrasi dalam hal ini mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Muna (Sekda). Responden ini dipilih dengan pertimbangan pengalaman beliau dalam menjabat sebagai birokrat dan mengepalai semua instansi dinas dan badan pemerintah di Kabupaten Muna.
2. Pihak yang mewakili wilayah kecamatan, dalam hal ini kepala wilayah kecamatan daratan dan kepala wilayah kecamatan kepulauan. Ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Muna terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan, sehingga keterwakilan dari kedua kepala wilayah ini dianggap relevan memberikan analisis mengenai kebijakan pengembangan pembangunan wilayah serta responden tersebut dianggap banyak memahami karakteristik masyarakat baik wilayah darat maupun wilayah kepulauan
3. DPRD sebagai mitra pemerintah, dengan pertimbangan bahwa responden ini dianggap banyak mengetahui tentang berbagai macam kebijakan terkait dengan regulasi, pengawasan dan anggaran sebagai tugas pokok mereka sebagai anggota DPRD.
4. Bappeda yang terdiri dari Kepala Bappeda dan Kepala Bidang Penyusunan Program. Responden ini dipilih dengan pertimbangan bahwa Bappeda merupakan suatu lembaga yang terkait dengan koordinasi berbagai macam litas sektoral, sehingga dianggap relevan untuk memberikan berbagai macam

analisis terkait dengan kebijakan pengembangan pembangunan wilayah di Kabupaten Muna.

5. Pihak LSM, dengan pertimbangan bahwa lembaga ini dianggap sebagai organisasi yang sering terlibat langsung dengan berbagai macam lapisan masyarakat dalam berbagai macam kegiatan.
6. Akademisi, dengan pertimbangan bahwa sebagai suatu lembaga yang menjalankan tridarma perguruan tinggi, sehingga berbagai macam bentuk penelitian yang selama ini telah dilakukan mampu disinergikan dengan kebijakan pengembanagan pembangunan wilayah terutama di Kabupaten Muna .
7. Kalangan masyarakat, yang diambil dari dua kelompok yakni perwakilan dari pihak perempuan dan dari pihak generasi muda dengan pertimbangan bahwa responden tersebut diharapkan mampu melihat sisi lain berbagai macam aspek dan kriteria terhadap pengembangan pembangunan wilayah.

Analytical Hierarchy Process atau yang lebih sering disebut dengan AHP ini merupakan suatu metode pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara memecah suatu masalah yang kompleks dan tidak terstruktur ke dalam kelompok-kelompok dan mengaturnya ke dalam suatu hirarki.

Berikut ini adalah penyusunan hirarki penelitian dalam AHP, dimana Aspek dan kriteria dalam hirarki ini dilakukan dengan merumuskan berbagai macam strategi dan kebijakan yang terkait dengan pengembangan pembangunan wilayah di Kabupaten Muna.



Gambar 3.1 Hirarki Strategi Kebijakan Pengembangan Pembangunan Wilayah.

Sumber : Kuesioner Responden 2011

Hirarki pada gambar 3.1 tersebut memiliki beberapa tingkatan hirarki dengan batasan pengertian sebagai berikut :

Tingkat pertama : yaitu hirarki yang menjelaskan mengenai tujuan utama atau yang disebut dengan goal adalah hirarki yang merupakan tujuan utama dari kebijakan pengembangan pembangunan wilayah di Kabupaten Muna.

Tingkat kedua : yaitu hirarki yang menjelaskan mengenai beberapa aspek dan kriteria terkait dengan strategi kebijakan pengembangan pembangunan wilayah, yang terdiri dari empat aspek yaitu :

## 1. Aspek pengembangan kualitas sumber daya manusia

Pengembangan kualitas sumber daya manusia dimaksud adalah pengembangan dari sebuah manajemen terkait dengan sumber daya manusia itu sendiri, dengan tujuan untuk menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer dan tenaga kerja lainnya sehingga dapat menunjang aktifitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Sumber daya manusia merupakan komponen terpenting dalam instansi / organisasi. Penggunaan mesin-mesin berteknologi tinggi tidak bermakna tanpa SDM, sehingga hal ini menjadi prioritas utama yang perlu diperhatikan. Sumber daya manusia yang berkualitas akan mengelola instansi dengan baik pula. Pengelolaan di sini adalah pengelolaan disemua bidang pekerjaan, termasuk pelayanan dan perencanaan. Cara meningkatkan dan mengembangkan SDM dengan pendidikan/ pelatihan, baik melalui on the job training maupun off the job training.

Aspek pengembangan sumber daya manusia ini terdiri dari dua kriteria, yaitu :

### 1.a. Kriteria pendidikan dan pelatihan.

Pendidikan dan pelatihan adalah merupakan upaya untuk pengembangan sumber daya manusia, terutama untuk pengembangan aspek kemampuan intelektual dan kepribadian manusia. Pendidikan dan pelatihan tidak saja menambah pengetahuan, akan tetapi juga meningkatkan keterampilan bekerja, dengan demikian meningkatkan produktivitas kerja. Yang membedakan pengertian pendidikan dan pelatihan antara lain, pendidikan di dalam suatu organisasi adalah suatu proses pengembangan kemampuan kearah yang diinginkan oleh organisasi yang bersangkutan, sedang pelatihan merupakan bagian dari suatu proses pendidikan, yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan khusus seseorang atau kelompok orang.

Pendidikan pada umumnya berkaitan dengan mempersiapkan calon tenaga yang diperlukan oleh suatu instansi atau organisasi, sedangkan pelatihan lebih berkaitan dengan peningkatan atau keterampilan pegawai yang sudah menduduki suatu pekerjaan atau tugas tertentu. Dalam suatu pelatihan orientasi atau

penekanannya pada tugas yang harus dilaksanakan (job orientation), sedangkan pendidikan lebih pada pengembangan kemampuan umum.

#### 1.b. Kriteria peningkatan kualitas aparat

Peningkatan kualitas aparat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan lembaga dan tata kerja aparat yang diarahkan pada penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang semakin efektif dan efisien. Peningkatan kualitas aparat ditandai dengan respon aparat terhadap perkembangan aspirasi masyarakat dan melakukan upaya untuk meningkatkan keterpaduan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat tersebut.

Peningkatan produktivitas kerja aparat ditujukan agar mampu menjadi aparat yang profesional dalam melaksanakan tugas, serta menjadi aparat yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa serta berinisiatif dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah dengan didasari semangat dan sikap pengabdian yang tinggi terhadap masyarakat.

Peningkatan kualitas aparat tidak dapat dipisahkan dengan peningkatan prestasi dari perilaku individu yang berada dalam organisasi pemerintahan atau organisasi yang besar seperti negara yang merupakan sesuatu yang sangat penting. Dikatakan demikian, karena proses perilaku tertentu dari setiap individu akan memberikan pengaruh bagi eksistensi dari suatu organisasi.

Perilaku aparat akan sangat menentukan kualitas sebuah organisasi dalam memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat. Oleh karena itu sangat diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas perilaku aparat agar mempunyai kemampuan mengayomi dan melayani masyarakatnya, sehingga dapat diharapkan menumbuhkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat.

#### 2. Aspek promosi daerah

Promosi adalah kegiatan memberitahukan produk atau jasa yang hendak ditawarkan kepada calon konsumen / wisatawan yang dijadikan target pasar.

Kegiatan promosi idealnya dilakukan secara berkesinambungan melalui beberapa media yang dianggap efektif dapat menjangkau pasar, baik cetak maupun elektronik, namun pemilihannya sangat tergantung pada target pasar yang hendak dituju. Adapun beberapa penjelasan tentang arti promosi adalah :

- Promosi adalah setiap upaya marketing yang fungsinya untuk memberikan informasi atau meyakinkan para konsumen yang potensial mengenai kegunaan suatu produk atau jasa dengan tujuan untuk mendorong konsumen baik melanjutkan atau memulai pembelian pada harga tertentu.
- Promosi adalah pencarian peluang usaha dan organisasi dana, harta kekayaan, dan kemampuan manajemen untuk terjun kedalam usaha dengan tujuan untuk mencari laba.

Promosi adalah suatu kegiatan intensif dalam waktu yang relatif singkat. Dalam kegiatan promosi itu diadakan usaha untuk memperbesar daya tarik produk terhadap calon konsumen. Untuk mengadakan promosi yang tepat harus disadari bahwa yang sering didistribusikan ke pasar itu bukan barang jadi, akan tetapi hanya komponen-komponennya saja, seperti hotel, atraksi dan angkutannya.

Dalam hirarki pada gambar 3.1 di atas, aspek promosi daerah ini terbagi dalam tiga kriteria kebijakan yang menjadi prioritas dalam rangka pengembangan pembangunan wilayah, yaitu :

#### 2.a. Kriteria pemasaran daerah.

Secara umum mengartikan pemasaran daerah sebagai perencanaan dan perancangan suatu daerah agar mampu memenuhi dan memuaskan keinginan dan harapan pasar targetnya.

Pasar target ini meliputi tiga pihak, yaitu: (1) penduduk dan masyarakat daerah tersebut, (2) turis, pengusaha, investor dari dalam dan luar daerah, dan (3) pengembang dan event organisers serta pihak-pihak lainnya yang membantu meningkatkan daya saing daerah tersebut.

Pemasaran daerah dapat dilihat sebagai (1) salah satu macam eksploitasi produk wilayah yang berorientasi pasar oleh pihak pemerintah atau penguasa wilayah ; (2) adopsi (oleh perencana keruangan daerah) masukan/kebutuhan

pemakai yakni penduduk, pengusaha, wisatawan, dan pengunjung lainnya ; dan (3) seperangkat kegiatan yang bertujuan untuk mengoptimalkan penyediaan fungsi kehidupan daerah, pekerjaan dan rekreasi oleh pihak pemerintah serta kebutuhan terhadap hal tersebut oleh penduduk, perusahaan, wisatawan, dan sebagainya .

#### 2.b. Kriteria masterplan daerah.

Master plan dalam bahasa Indonesia orang menyebutnya rencana induk. Dokumen ini memang bisa saja hanya berbentuk selebar kertas lebar (plotter) atau tersimpan dalam sebuah file komputer yang tak terlalu makan banyak memori. Tapi proses di balik pembuatan dokumen ini bisa menyita waktu sehari-hari bahkan beberapa minggu hingga bulan.

Disebut rencana induk karena isinya memang tentang perencanaan yang menyeluruh (komprehensif) dan terpadu (integratif). Masterplan sebagai comprehensive plan, yakni sebuah rencana maha lengkap menyangkut rancangan pemanfaatan sebuah lahan yang cukup luas, bisa dalam hitungan ribuan meter persegi, hingga puluhan dan ratusan hektar.

Master plan dalam konteks tertentu, dapat bicara tentang rencana pembangunan atau pengembangan sebuah wilayah tempat tinggal komunitas, baik kota maupun pedesaan dengan segala aspeknya. Seperti rencana pemukiman, jalan raya, jaringan rel kereta api, sarana pendidikan, hiburan dan rekreasi, sarana bisnis dan perekonomian, kelistrikan, instalasi air atau pun gas, ruang terbuka hijau serta berbagai fasilitas umum maupun fasilitas sosial.

Isi sebuah master plan sebagian besarnya memang berupa gambar tampak atas dari wilayah tertentu. Angka-angka dan keterangan di belakangnya disebut legenda. Mirip dengan sebuah peta juga tetapi lebih detail. Master plan atau rencana induk berfungsi sebagai pemandu langkah mewujudkan pembangunan suatu wilayah. Melekat dalam fungsi itu ialah kegunaan master plan sebagai acuan untuk memonitor dan mengevaluasi tahapan-tahapan pembangunan yang telah ditempuh.

#### 2.c. Kriteria e-marketing

E-marketing merupakan optimisasi aktivitas bisnis perusahaan secara terus menerus melalui teknologi digital. Penggunaan teknologi informasi dalam proses

membuat, berkomunikasi, dan memberikan nilai (value) kepada pelanggan. E-marketing mempengaruhi pemasaran tradisional dalam dua cara. *Pertama*, e-marketing meningkatkan efisiensi dalam fungsi pemasaran tradisional ; *Kedua*, teknologi dari e-marketing merubah banyak strategi pemasaran. Hasil perubahan dalam model bisnis baru ini dapat menambah nilai (value) pelanggan dan meningkatkan keuntungan perusahaan.

E-marketing menggambarkan usaha-usaha perusahaan untuk menginformasikan, berkomunikasi, mempromosikan, dan memasarkan produk dan jasanya lewat internet. Seluruh aktivitas yang online atau berbasis elektronik yang memfasilitasi proses manufaktur barang dan jasa oleh produsen untuk memuaskan pelanggan. *Electronic marketing* memanfaatkan teknologi jaringan untuk mengkoordinasi penelitian pangsa pasar, membantu pengembangan produk, mengembangkan strategi dan taktik untuk memikat pelanggan, menyediakan distribusi online, mempertahankan catatan pelanggan, menciptakan kepuasan pelanggan, dan mengumpulkan umpan balik pelanggan

### 3. Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung

*Infrastruktur* mengacu pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, air, bangunan, dan fasilitas publik lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial. Infrastruktur adalah elemen dasar dari suatu kota, bangunan utama dari suatu kegiatan dan bangunan penunjang kegiatan.

Infrastruktur (prasarana) adalah sebagai bangunan atau fasilitas fisik yang dikembangkan untuk mendukung pencapaian tujuan sosial dan ekonomi suatu masyarakat atau komunitas. Termasuk dalam pengertian infrastruktur adalah fasilitas transportasi, bangunan institusional dan komersial, bangunan irigasi, drainase dan pengendali banjir, fasilitas air bersih dan air kotor, fasilitas penanganan limbah padat, pembangkit energi dan distribusinya, fasilitas telekomunikasi, fasilitas olah raga dan rekreasi, serta infrastruktur kawasan permukiman.

Terdapat enam kategori besar infrastruktur :

- 1) Kelompok jalan (jalan, jalan raya, jembatan);
- 2) Kelompok pelayanan transportasi (transit, jalan rel, pelabuhan, bandar udara);
- 3) Kelompok air (air bersih, air kotor, semua sistem air, termasuk jalan air);

- 4) Kelompok manajemen limbah (sistem manajemen limbah padat);
- 5) Kelompok bangunan dan fasilitas olahraga luar;
- 6) Kelompok produksi dan distribusi energi (listrik dan gas);

*Sistem infrastruktur* merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat .

Definisi teknik juga memberikan spesifikasi apa yang dilakukan *sistem infrastruktur* dan mengatakan bahwa infrastruktur adalah aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga memberikan pelayanan publik yang penting .

Aspek pengembangan infrastruktur pendukung ini dibagi kedalam dua kriteria prioritas, yaitu kriteria penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur fisik dan kriteria ketrjasama aatar daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur

#### 4. Aspek Pelayanan Publik

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Pelayanan publik (*public services*) oleh birokrasi publik adalah merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara. Pelayanan publik (*public services*) oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (*warga negara*) dari suatu negara kesejahteraan (*welfare state*). Sementara itu, kondisi masyarakat saat ini telah terjadi suatu perkembangan yang sangat dinamis, tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik, merupakan indikasi dari *empowering* yang dialami oleh masyarakat .

Pelayanan publik yang profesional, artinya pelayanan publik yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan tanggung jawab dari pemberi layanan (aparatur pemerintah). Dengan ciri sebagai berikut : (1). Efektif, lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi tujuan dan sasaran; (2). Sederhana, mengandung arti

prosedur/ tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat dan tidak berbelit-belit ; (3). Ketepatan waktu, kriteria ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah diselesaikan ; (4). Responsif, lebih mengandung arti daya tanggap dan cepat dalam menghadapi apa yang menjadi masalah, kebutuhan aspirasi masyarakat yang akan dilayani ; (5). Adaptif, cepat menyesuaikan terhadap apa yang menjadi tuntutan, keinginan dan aspirasi masyarakat yang dilayani yang senantiasa mengalami tumbuh kembang.

Dalam konteks pelayanan ini dapat saya ambil sebuah kajian bahwa seorang pegawai diharapkan dapat memberikan sebuah pelayanan yang professional dalam artian memberikan pelayanan yang sederhana artinya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat harus lah cepat, tepat dan tidak banyak aturan, dan yang lebih penting adalah tepat waktu dan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Pada hirarki aspek pelayanan publik ini memiliki dua kriteria prioritas kebijakan dalam upaya pengembangan pembangunan wilayah, yaitu :

#### 4.a. Kriteria perizinan

Izin adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari suatu larangan oleh undang-undang yang kemudian larangan tersebut diikuti dengan perincian dari pada syarat-syarat, kriteria dan lainnya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut disertai dengan penetapan prosedur dan juklak (petunjuk pelaksanaan) kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan.

#### 4.b. Kriteria pementapan hukum

Hukum adalah semua aturan yang menyangkut kesusilaan dan ditujukan terhadap tingkah laku manusia dalam masyarakat serta sebagai pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya. Hukum pada dasarnya adalah (1) peraturan tingkah laku manusia, (2) yang diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, (3) yang bersifat memaksa, harus dipatuhi, (4) dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar peraturan tersebut (sanksi itu pasti dan dapat dirasakan nyata bagi yang bersangkutan).

Hukum berfungsi untuk, (1) menjadi alat ketertiban dan keteraturan masyarakat, (2) menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin, (3) menjadi alat penggerak pembangunan karena mempunyai daya mengikat dan memaksa sehingga dapat dipakai sebagai alat otoritas untuk mengarahkan masyarakat menjadi lebih baik, (4) menjadi alat kritik, bukan hanya untuk mengawasi masyarakat namun juga mengawasi pemerintah, para penegak hukum, dan aparatur pengawasan itu sendiri.

Selanjutnya hasil yang akan diperoleh dari pembobotan hirarki tersebut akan menunjukkan peringkat faktor mana yang paling berpengaruh terhadap pengembangan pembangunan wilayah.

Cara menentukan susunan prioritas elemen pada AHP dilakukan dengan menyusun perbandingan berpasangan yaitu membandingkan dalam bentuk berpasangan seluruh elemen untuk setiap sub hirarki, seperti pada tabel 3.1. Perbandingan tersebut ditransformasikan dalam bentuk matriks. Contoh, terdapat  $n$  objek yang dinotasikan dengan  $(A_1, A_2, A_n)$  yang akan dinilai berdasarkan pada nilai tingkat kepentingannya antara lain  $A_i$  dan  $A_j$  yang dipresentasikan dalam matriks *Pair-wise Comparison*.

Tabel .3.1 Contoh Formula Matriks Pair-wise Comparison.

|          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|
|          | $A_1$    | $A_2$    | ...      | $A_n$    |
| $A_1$    | $a_{11}$ | $a_{12}$ | ...      | $a_{1n}$ |
| $A_2$    | $a_{21}$ | $a_{22}$ | ...      | $a_{2n}$ |
| $\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ | $\ddots$ | $\vdots$ |
| $A_n$    | $a_{n1}$ | $a_{n2}$ | ...      | $a_{nn}$ |

Sumber : Bambang Permadi S (1992), *Analytical Hierarchy Process*.

Nilai  $a_{11}$  adalah nilai perbandingan elemenn  $A_1$  ( baris) terhadap  $A_1$  (kolom) yang menyatakan hubungan :

- a) Seberapa jauh tingkat kepentingan A<sub>1</sub> (baris) terhadap kriteria C dibandingkan dengan A<sub>1</sub> (kolom) atau
- b) Seberapa jauh dominasi A<sub>1</sub> (baris) terhadap A<sub>1</sub> (kolom) atau
- c) Seberapa banyak sifat kriteria C terdapat pada A<sub>1</sub> (baris) dibandingkan dengan A<sub>1</sub> (kolom).

Nilai numerik yang dikenakan untuk seluruh perbandingan tersebut diperoleh dari skala perbandingan 1 sampai 9. Tabel tersebut telah ditetapkan oleh Saaty, seperti pada tabel 3.2 berikut ini :

Tabel. 3.2 Skala Perbandingan Saaty

| <b>Intensitas Pentingnya</b> | <b>Definisi</b>   | <b>Penjelasan</b>  |
|------------------------------|---|--|
| 1                            | <i>Equal Importance</i><br>(Sama penting)                             | Kedua elemen mempunyai pengaruh yang sama  |
| 3                            | <i>Weak Importance of one over another</i><br>(Sedikit lebih penting) | Pengalaman dan penilaian sangat memihak satu elemen dibandingkan dengan pasangannya  |
| 5                            | <i>Essential or strong importance</i><br>(lebih penting)              | Satu elemen sangat disukai dan secara praktis dominasinya sangat nyata, dibandingkan dengan elemen pasangannya                               |
| 7                            | <i>Demonstrated importance</i><br>(sangat penting)                    | Satu elemen terbukti sangat disukai dan secara praktis dominasinya sangat, dibandingkan dengan elemen pasangannya                            |
| 9                            | <i>Extreme importance</i><br>(mutlak lebih penting)                   | Satu elemen mutlak lebih disukai dibandingkan dengan pasangannya, pada tingkat keyakinan tertinggi   |
| 2,4,6,8                      | <i>Intermediate values between the two adjacent judgments</i>         | Nilai diantara dua pilihan yang berdekatan   |
| Resiprokal                   | Jika $A/B=9$ maka $B/A=1/9$   | Jika elemen $i$ memiliki salah satu angka diatas ketika dibandingkan elemen $j$ , maka $j$ memiliki kebalikannya ketika dibanding elemen $i$ |

Sumber : Thomas L Saaty ( 1980), The Analytic Hierarchy Process.

b. Uji Konsistensi Indeks dan Rasio

Salah satu yang membedakannya model AHP dengan model-model pengambilan keputusan yang lainnya adalah tidak adanya syarat konsistensi mutlak. Pengumpulan pendapat antara satu faktor dengan yang lain adalah bebas satu sama lain dan hal ini dapat mengarah pada ketidakkonsistenan jawaban yang diberikan responden. Namun, terlalu banyak ketidak konsistenan juga tidak diinginkan. Pengulangan wawancara pada sejumlah responden yang sama kadang diperlukan apabila derajat tidak konsistensinya besar.

AHP mentoleransi tingkat konsistensi sebesar kurang dari 10%, apabila lebih dari 10% maka responden dianggap tidak konsisten dalam menjawab pertanyaan dan diperbolehkan melakukan perbaikan atas penilaian yang diberikan. Konsistensi dalam hal ini diartikan sebagai intensitas hubungan antar elemen yang didasarkan pada kriteria tertentu, saling membenarkan secara logis. Pengujian konsistensi dilakukan sebagai cara untuk melihat konsistensi jawaban penilaian pasangan terhadap perbandingan maupun struktur hierarki permasalahan. Hal tersebut dikarenakan pada kenyataannya menunjukkan bahwa sangat tidak mungkin untuk memperoleh jawaban responden yang absolut konsisten.

Adapun formulasi untuk menghitung indeks konsistensi adalah sebagai berikut :

*Consistency Index (CI) :*

$$CI = \frac{(\lambda - n)}{(n - 1)} \dots \dots \dots (3)$$

dimana :     n : jumlah criteria, bukan responden  
              λ : rata-rata dari konsistensi vector.

Apabila CI bernilai nol, maka pair wise comparison matrix tersebut konsisten.

Batas ketidakkonsistenan (inconsistency) yang telah ditetapkan oleh Thomas L. Saaty ditentukan dengan menggunakan Rasio Konsistensi (CR), yaitu perbandingan indeks konsistensi dengan nilai random indeks (RI) yang didapatkan dari suatu eksperimen oleh Oak Ridge National Laboratory kemudian dikembangkan

oleh Wharton School, seperti pada table 3.3. Nilai ini bergantung pada ordo matriks  $n$ . Dengan demikian, Rasio Konsistensi dapat dirumuskan sebagai berikut :

*Consistency Ratio (CR):*

$$CR = \frac{CI}{RI} \dots\dots\dots (4)$$

dimana :  $RI$  = Random Indeks

Tabel. 3.3 Nilai Random Indeks (RI)

|           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>n</b>  | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     |
| <b>RI</b> | 0,000 | 0,000 | 0,580 | 0,900 | 0,120 | 1,240 | 1,320 | 1,410 | 1,450 |

|           |       |       |       |       |       |       |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>n</b>  | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    |
| <b>RI</b> | 1,490 | 1,510 | 1,480 | 1,560 | 1,570 | 1,590 |

Sumber : Thomas L Saaty ( 1980), The Analytic Hierarchy Process.

Bila matriks pair-wise comparison dengan nilai CR lebih kecil dari 0,100 maka ketidakkonsistenan pendapat dari decision maker masih dapat diterima dan jika tidak maka penilaian perlu diulang.

Langkah selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan mentabulasikan hasil wawancara penelitian dalam bentuk tabel untuk kemudian dihitung nilai geomeannya, yaitu nilai sentral yang dianggap mewakili nilai seluruh data yang diperoleh dari nilai kualifikasi persepsi dikalikan satu dengan lainnya dan dicari pangkat dari jumlah responden. Rumus geomean tersebut adalah :

$$\sqrt[n]{X_1, X_2, X_3, \dots, X_n} \dots\dots\dots (4)$$

Dari hasil tersebut selanjutnya membentuk matrix pair-wise comparasion yang membandingkan antara berbagai faktor dalam menentukan strategi dan kebijakan wilayah dengan menggunakan prinsip kebalikan dan kemudian diisi

dengan angka geomean yang diperoleh dari tabulasi. Selanjutnya, menghitung rasio tiap elemen terhadap nilai total elemen pada matrix pair-wise dan dipindahkan untuk diubah menjadi matrix priority vector. Bobot nilai masing-masing faktor akan diperoleh dengan mencari nilai rata-rata baris dari matrix priority vector. Langkah terakhir adalah menghitung rasio konsistensi, dengan terlebih dahulu menghitung weighted sum vector yang diperoleh dari penjumlahan antara perkalian nilai rata-rata pada matrix priority vector dengan nilai elemen dalam matrix priority vector sehingga akan diperoleh konsistensi vektor.

Selanjutnya mencari lambda ( $\lambda$ ) yang diperoleh dari nilai rata-rata konsistensi vector. Setelah mendapatkan nilai lambda ( $\lambda$ ) dilanjutkan dengan menghitung nilai indeks konsistensi dengan menggunakan persamaan (3) dan menghitung konsistensi rasio dengan persamaan (4). Tahapan menghitung bobot yang telah dijelaskan berlaku untuk perhitungan bobot faktor (level pertama) maupun bobot variabel (level kedua) dari struktur hierarki. Setelah bobot masing-masing faktor (level pertama) dan bobot masing-masing variabel (level kedua) didapat maka untuk mendapatkan bobot final dilakukan dengan mengkalikan nilai masing-masing bobot variabel level kedua dengan masing-masing bobot faktor level pertama.

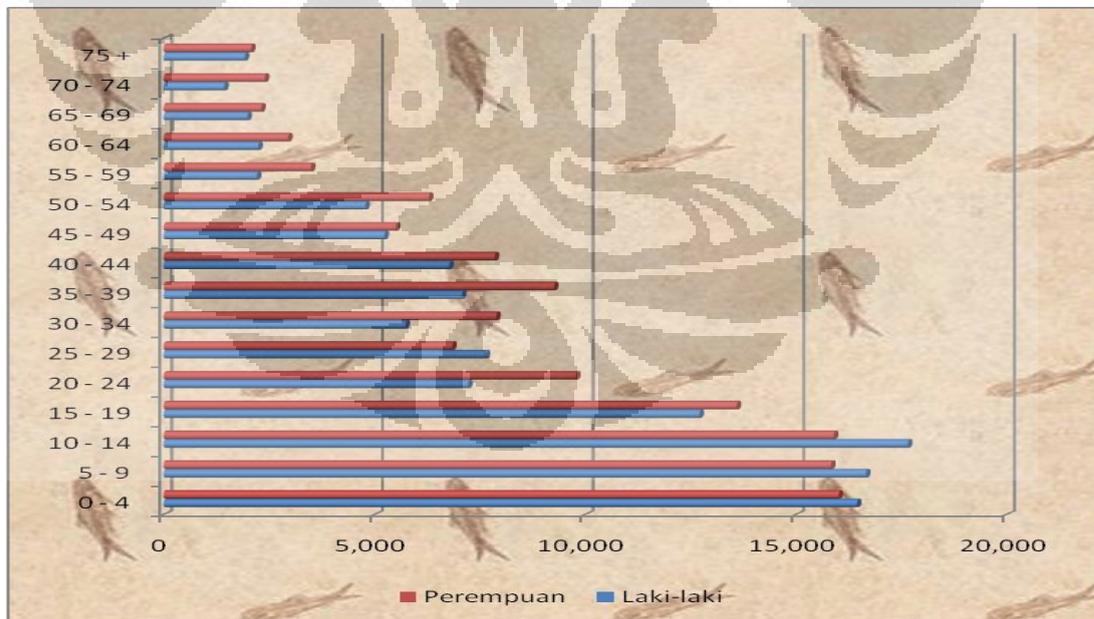
## BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

### 4.1. Potensi Ekonomi Dan Sosial Budaya

#### 4.1.1. Kondisi Penduduk Kabupaten Muna .

Jumlah penduduk Kabupaten Muna tahun 2009 merupakan hasil proyeksi dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Jumlah penduduk Kabupaten Muna tahun 2009 adalah sebanyak 248.461 jiwa. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 0,99 persen dibandingkan tahun 2008, yaitu 246.004 jiwa. Penduduk Kabupaten Muna terbanyak berada di Kecamatan Katobu dengan jumlah penduduk sebanyak 26.027 atau sekitar 10,48 persen dari total penduduk Kabupaten Muna.

Menurut kelompok usia, penduduk Kabupaten Muna berusia antara 0 – 14 tahun (usia anak-anak) sebanyak 37,31%, penduduk usia 15 – 64 tahun sebanyak 57,10 persen, dan penduduk usia 65 tahun ke atas sebanyak 5,59 persen. Seperti disajikan pada gambar 4.1 berikut :



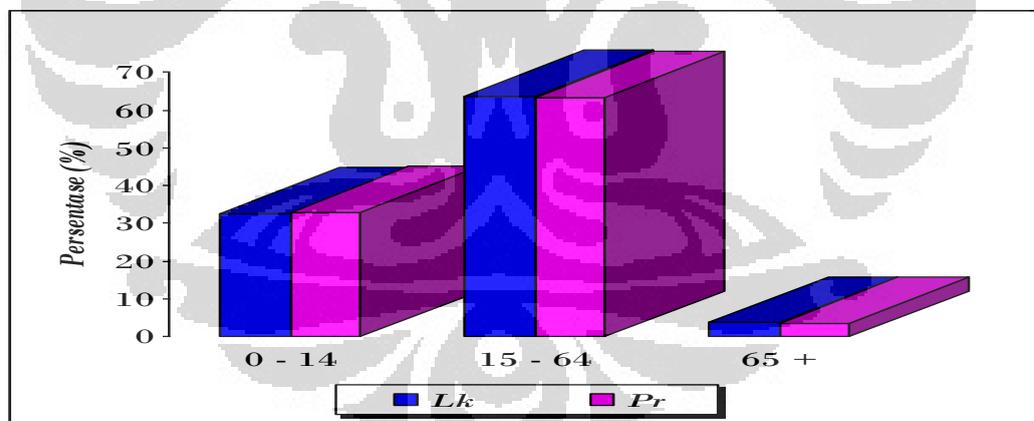
Gambar 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Muna Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Tahun 2009.

Sumber : Kabupaten Muna Dalam angka 2009

Bila dibandingkan dengan tahun 2008, terlihat bahwa persentase kelompok usia 15 – 64 tahun dan 65 tahun ke atas selama tahun 2009 relatif sama dengan tahun 2008, dimana kelompok 15 – 64 tahun berjumlah 57,11 persen sedangkan tahun 2009 sebesar 57,10 persen. Demikian pula untuk kelompok usia 65 tahun ke atas tahun 2009 juga relatif sama dengan tahun 2008 yaitu 5,59 persen tahun 2009 dan 5,06 persen selama tahun 2008.

Dari keadaan seperti tersebut di atas, terlihat bahwa penambahan penduduk kelompok usia 0-14 tahun lebih kecil bila dibanding dengan persentase penambahan penduduk kelompok usia 15 – 64 tahun. Hal ini berarti persentase kelahiran lebih kecil bila dibanding dengan penambahan penduduk dari kelompok 0 – 14 tahun kedalam kelompok usia 15 – 64 tahun, seperti terlihat pada gambar 4.3.

Indikator bahwa program Keluarga Berencana di Kabupaten Muna cukup memberikan kontribusi dalam menekan angka kelahiran di Kabupaten Muna. Sedangkan ketambahan persentase usia 65 tahun ke atas yang lebih besar dibanding tahun 2008 memberikan indikasi bahwa derajat kesehatan penduduk usia lanjut semakin meningkat sehingga usia harapan hidup menjadi lebih lama.



Gambar 4.2 Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2009.

Sumber : Kabupaten Muna Dalam angka 2009

#### 4.1.2. Tenaga Kerja

Penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Muna tahun 2009 menurut jenis kegiatan terdiri atas bekerja sebesar 70,13 persen, disusul mengurus rumah

tangga sebesar 16,55 persen, sekolah sebesar 7,39 persen dan pengangguran serta lainnya dengan persentase masing-masing sebesar 2,51 persen dan 3,42 persen, seperti dijelaskan pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin di Kab. Muna Tahun 2009

| No            | Uraian       | Laki - Laki   | Perempuan     | Laki-laki + Perempuan |
|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 1             | Bekerja      | 81,57         | 60,10         | 70,13                 |
| 2             | Pengangguran | 1,48          | 3,42          | 2,51                  |
| 3             | Sekolah      | 7,47          | 7,32          | 7,39                  |
| 4             | Mengurus RT  | 5,78          | 25,98         | 16,55                 |
| 5             | Lainnya      | 3,70          | 3,18          | 3,42                  |
| <b>Jumlah</b> |              | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b>         |

Sumber : Kabupaten Muna Dalam Angka 2009

Terdapat perbedaan yang signifikan antara penduduk laki-laki dan perempuan pada semua jenis kegiatan, dimana persentase penduduk laki-laki yang bekerja sebesar 81,57 persen dan perempuan sebesar 60,11 persen. Kemudian untuk kegiatan sekolah laki-laki sebesar 7,47 persen dan perempuan sebesar 7,32 persen.

Sedangkan untuk kegiatan mengurus rumah tangga didominasi oleh penduduk perempuan dengan persentase sebesar 25,98 persen, sedangkan laki-laki untuk kegiatan mengurus rumah tangga hanya sebesar 5,78 persen. Untuk kategori yang menganggur penduduk laki-laki lebih kecil dibanding perempuan. Tercatat penduduk laki-laki yang menganggur sebanyak 1,48 persen sedangkan penduduk perempuan sebanyak 3,42 persen.

Dari penduduk yang bekerja, sebagian besar masih bekerja disektor pertanian, disusul sektor jasa/lainnya dan sektor perdagangan, seperti disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.2 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas Menurut Lapangan Pekerjaan dan Jenis Kelamin Tahun 2009.

| No | Uraian                      | Laki – Laki   | Perempuan     | Laki-laki + Perempuan |
|----|-----------------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 1  | Pertanian                   | 51,11         | 55,46         | 53,09                 |
| 2  | Pertambangan dan Penggalain | 1,76          | 0,56          | 1,21                  |
| 3  | Industri                    | 7,25          | 9,06          | 8,08                  |
| 4  | Listrik, Gas dan Air Bersih | 0,20          | 0,03          | 0,11                  |
| 5  | Konstruksi                  | 7,62          | 0,29          | 4,28                  |
| 6  | Perdagangan                 | 6,80          | 22,33         | 13,88                 |
| 7  | Transportasi dan Komunikasi | 8,80          | 0,63          | 5,08                  |
| 8  | Keuangan                    | 0,73          | 0,02          | 0,40                  |
| 9  | Jasa/Lainnya                | 15,74         | 11,62         | 13,8                  |
|    | <b>Jumlah</b>               | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b>         |

Sumber : BPS Kabupaten Muna 2010

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa sebagian besar atau sebanyak 53,09 persen penduduk Kabupaten Muna yang berusia 15 tahun ke atas bekerja di sektor *pertanian*, disusul sektor perdagangan dan sektor *jasa-jasa/lainnya* masing-masing sebanyak 13,88 persen dan 13,87 persen.

Menurut jenis kelamin terdapat perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan untuk jenis pekerjaan tertentu. Untuk sektor konstruksi dan sektor transportasi/komunikasi didominasi oleh penduduk laki-laki dengan persentase masing-masing sebesar 7,62 persen dan 8,80 persen, sedangkan untuk penduduk perempuan yang terlibat dalam sektor tersebut masing-masing hanya sebesar 0,29 persen untuk sektor konstruksi dan 0,63 persen untuk sektor transportasi dan komunikasi. Sebaliknya untuk sektor industri dan perdagangan didominasi oleh penduduk perempuan masing-masing sebesar 9,06 persen untuk sektor industri dan 22,33 persen untuk sektor perdagangan, sedangkan penduduk laki-laki yang terlibat pada kedua sektor tersebut masing-masing sebesar 7,25 persen untuk sektor industri dan 6,80 persen untuk sektor perdagangan.

Melihat kondisi tersebut, maka sesungguhnya penduduk perempuan lebih banyak bekerja di sektor industri khususnya kerajinan rumah tangga serta sektor perdagangan. Oleh karena itu upaya peningkatan keterampilan bagi penduduk perempuan perlu diupayakan sedemikian rupa, sehingga sektor industri ini dapat mengurangi pengangguran khususnya penduduk perempuan. Demikian pula pemberian bantuan permodalan dalam pengembangan sektor perdagangan juga perlu mendapat prioritas sehingga pengangguran dapat diminimalisir.

#### 4.1.3. Volume Perdagangan.

Perkembangan Industri dan Perdagangan di Kabupaten Muna, seperti pada tabel 4.3, masih berskala mikro, kecil, dan menengah yang terdiri dari usaha industri keluarga, kecil, dan menengah serta berbagai jenis usaha perdagangan.

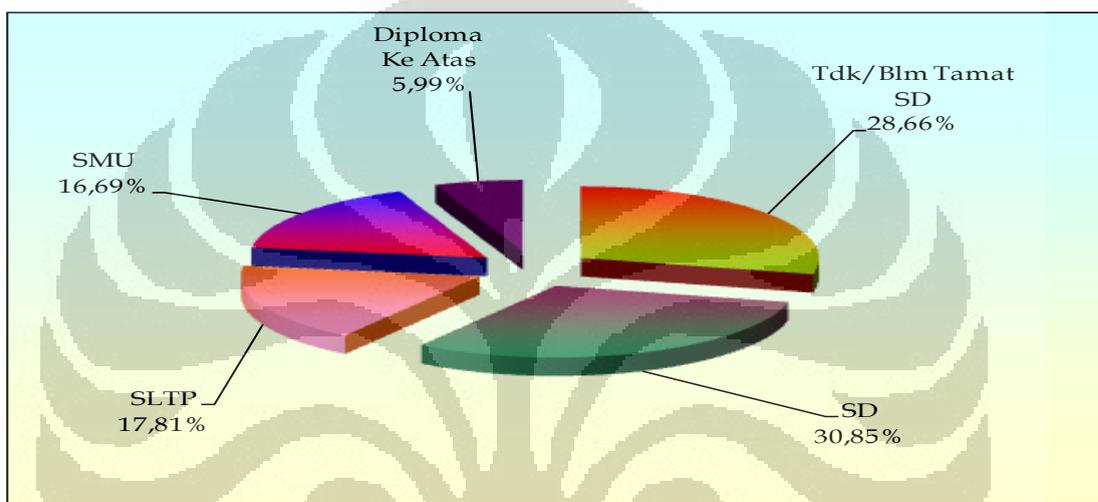
Tabel 4.3 Volume dan Nilai perdagangan Hasil Bumi dan Laut Antar Pulau Menurut Jenis Barang di Kabupaten Muna Tahun 2009.

| NO            | Jenis Barang              | Volume (Ton)     | Nilai Jual (Rp.Juta) |
|---------------|---------------------------|------------------|----------------------|
| I             | Pertanian Tanaman Pangan  |                  |                      |
| 1.            | Jagung                    | 93               | 326,125              |
| 2.            | Kacang Tanah (dikupas)    | 81               | 1.247.875            |
| 3.            | Tomat                     | 145,5            | 1.017.700            |
| II            | Perkebunan                |                  |                      |
| 1.            | Kopra                     | 3.079            | 6.082,6              |
| 2.            | Mete Gelondngan           | 1.591            | 9.396                |
| 3.            | Kakao                     | 214              | 2.588,94             |
| 4.            | Kemiri Berkulit           | 57,4             | 73,36                |
| 5.            | Jeruk                     | 2,31             | 6,3                  |
| 6.            | Jambu Mete (dikupas)      | 80,5             | 4.715                |
| III           | Hasil Hutan               |                  |                      |
| 1.            | Kayu Jati Gelondongan     |                  |                      |
| 2.            | Kayu Jati Kasar           | 1.172            | 2.930                |
| IV            | Hasil Perikanan           | 453              | 6.166,75             |
| V             | Hasil Industri/ Kerajinan |                  |                      |
| <b>Jumlah</b> | <b>2009</b>               | <b>6.963,71</b>  | <b>34.550,65</b>     |
|               | <b>2008</b>               | <b>8.619,34</b>  | <b>54.246.046</b>    |
|               | <b>2007</b>               | <b>17.953,55</b> | <b>82.171.123</b>    |

Sumber: Dinas Perindag Kab.Muna. 2010.

#### 4.1.4. Pendidikan

Berdasarkan hasil Susenas, sektor pendidikan patut menjadi perhatian utama di Kabupaten Muna dimana dari data menunjukkan bahwa sekitar 77,32 persen penduduk memiliki pendidikan tertinggi hanya sampai tingkat SLTP atau lebih rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Muna masih relatif rendah dan perlu mendapat perhatian yang lebih serius, seperti pada gambar berikut :



Gambar 4.3 Persentase Penduduk 10 tahun ke atas Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2009

Sumber : Kabupaten Muna Dalam angka 2009

Jumlah penduduk Kabupaten Muna usia 10 tahun ke atas ada sekitar 28,66 persen penduduk usia 10 tahun ke atas yang belum/tidak tamat sekolah dasar. Kemudian persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang hanya memiliki ijazah SD/MI sebesar 30,85 persen. Kemudian yang hanya menamatkan tingkat pendidikan SLTP/MTs/Kejuruan sebesar 17,81 persen . Yang menamatkan SMU/MA/SMK adalah sebesar 16,69 persen dan yang memiliki ijazah pendidikan DI/DII/DIII dan DIV/Universitas adalah sebesar 5,99 persen.

Seperti terlihat pada tabel 4.4, bahwa penduduk Kabupaten Muna usia 3 – 6 tahun yang pernah mengikuti pendidikan pra sekolah adalah hanya sebesar 8,53 persen dan yang masih mengikuti pendidikan pra sekolah sebesar 6,20 persen.

Sedangkan yang tidak pernah mengikuti pendidikan pra sekolah adalah sebesar 85,27 persen. Dibanding dengan tahun 2008, terjadi peningkatan persentase anak yang pernah dan sedang mengikuti pendidikan pra sekolah yaitu sebesar 10,70 persen tahun 2008 meningkat menjadi 14,73 persen tahun 2009. Meskipun terjadi peningkatan namun jumlah anak usia 3 – 6 tahun yang tidak pernah mengikuti pendidikan pra sekolah masih sangat besar yaitu 89,30 persen tahun 2008 dan 85,27 persen selama tahun 2009.

Tabel. 4.4 Persentase Penduduk Usia 3 - 6 Tahun Menurut Keikutsertaan Pendidikan Pra sekolah di Kabupaten Muna Tahun 2008 - 2009

| Uraian        | 2008          | 2009          |
|---------------|---------------|---------------|
| Pernah        | 2,47          | 8,53          |
| Sedang        | 8,23          | 6,20          |
| Tidak Pernah  | 89,30         | 85,27         |
| <b>Jumlah</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

Sumber : Susenas 2008 dan 2009

#### 4.1.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Perkembangan Indeks pembangunan (IPM) Kabupaten Muna dibandingkan dengan Kabupaten lainnya di Sulawesi Tenggara selama tahun 2007-2009 berada posisi ke-10, seperti pada tabel 4.5. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi pembangunan di kabupaten Muna berada dibawah rata-rata tingkat pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Tabel 4.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponennya Menurut Kabupaten di Sulawesi Tenggara Tahun 2008

| Provinsi / Kab    | Harapan Hidup (th) | Angka Melek Huruf (%) | Rata <sup>2</sup> lama sekolah (th) | Peng. Rill perkapita per bulan (Rp.000) | IPM   | Rang-King |
|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|-------|-----------|
| Sulawesi Tenggara | 67,20              | 91,42                 | 7,74                                | 611,72                                  | 69,00 | 25        |
| Kota KDI          | 68,95              | 98,37                 | 11,01                               | 628,14                                  | 75,09 | 1         |
| Kota Bau-Bau      | 69,79              | 95,30                 | 9,55                                | 607,11                                  | 72,14 | 2         |

( Sambungan Tabel 4.5 )

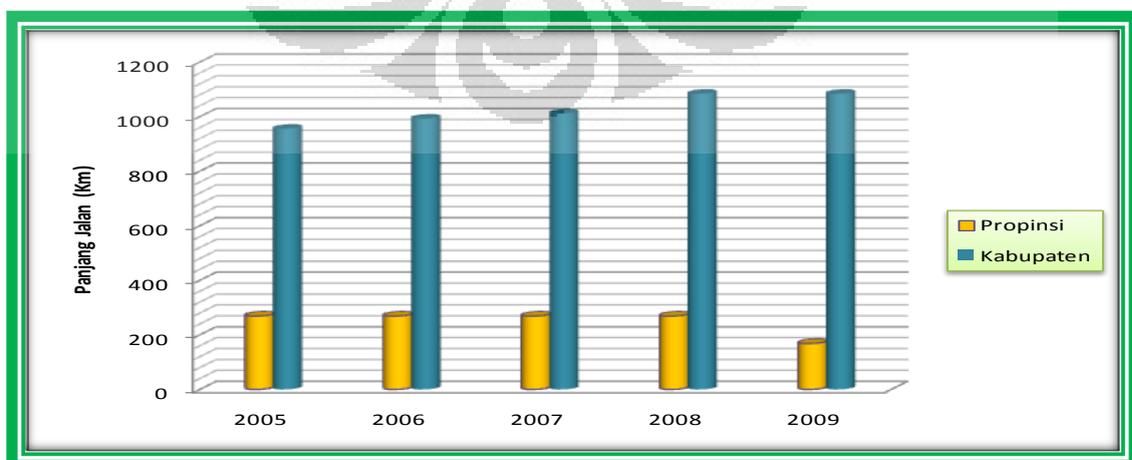
|          |       |       |      |        |       |    |
|----------|-------|-------|------|--------|-------|----|
| Kolaka   | 66,61 | 93,14 | 7,70 | 626,63 | 70,06 | 3  |
| Konsel   | 67,31 | 94,10 | 7,60 | 604,15 | 68,86 | 4  |
| Konawe   | 66,74 | 94,60 | 7,98 | 601,40 | 68,72 | 5  |
| Kolut    | 65,27 | 93,02 | 7,40 | 611,61 | 67,91 | 6  |
| Buton    | 67,89 | 85,72 | 6,27 | 623,50 | 67,82 | 7  |
| Konut    | 66,47 | 93,80 | 7,00 | 598,33 | 67,43 | 8  |
| Butur    | 67,64 | 86,50 | 7,59 | 601,82 | 67,16 | 9  |
| Muna     | 65,79 | 87,59 | 7,30 | 606,14 | 66,49 | 10 |
| Bombana  | 67,30 | 88,20 | 6,23 | 598,00 | 66,05 | 11 |
| Wakatobi | 67,83 | 88,80 | 6,52 | 589,39 | 66,03 | 12 |

Sumber : Statistik Dalam Angka 2009

## 4.2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

### 4.2.1. Kondisi Jalan

Panjang jalan di Kabupaten Muna tahun 2009, seperti pada gambar 4.4 adalah 1.252,2 km, yang terdiri dari 168,20 km jalan Propinsi dan Nasional, serta 1.083,96 km jalan kabupaten. Berdasarkan jenis permukaannya, jalan dapat dibedakan menjadi jalan diaspal dan jalan tidak diaspal. Sedangkan berdasarkan kondisinya dapat dibedakan menjadi kondisi baik, sedang, rusak, dan rusak berat. Jalan juga dapat diklasifikasikan menurut kelasnya, yaitu kelas I, II, III, IIIA, IIIB, IIIC, dan tidak dirinci.



Gambar 4.4 Panjang Jalan Propinsi dan Kabupaten Tahun 2005 - 2009

Sumber : Kabupaten Muna Dalam angka 2009

#### 4.2.2. Sarana dan Prasarana Transportasi

Sarana transportasi darat yang umum digunakan oleh masyarakat Kabupaten Muna adalah Kendaraan Roda Empat (Mobil) dan Kendaraan roda dua (sepeda motor). Perkembangan jumlah kendaraan roda empat rata-rata mengalami pertumbuhan sebanyak 7.32% per tahun dan Sepeda motor mengalami pertumbuhan 2.5% per tahun yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.6 Perkembangan Jumlah Sarana Transportasi Darat Tahun 2007-2009.

| No | Uraian                  | 2007 | 2008 | 2009 | Pertumbuhan Rata-rata (%) |
|----|-------------------------|------|------|------|---------------------------|
| 1  | Kendaraan Roda Empat    | 495  | 535  | 576  | 7.32                      |
|    | a. Mobil Penumpang/Taxi | 16   | 16   | 16   | -                         |
|    | b. Mobil Barang / Truck | 194  | 224  | 256  | 13.54                     |
|    | c. Mobil Bus            | 285  | 295  | 304  | 3.40                      |
| 2  | Kendaraan Roda Dua      | 9392 | 9861 | 9861 | 2.50                      |

Sumber : Kabupaten Muna Dalam angka 2009

Secara umum Kondisi Prasarana Transportasi Laut di Kabupaten Muna pada Tahun 2009 disajikan pada tabel 4.7 berikut :

Tabel 4.7 Kondisi Umum Sarana Perhubungan di Kabupaten Muna Tahun 2009

| No. | Jenis Prasarana       | Kebutuhan (unit) | Kondisi (Existing (unit)) |    |    |        |
|-----|-----------------------|------------------|---------------------------|----|----|--------|
|     |                       |                  | Baik                      | RB | RR | Jumlah |
| 1.  | Pelabuhan Peln        | 1                | 1                         | -  | -  | 1      |
| 2.  | Penyeberangan (Ferry) | 2                | 2                         | -  | -  | 2      |
| 3.  | Pelabuhan Rakyat      | 28               | 26                        | -  | -  | 28     |
| 4.  | Tambatan Perahu       | 9                | 9                         | -  | -  | 9      |

Sumber : Kabupaten Muna Dalam angka 2009

Kabupaten Muna terletak di daratan Pulau Muna bagian utara serta pulau-pulau lain yang ada disekitarnya sehingga masyarakat banyak yang membutuhkan transportasi laut. Kondisi prasarana perhubungan laut secara tidak langsung

memberi pengaruh kepada arus barang dan arus penumpang dan dapat memberi dampak kepada aktivitas ekonomi masyarakat sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi di Kabupaten Muna.

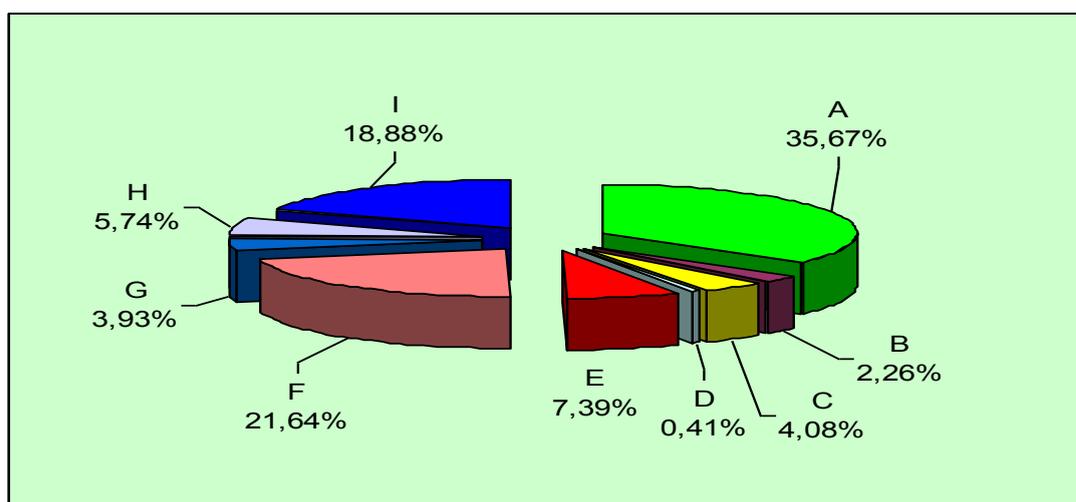
### 4.3. Perekonomian Daerah

#### 4.3.1. Struktur Ekonomi.

Struktur perekonomian Kabupaten Muna selama 5 tahun terakhir masih didominasi oleh 3 sektor yaitu Sektor pertanian, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dan Sektor Jasa-Jasa.

Kontribusi sektor pertanian masih mendominasi namun dari tahun ketahun terus mengalami penurunan. Tahun 2005 kontribusi sektor pertanian sebesar 44,27 persen, tahun 2006 penghitungan PDRB Kabupaten Muna dipisahkan dengan Kabupaten Buton Utara, sektor pertanian masih mendominasi struktur perekonomian Kabupaten Muna sebesar 39,45 persen dan tahun 2007 turun menjadi 37,75 persen. Tahun 2008 dan 2009 peranan sektor pertanian terus menurun terhadap PDRB Kabupaten Muna.

Pada tahun 2008 kontribusi sektor pertanian sebesar 36,88 persen turun menjadi 35,67 persen tahun 2009. Kontribusi terbesar sektor pertanian pada tahun 2009 bersumber dari sub sektor tanaman pangan yaitu sebesar 11,50 persen kemudian sub sektor perikanan sebesar 9,89 persen, menyusul sub sektor peternakan dan hasilnya sebesar 6,73 persen, sub sektor tanaman perkebunan sebesar 5,46 persen, sedangkan sub sektor yang memberikan kontribusi terkecil adalah sub sektor kehutanan yaitu sebesar 2,10 persen. Gambar berikut memperlihatkan kondisi perekonomian Kabupaten Muna tahun 2009 :



*Keterangan Gambar :*

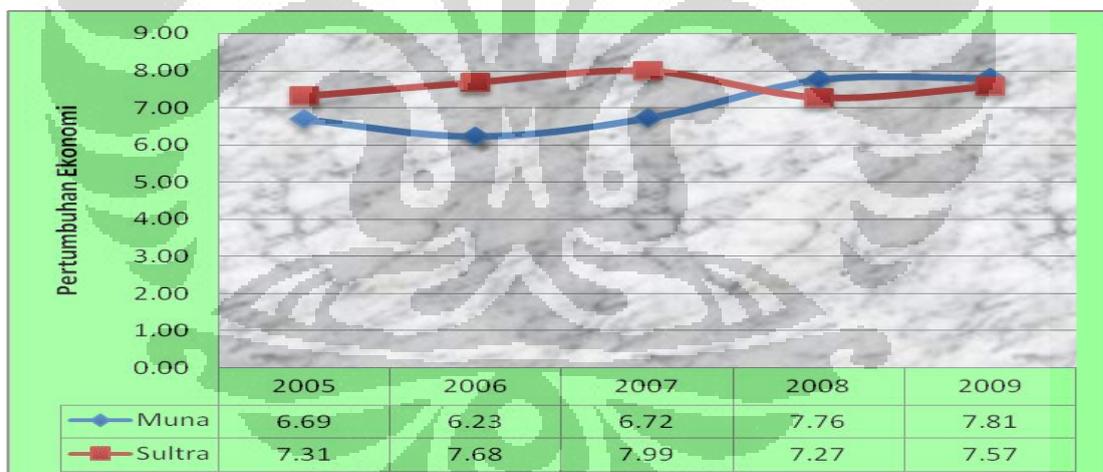
- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <i>a. Pertanian</i>                   | <i>f. Perdagangan</i>                            |
| <i>b. Pertambangan dan penggalian</i> | <i>g. Angkutan dan komunikasi</i>                |
| <i>c. Industri pengolahan</i>         | <i>h. Keuangan, persewaan &amp; jasa perush.</i> |
| <i>d. Listrik dan air minum</i>       | <i>i. Jasa-jasa</i>                              |
| <i>e. Konstruksi/bangunan</i>         |  |

Gambar 4.5 Peranan Sektor Ekonomi Dalam PDRB Kabupaten Muna Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009

Sumber : Kabupaten Muna Dalam angka 2009

#### 4.3.2. Pertumbuhan Ekonomi Regional

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muna periode tahun 2007- 2009 atas dasar harga konstan tahun 2000 seperti pada gambar 4.6, mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 7.43 persen per tahun. Angka ini masih lebih rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 7,56 persen.



Gambar 4.6 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Muna dan Sulawesi Tenggara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005 – 2009

Sumber : Kabupaten Muna Dalam angka 2009

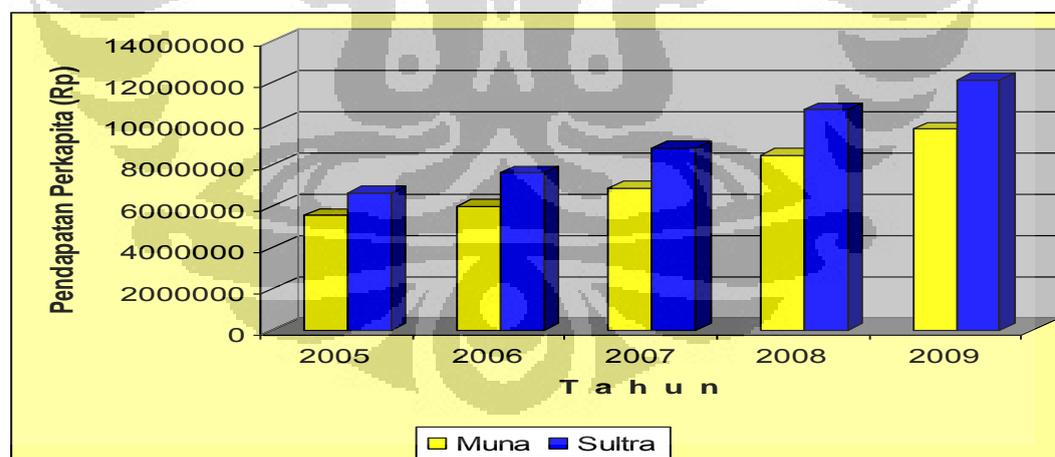
Pertumbuhan ekonomi tahun 2009 terjadi pada semua sektor ekonomi, yaitu sektor pertanian tumbuh sebesar 4,78 persen, sektor pertambangan dan penggalian tumbuh 18,23 persen, sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 9,82 persen, sektor listrik, gas dan air bersih tumbuh sebesar 9,38 persen, sektor konstruksi/bangunan

tumbuh sebesar 8,06 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran tumbuh sebesar 8,14 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh 9,40 persen, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan tumbuh 11,35 persen dan sektor jasa-jasa tumbuh sebesar 9,54 persen.

Sektor ekonomi yang paling tinggi pertumbuhannya adalah sektor pertambangan dan penggalian tumbuh 18,23 persen, sedangkan sektor ekonomi yang paling rendah pertumbuhannya adalah sektor pertanian yang tumbuh sebesar 4,78 persen yang diakibatkan oleh turunnya beberapa produksi tanaman pangan antara lain jagung.

#### 4.3.3. PDRB Perkapita

Salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu daerah adalah dengan melihat besarnya pendapatan perkapita dari daerah yang bersangkutan. Pada gambar 4.7, pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Muna berada dibawah pendapatan perkapita Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan demikian, tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Muna masih berada dibawah tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara.



Gambar 4.7 Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Muna Tahun 2005-2009.

Sumber : BPS, 2010

Pendapatan perkapita Kab. Muna tahun 2009 atas harga berlaku berjumlah Rp. 9.736.368 lebih kecil dibanding dengan pendapatan perkapita Sulawesi Tenggara berjumlah Rp. 12.111.337, namun demikian, pertumbuhan pendapatan

perkapita Kabupaten Muna dalam kurun waktu tahun 2006-2009 mengalami peningkatan 6.63% pertahun, diatas perkembangan pendapatan perkapita masyarakat Sulawesi Tenggara yang tumbuh rata-rata 5.59% per tahun.

#### 4.4. Pemerintahan Umum.

##### 4.4.1. Sumber Daya Aparatur

Jumlah Pegawai Pegawai di kabupaten Muna pada Tahun 2009 mencapai 8.812 jiwa, terdapat peningkatan 1.154 jiwa dibanding tahun 2005 sejumlah 7.658 jiwa. Terdapat perbedaan jumlah maupun klasifikasi tingkat pendidikan pegawai tahun 2005 dibandingkan tahun 2009 karena disesuaikan tingkat kebutuhan dalam rangka upaya-upaya perbaikan dalam pembangunan manusia yang dilakukan pemerintah Kabupaten Muna, sebagaimana terlihat pada indikator dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia tahun 2008 sejumlah 66,49, tahun 2009 sejumlah 67,03.

Tabel 4.8 Klasifikasi Sumber Daya Aparatur Pemkab Muna Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2009.

| No          | Tingkat Pendidikan | Kondisi Existing (org) |
|-------------|--------------------|------------------------|
| 1           | SD                 | 72                     |
| 2           | SMP                | 152                    |
| 3           | SMA                | 2,694                  |
| 4           | D1                 | 318                    |
| 5           | D2                 | 1,171                  |
| 6           | D3                 | 859                    |
| 7           | S1                 | 3,295                  |
| 8           | S2/Spesialis/S3/   | 251                    |
| J u m l a h |                    | 8,812                  |

Sumber : Bappeda dan PM Kab. Muna 2009

#### 4.4.2. Kondisi Kelembagaan

Secara umum Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Muna terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 9 Lembaga Teknis berbentuk Badan, 14 Lembaga Teknis berbentuk Dinas, 2 Lembaga Teknis berbentuk Kantor, 33 Kelembagaan Tingkat Kecamatan, dan 31 Kelembagaan Tingkat Kelurahan.

Tabel 4.9 Kondisi Infrastruktur Kelembagaan Pemerintahan Tahun 2009

| No. | Jenis Prasarana    | Kondis Existing (unit) |    |    |         |        |
|-----|--------------------|------------------------|----|----|---------|--------|
|     |                    | Baik                   | RB | RS | Darurat | Jumlah |
| 1.  | Kantor/Dinas/Badan | 23                     | 2  | 3  | 0       | 28     |
| 2   | Kantor Kecamatan   | 16                     | 2  | 5  | 10      | 33     |

Sumber : Bappeda dan PM Kab. Muna 2009

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **5.1. Gambaran Umum Program RPJMD Kabupaten Muna**

##### **5.1.1. Program RPJMD 2006 - 2010**

Program pembangunan daerah Kabupaten Muna tahun 2006 – 2010 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Strategi Kebijakan, dan Program Pembangunan Kepala Daerah terpilih yang disusun dengan memperhatikan Rancangan Rencana Strategi yang telah disiapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Muna.

Untuk lebih memahami program pembangunan daerah tersebut, maka program pembangunan tahun 2006-2010 disusun berdasarkan fungsi pemerintahan yang merupakan kewenangan wajib pemerintah daerah sebagaimana yang termuat dalam fungsi-fungsi pemerintah sebagai berikut :

- Fungsi Pelayanan Umum Pemerintahan

Dalam memantapkan fungsi pelayanan umum pemerintahan maka kebijakan yang ditempuh adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang diarahkan pada program: peningkatan kapasitas kelembagaan; peningkatan pengawasan fungsional; pengembangan dan peningkatan sumber keuangan daerah; pemantapan manajemen keuangan daerah; pemantapan manajemen pengelolaan pemerintahan; penelitian, pendataan dan pengkajian pengembangan daerah; peningkatan kapasitas fungsi legislatif; peningkatan pembinaan kemasyarakatan, pembangunan dan pemerintahan; dan peningkatan fungsi kearsipan dan perpustakaan.

- Fungsi Ekonomi

Kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Muna dalam rangka meningkatkan fungsinya dalam pengembangan perekonomian daerah adalah :

1. Meningkatkan Iklim Usaha yang Kondusif yang diarahkan pada program :  
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif, Penyediaan Infrastruktur Perekonomian yang Representatif, Peningkatan Perlindungan Konsumen, Pengembangan Perusahaan Daerah, Penanaman Modal Daerah, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.

2. Meningkatkan Produktifitas, produksi, daya saing, dan nilai tambah produk pertanian yang diarahkan pada program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Peningkatan Ketahanan Pangan, Pengembangan Agribisnis, Peningkatan Kesejahteraan Petani, Pengembangan Sumber Daya Perikanan,
  3. Mewujudkan Pengelolaan Hutan Negara dan Hutan Rakyat, Yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan, yang diarahkan pada program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Rehabilitasi dan Konservasi Potensi Sumber Daya Hutan, Pemanfaatan Potensi Sumber daya Hutan.
  4. Meningkatkan kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Perdesaan yang diarahkan pada program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan irigasi, Pengembangan Kelembagaan Sumber Daya, Air dan irigasi, Pengendalian Banjir & Pengamanan Pantai, Penyediaan dan pengelolaan Air Baku, Pengembangan Tenaga Listrik dan Energi Alternatif, Peningkatan/Pemb. pelayanan energi Listrik Perdesaan.
  5. Mendorong Tumbuh dan berkembangnya usaha - usaha di bidang Sumber Daya Mineral yang diarahkan pada program Pengelolaan dan Pengendalian Usaha Pertambangan. Program ini bertujuan untuk mewujudkan pola pengusahaan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan.
  6. Mengembangkan dan menata Kawasan perkotaan dan Kawasan Prioritas guna mendorong pemerataan pembangunan, percepatan, dan pertumbuhan ekonomi daerah yang diarahkan pada program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pemeliharaan dan Pembangunan/Peningkatan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LaluLintas Jalan Raya, Penyediaan Peralatan Jalan,tujuan tersedianya sarana pembangunan dan perbaikan jalan, Peningkatan Sarana Pendukung Transportasi Darat, Pembangunan Sarana dan Prasarana ASDP, Penyediaan Prasarana Transportasi Laut, Penyediaan Prasarana Transportasi Udara,
- Fungsi Pendidikan

Dalam memantapkan fungsi pendidikan maka kebijakan yang ditempuh adalah Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang diarahkan pada program Pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar, Peningkatan,

Pemerataan, dan relevansi Pendidikan Menengah, Peningk. Mutu Tenaga kependidikan Pengembangan Budaya Baca & Pembinaan Perpustakaan, Peningk. Layanan Administrasi Pendidikan.

### 5.1.2. Program RPJMD 2010-2015

Untuk menyelaraskan agenda pembangunan nasional dan agenda pembangunan provinsi Sulawesi Tenggara terhadap agenda pembangunan Kabupaten Muna, maka arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Muna tahun 201-2015 direncanakan dengan 4 (empat) Agenda pokok yaitu :

Tabel 5.1 Arah Kebijakan Pembangunan Kab. Muna 2010-2015

| No | Agenda/Program                        | Kegiatan  |
|----|---------------------------------------|---|
| 1. | Pertama :<br>Pembangunan Ekonomi      | Pembangunan ekonomi diarahkan untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat dalam bentuk bebas dari kemiskinan, pengangguran, kekurangan pangan, sandang dan papan sebagai akibat dari rendahnya tingkat pendapatan. Pembangunan ekonomi masyarakat ditekankan pada peningkatan akses masyarakat kepada sumber-sumber ekonomi sehingga sektor-sektor unggulan seperti pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan dan perikanan secara nyata dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu agenda pertama ini diarahkan untuk meningkatkan keberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah serta membangkitkan industrialisasi. Untuk itu maka pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi adalah terpenuhinya hak untuk berusaha dan memperoleh lapangan kerja, hak untuk memperoleh akses permodalan, hak atas pengelolaan sumberdaya alam serta hak atas pemerataan distribusi barang dan jasa |
| 2  | Kedua:<br>Pengembangan Kualitas SDM . | Pengembangan Kualitas Sumberdaya Manusia diarahkan untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan yakni hak untuk memperoleh akses yang cepat, mudah dan murah atas kebutuhan pendidikan dan kesehatan dalam rangka terciptanya masyarakat yang berkualitas, baik kualitas intelektual, emosional,  |

(Sambungan Tabel 5.1)

|    |  |  |
|----|--|--|
|    |  | spiritual, fisik dan kekuatan nilai-nilai kulturalnya. Hak-hak dasar masyarakat di bidang pendidikan dalam bentuk bebas dari buta aksara, kebodohan, keterbelakangan dan putus sekolah. Sedangkan hak-hak dasar masyarakat di bidang kesehatan dalam bentuk hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai sehingga risiko penularan penyakit dan kekurangan gizi semakin berkurang.   |
| 3. | Ketiga :<br>Pembangunan<br>Infrastruktur Dasar<br>Wilayah. | Pembangunan Infrastruktur Dasar Wilayah diarahkan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial budaya masyarakat dalam kerangka pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar desa dan antar kecamatan. Pembangunan transportasi dilakukan secara terpadu dengan mengembangkan jaringan pelayanan antar moda dan intra moda. Pengembangan sarana dan prasarana sumberdaya air diarahkan untuk mewujudkan fungsi air sebagai sumberdaya ekonomi dan sosial melalui pengelolaan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pembangunan telekomunikasi diarahkan untuk mendorong terciptanya masyarakat berbasis informasi. Pembangunan sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan secara memadai serta pengembangan diversifikasi energi untuk pembangkit listrik baru berbasis sumberdaya yang dapat diperbaharui. |
| 4. | Keempat :<br>Revitalisasi<br>Pemerintahan Daerah.          | Revitalisasi Pemerintahan Daerah diarahkan untuk melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) melalui pengembangan kapasitas manajemen pemerintahan daerah, peningkatan kualitas sumberdaya aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.  |

Sumber : RPJMD Kab. Muna 2010-2015

Program prioritas pembangunan yang menjadi fokus dan lokus Pemerintah Kabupaten Muna 2011-2015 diarahkan untuk mewujudkan Muna Berhati Emas dengan target indikator sasaran pembangunan sebagaimana telah disebutkan pada

bab sebelumnya. Secara umum program prioritas pembangunan Kabupaten Muna dalam upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan dijabarkan dalam urusan kewenangan pemerintah daerah sebagai berikut :

- a. Program Pembangunan dalam mendukung pelaksanaan Urusan Wajib, meliputi :
  1. Urusan Wajib Pendidikan.

Program prioritas pembangunan bidang Pendidikan diarahkan untuk mendukung peningkatan akses, mutu, dan relevansi pendidikan. Peningkatan akses pendidikan direncanakan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah dan mengurangi angka putus sekolah, serta mendorong pengembangan penyelenggaraan pendidikan tinggi termasuk perubahan status sekolah tinggi menjadi universitas. Peningkatan mutu direncanakan melalui pemerataan guru sampai ke lokasi-lokasi sekolah terpencil, peningkatan kualitas dan kompetensi guru, penyediaan sarana dan prasarana sekolah yang memadai, dan penyelenggaraan sistem pendidikan sekolah unggulan yang difokuskan pada pusat-pusat pengembangan wilayah. Sedangkan peningkatan relevansi pendidikan ditujukan untuk menyiapkan anak didik memiliki keterampilan (skill) untuk berkompetisi dalam dunia kerja.

2. Urusan Wajib Kesehatan.

Program prioritas pembangunan bidang kesehatan diarahkan untuk mendukung peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Peningkatan akses dan mutu kesehatan ditujukan untuk meningkatkan status kesehatan ibu dan anak; pemerataan tenaga kesehatan khususnya pada daerah-daerah terpencil; peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan; peningkatan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai pusat pelayanan kesehatan bagi masyarakat kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara; pengembangan puskesmas rawat inap yang berkualitas yang difokuskan pada pusat-pusat pengembangan wilayah; penyediaan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya; meningkatkan status gizi masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin; mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat penyakit; penyediaan obat dan pengawasan obat dan makanan; dan penyediaan jaminan perlindungan kesehatan khususnya bagi masyarakat miskin.

### 3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Program prioritas pembangunan bidang pekerjaan umum diarahkan pada penyediaan infrastruktur dasar wilayah yang berkualitas khususnya terkait dengan pembangunan jalan/ jembatan dan pembangunan sumber daya air dalam mendukung aktivitas sosial-ekonomi

### 4. Urusan Wajib Perhubungan.

Program prioritas pembangunan bidang perhubungan diarahkan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas dan menjamin transportasi darat, laut, dan udara yang aman.

### 5. Urusan Wajib Tenaga Kerja.

Program prioritas pembangunan bidang ketenagakerjaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas keterampilan calon tenaga kerja dan perlindungan tenaga kerja.

### 6. Urusan Wajib Penanaman Modal.

Program prioritas pembangunan bidang penanaman modal diarahkan untuk meningkatkan daya tarik investor melalui promosi potensi sumber daya wilayah, memberikan kemudahan perizinan dan tax holiday.

### 7. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Program prioritas pembangunan pada bidang ini diarahkan untuk mendorong terbentuknya daerah otonom baru; Pembangunan Sarana pemerintahan yang representatif; Peningkatan Pengawasan, Pembinaan, dan Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan; Peningkatan kualitas aparatur pemerintah; penegakan disiplin pegawai negeri, dan Peningkatan efektifitas pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah.

### 8. Urusan Wajib Ketahanan Pangan;

Program prioritas pembangunan bidang ketahanan pangan diarahkan pada peningkatan ketersediaan bahan pangan, pengembangan desa siaga. dan peningkatan kualitas kelembagaan petani.

### 9. Urusan Wajib Komunikasi dan Informasi;

Program prioritas kebijakan pembangunan dalam mendukung urusan komunikasi dan Informasi diarahkan untuk meningkatkan akses komunikasi pada daerah-daerah perdesaan.

b. Program Pembangunan dalam mendukung pelaksanaan Urusan Pilihan, meliputi :

1. Urusan Pilihan Pertanian;

Program prioritas pembangunan urusan pertanian diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan Nilai tambah Produk Pertanian dan peternakan, melalui Penanganan pasca panen dan Pengolahan hasil serta penyediaan sarana dan prasarana pertanian, Peningkatan produksi ternak dalam mendukung swasembada daging tahun 2014.

1. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan;

Program prioritas pembangunan urusan kelautan dan perikanan diarahkan untuk meningkatkan produksi hasil-hasil perikanan, pemberdayaan masyarakat nelayan, pengembangan konservasi laut, dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman nelayan.

2. Urusan Pilihan Kehutanan;

Program prioritas pembangunan kehutanan diarahkan untuk pemulihan kawasan hutan lindung dan perluasan hutan tanaman rakyat, dan mendorong perlindungan hutan jompi sebagai kawasan khusus baik untuk kepentingan wisata, penelitian, maupun sebagai hutan lindung.

3. Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral;

Program prioritas pembangunan urusan energi dan sumber daya mineral diarahkan pada pengembangan sumber-sumber energi yang terbarukan, zonasi potensi bahan galian, dan pembinaan pertambangan rakyat dan pemanfaatan air tanah/ mata air.

4. Urusan Pilihan Perdagangan;

Program prioritas pembangunan urusan perdagangan diarahkan untuk meningkatkan perlindungan pada konsumen dan meningkatkan efisiensi perdagangan.

#### 5. Urusan Pilihan Industri :

Program prioritas pembangunan urusan perindustrian diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan hasil-hasil pertanian melalui Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.

### 5.2. Analisis Location Quotient (LQ).

Salah satu upaya untuk memperoleh suatu perencanaan yang baik dalam rangka pengembangan pembangunan wilayah, maka diperlukan identifikasi sektor-sektor usaha baik berupa basis maupun non basis. Dengan model LQ ini dapat dilihat sektor mana yang mempunyai peranan besar dalam menunjang pembangunan perekonomian suatu daerah.

Analisis ini digunakan untuk mengetahui dan menentukan sektor ekonomi yang merupakan sektor basis dan yang non basis. Sektor basis merupakan sektor dengan kegiatan ekonomi yang hasil produksinya dapat untuk melayani pasar baik di dalam maupun di luar batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan sektor non basis merupakan sektor dengan kegiatan ekonomi yang hanya mampu menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang bertempat tinggal di dalam batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Sektor ini tidak mampu memasukkan barang dan jasanya keluar batas perekonomian sehingga luas lingkup produksi dan daerah pasarnya terutama bersifat lokal.

Dengan menggunakan besarnya PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara persektor dan PDRB Kabupaten Muna maka akan diperoleh nilai LQ. Apabila hasil perhitungan menunjukkan angka lebih dari satu ( $LQ > 1$ ) berarti sektor tersebut merupakan sektor basis. Sebaliknya apabila hasilnya menunjukkan angka kurang dari satu ( $LQ < 1$ ) berarti sektor tersebut bukan merupakan sektor basis.

Hasil perhitungan LQ Kabupaten Muna selama periode tahun 2005-2009 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.2 LQ Lapangan Usaha Kabupaten Muna Dalam lingkungan Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2009.

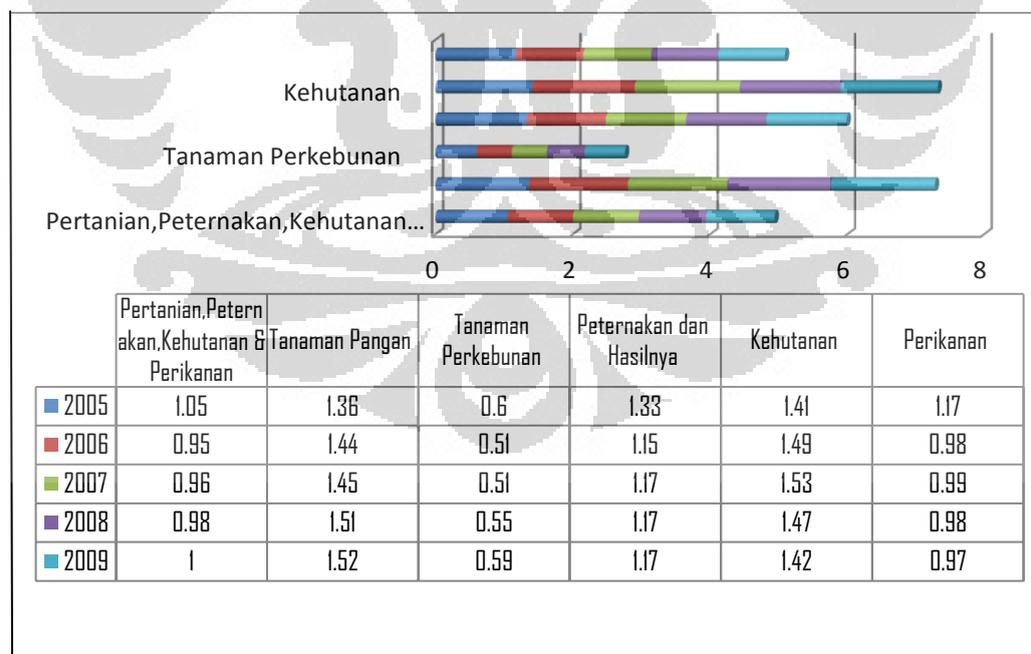
| NO        | LAPANGAN USAHA  | Nilai LQ PDRB Kabupaten Muna |             |             |             |             |
|-----------|---|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |   | 2005                         | 2006        | 2007        | 2008        | 2009        |
| <b>1</b>  | <b>PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN</b> | <b>1,05</b>                  | <b>0,95</b> | <b>0,96</b> | <b>0,98</b> | <b>1,00</b> |
|           | a. Tanaman Pangan                                     | 1,36                         | 1,44        | 1,45        | 1,51        | 1,52        |
|           | o. Tanaman Perkebunan                                 | 0,6                          | 0,51        | 0,51        | 0,55        | 0,59        |
|           | o. Peternakan dan Hasilnya                            | 1,33                         | 1,15        | 1,17        | 1,17        | 1,17        |
|           | d. Kehutanan  | 1,41                         | 1,49        | 1,53        | 1,47        | 1,42        |
|           | e. Perikanan  | 1,17                         | 0,98        | 0,99        | 0,98        | 0,97        |
| <b>2.</b> | <b>PERTAMBANGAN &amp; PENGGALIAN</b>                  | <b>0,3</b>                   | <b>0,44</b> | <b>0,39</b> | <b>0,43</b> | <b>0,48</b> |
|           | a. Minyak dan Gas Bumi                                | -                            | -           | -           | -           | -           |
|           | o. Pertambangan Tanpa Migas                           | -                            | -           | -           | -           | -           |
|           | o. Penggalian   | 1,21                         | 1,53        | 1,53        | 1,35        | 1,32        |
| <b>3.</b> | <b>INDUSTRI PENGOLAHAN</b>                            | <b>0,51</b>                  | <b>0,48</b> | <b>0,49</b> | <b>0,47</b> | <b>0,44</b> |
|           | a. Industri Migas                                     | -                            | -           | -           | -           | -           |
|           | 1. Pengilangan Minyak Bumi                            | -                            | -           | -           | -           | -           |
|           | 2. Gas Alam Cair                                      | -                            | -           | -           | -           | -           |
|           | o. Industri Tanpa Migas                               | 0,90                         | 0,68        | 0,65        | 0,64        | 0,72        |
| <b>4.</b> | <b>LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH</b>                    | <b>0,51</b>                  | <b>0,48</b> | <b>0,49</b> | <b>0,47</b> | <b>0,44</b> |
|           | a. Listrik  | 0,50                         | 0,48        | 0,49        | 0,48        | 0,45        |
|           | b. Gas  | -                            | -           | -           | -           | -           |
|           | c. Air Bersih   | 0,45                         | 0,34        | 0,38        | 0,34        | 0,34        |
| <b>5.</b> | <b>KONSTRUKSI/BANGUNAN</b>                            | <b>0,96</b>                  | <b>1,01</b> | <b>1,00</b> | <b>0,97</b> | <b>0,93</b> |
| <b>6.</b> | <b>PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN</b>                | <b>1,21</b>                  | <b>1,40</b> | <b>1,41</b> | <b>1,36</b> | <b>1,28</b> |
|           | a. Perdagangan Besar & Eceran                         | 1,21                         | 1,40        | 1,41        | 1,37        | 1,29        |
|           | b. Hotel  | 0,24                         | 0,36        | 0,40        | 0,36        | 0,38        |
|           | c. Restoran   | 0,89                         | 1,02        | 1,03        | 1,09        | 0,99        |
| <b>7.</b> | <b>PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI</b>                    | <b>0,43</b>                  | <b>0,46</b> | <b>0,47</b> | <b>0,47</b> | <b>0,43</b> |
|           | a. Pengangkutan                                       | 0,42                         | 0,44        | 0,45        | 0,46        | 0,42        |
|           | 1) Angkutan Rel                                       | -                            | -           | -           | -           | -           |
|           | 2) Angkutan Jalan Raya                                | 0,48                         | 0,51        | 0,52        | 0,54        | 0,51        |
|           | 3) Angkutan Laut                                      | 0,23                         | 0,21        | 0,21        | 0,22        | 0,21        |
|           | 4) Angkt Sungai, Danau & Penyeberangan                | 1,16                         | 0,83        | 0,93        | 1,10        | 1,06        |
|           | 5) Angkutan Udara                                     | -                            | -           | -           | -           | -           |
|           | 6) Jasa Penunjang                                     | 0,48                         | 0,50        | 0,53        | 0,54        | 0,53        |
|           | b. Kominikasi   | 0,51                         | 0,54        | 0,56        | 0,52        | 0,48        |
| <b>8.</b> | <b>KEUANGAN, PERSEWAAN &amp; JASA PERUSAHAAN</b>      | <b>0,96</b>                  | <b>1,00</b> | <b>0,99</b> | <b>1,00</b> | <b>1,03</b> |
|           | a. Bank   | 0,88                         | 0,90        | 0,90        | 0,94        | 1,02        |
|           | b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank                        | 0,79                         | 0,95        | 0,95        | 0,89        | 0,89        |
|           | c. Jasa Penunjang Keuangan                            | -                            | -           | -           | -           | -           |
|           | d. Sewa Bangunan                                      | 1,14                         | 1,15        | 1,14        | 1,13        | 1,14        |
|           | e. Jasa Perusahaan                                    | 0,68                         | 0,73        | 0,75        | 0,68        | 0,67        |
| <b>9.</b> | <b>JASA-JASA</b>                                      | <b>1,36</b>                  | <b>1,44</b> | <b>1,46</b> | <b>1,45</b> | <b>1,46</b> |
|           | a. Pemerintahan Umum                                  | 1,39                         | 1,45        | 1,47        | 1,46        | 1,47        |
|           | b. Swasta   | 1,02                         | 1,23        | 1,27        | 1,33        | 1,28        |
|           | 1) Sosial Masyarakat                                  | 0,99                         | 1,28        | 1,28        | 1,28        | 1,25        |
|           | 2) Hiburan Dan rekreasi                               | 0,76                         | 0,95        | 1,02        | 1,21        | 1,35        |
|           | 3) Perorangan dan rumah Tangga                        | 1,02                         | 1,22        | 1,27        | 1,33        | 1,28        |

Sumber : Data Primer Diolah 2011.

Berdasarkan hasil perhitungan LQ Kabupaten Muna terhadap Propinsi Sulawesi Tenggara periode tahun 2005 – 2009 seperti pada tabel 5.2 tersebut, jika dibandingkan dengan Propinsi Sulawesi Tenggara, maka Kabupaten Muna memiliki beberapa sektor basis antara lain sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa.

### 1. Sektor pertanian

Sektor pertanian sebagai sektor yang memberikan kontribusi terbesar memiliki beberapa sub sektor dengan nilai LQ lebih besar dari satu ( $LQ > 1$ ) diantaranya sektor usaha tanaman pangan dengan nilai LQ 1,51 pada tahun 2008 dan tahun 2009 sebesar 1,52. Sub sektor peternakan, pada tahun 2008 dan 2009 sebesar 1,17, kehutanan di tahun 2008 bernilai 1,47 dan di tahun 2009 sebesar 1,42. perikanan juga memiliki nilai LQ lebih besar dari satu yaitu 1,17 tahun 2005 dan 1,42 tahun 2009. Selain sub sektor tanaman perkebunan dengan nilai LQ kurang dari satu ( $LQ < 1$ ), yaitu 0,55 pada tahun 2008 dan 0,59 tahun 2009 sektor pertanian dapat dijadikan sektor basis. Lebih rinci dari nilai LQ pada sektor pertanian dapat dilihat pada Gambar 5.1 berikut :



Gambar 5.1 LQ Sektor Pertanian Kabupaten Muna Dalam Lingkungan Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2009.

Sumber : Data Primer Diolah 2011

Sektor ini merupakan salah satu sektor andalan dalam struktur perekonomian Kabupaten Muna, sebab hingga tahun 2009 masih merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam penciptaan PDRB, yaitu 35,67 persen, ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Muna masih tergantung pada kegiatan sektor pertanian. seperti terlihat pada tabel 5.3 berikut,

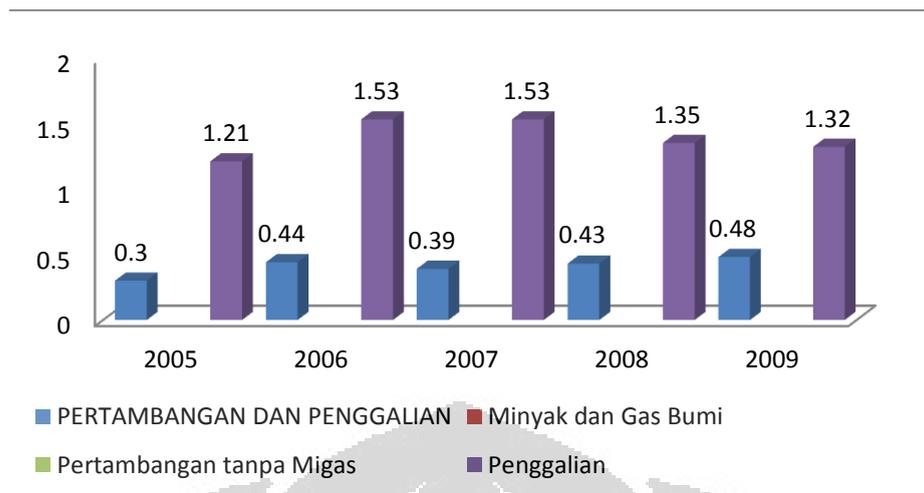
Tabel 5.3 Peranan Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Muna Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2005 – 2009

| No | S e k t o r             | 2005         | 2006         | 2007         | 2008         | 2009         |
|----|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|    | <b><i>PERTANIAN</i></b> | <b>44,27</b> | <b>39,45</b> | <b>37,75</b> | <b>36,88</b> | <b>35,67</b> |
| 1. | Tanaman Bahan Makanan   | 13,60        | 13,52        | 12,65        | 12,32        | 11,50        |
| 2. | Tanaman Perkebunan      | 8,22         | 6,35         | 5,72         | 5,78         | 5,46         |
| 3. | Peternakan dan Hasilnya | 8,01         | 6,86         | 6,79         | 6,78         | 6,73         |
| 4. | Kehutanan               | 2,17         | 2,23         | 2,20         | 2,20         | 2,10         |
| 5. | Perikanan               | 12,27        | 10,49        | 10,39        | 9,79         | 9,89         |

Sumber : PDRB Kabupaten Muna 2005-2009

## 2. Sektor pertambangan dan penggalian

Selain sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian juga merupakan sektor basis. Sektor ini meliputi sub sektor pertambangan migas, pertambangan tanpa migas dan sub sektor penggalian. Oleh karena Kabupaten Muna tidak memiliki sub sektor pertambangan baik migas maupun non migas, maka sektor ini hanya mencakup sub sektor penggalian dengan nilai LQ sebesar 1,35 pada tahun 2008 dan 1,32 pada tahun 2009, seperti pada Gambar 5.2. berikut :



Gambar 5.2 LQ Sektor Pertambangan dan Penggalian Kabupaten Muna Dalam Lingkungan Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 – 2009

Sumber : Data Primer Diolah 2011

Sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Muna tahun 2009, seperti yang disajikan pada tabel 5.4, mengalami pertumbuhan sebesar 18,23 persen lebih tinggi dibanding tahun 2008 yang tumbuh 7,21 persen. Pertumbuhan pada sektor ini disebabkan oleh naiknya produksi penggalian golongan C yang merupakan salah satu komponen bahan bangunan dan konstruksi. Sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian tahun 2009 juga diikuti dengan naiknya kontribusi pada sektor ini, yaitu dari 2,13 persen tahun 2008 menjadi 2,26 persen tahun 2009.

Tabel 5.4 Peranan dan Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian Kabupaten Muna Tahun 2005 – 2009 ( Persen )

| No | S e k t o r                        | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009  |
|----|------------------------------------|------|------|------|------|-------|
|    | <i>PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN</i> | 0,3  | 0,44 | 0,39 | 0,43 | 0,48  |
| 1. | Pertumbuhan                        | 8,70 | 0,89 | 9,41 | 7,21 | 18,23 |
| 2. | Kontribusi Sektor                  | 1,67 | 2,03 | 2,03 | 2,13 | 2,26  |

Sumber : PDRB Kabupaten Muna 2005-2009

### 3. Sektor industri pengolahan

Sektor industri pengolahan yang terdiri dari sub sektor industri pengolahan migas dan tanpa migas, tetapi untuk kondisi Kabupaten Muna hanya menganalisa mengenai sektor tanpa migas. Sektor ini bukan merupakan sektor basis, hal ini seperti dijelaskan pada tabel 5.5, dengan nilai LQ sebagai berikut :

Tabel 5.5 LQ Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Muna Dalam Lingkungan Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 – 2009

| No | Lapangan Usaha             | Nilai LQ |      |      |      |      |
|----|----------------------------|----------|------|------|------|------|
|    |                            | 2005     | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|    | Industri Pengolahan :      | 0,90     | 0,68 | 0,65 | 0,64 | 0,72 |
| 1. | Industri Migas             | -        | -    | -    | -    | -    |
|    | a. Pengilangan Minyak Bumi | -        | -    | -    | -    | -    |
|    | b. Gas Alam Cair           | -        | -    | -    | -    | -    |
| 2. | Industri Tanpa Migas       | 0,89     | 0,67 | 0,65 | 0,63 | 0,72 |

Sumber : Data Primer Diolah 2011

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian Kabupaten Muna disajikan pada tabel 5.6, Pada tahun 2009 kontribusi sektor ini sama dengan tahun 2008, yaitu sebesar 4,08 persen lebih rendah dibanding tahun 2007 sebesar 4,33 persen. Tahun 2005 kontribusi sektor ini sebesar 4,88 persen menurun menjadi 4,30 persen pada tahun 2006. Kontribusi yang paling besar dari industri pengolahan tahun 2009 berasal dari industri makanan, minuman dan tembakau yaitu sebesar 2,30 persen dan barang dari kayu dan hasil hutan lainnya sebesar 1,44 persen .

Tabel 5.6 Peranan Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kabupaten Muna Tahun 2005 – 2009 (Persen)

| No                           | S e k t o r                            | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|------------------------------|--|------|------|------|------|------|
| <i>IINDUSTRI TANPA MIGAS</i> |  | 4,88 | 4,30 | 4,33 | 4,08 | 4,08 |
| 1.                           | Makanan, Minuman dan Tembakau          | 2,73 | 2,32 | 2,46 | 2,27 | 2,30 |
| 2.                           | Tekstil, barang dari kulit & alas kaki | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 3.                           | Barang dari kayu & hasil hutan lainnya | 1,73 | 1,63 | 1,53 | 1,49 | 1,44 |
| 4.                           | Semen & barang galian bukan logam      | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 |
| 5.                           | Logam dasar, besi & baja               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 6.                           | Alat angkutan, mesin & peralatannya    | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 7.                           | Barang lainnya.                        | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 |

Sumber : PDRB Kabupaten Muna 2005-2009

#### 4. Listrik, Gas dan Air Bersih

Sama halnya dengan sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air Bbersih bukan merupakan sektor basis daerah, Sektor ini terdiri dari beberapa subsektor dengan nilai LQ seperti pada tabel 5.7 berikut :

Tabel 5.7 LQ Sektor Listrik dan Air Bersih Dalam Lingkungan Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 – 2009.

| No                            | Lapangan Usaha | Nilai LQ |      |      |      |      |
|-------------------------------|----------------|----------|------|------|------|------|
|                               |                | 2005     | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Listrik, Gas dan Air Bersih : |                | 0,51     | 0,48 | 0,49 | 0,47 | 0,44 |
| 1.                            | L i s t r i k  | 0,50     | 0,48 | 0,49 | 0,47 | 0,44 |
| 2.                            | G a s          |          |      |      |      |      |
| 3.                            | Air Bersih     | 0,45     | 0,34 | 0,38 | 0,34 | 0,34 |

Sumber : Data Primer Diolah 2011

Dalam hal peranan terhadap struktur perekonomian Kabupaten Muna, secara keseluruhan sektor listrik dan air bersih merupakan sektor ekonomi yang memberikan kontribusi terkecil dibanding dengan sektor ekonomi lainnya. Seperti terlihat pada tabel 5.8, kontribusi sektor ini tahun 2009 sebesar 0,41 persen sama dengan kontribusi di tahun 2008. Kontribusi sektor ini berasal dari listrik sebesar 0,38 persen dan sub sektor air bersih sebesar 0,03 persen.

Tabel 5.8 Peranan Sektor Listrik dan Air Bersih Terhadap PDRB Kabupaten Muna Tahun 2005 – 2009 (Persen)

| No   | S e k t o r   | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|--|---------------|------|------|------|------|------|
| <i>L I S T R I K   D A N   A I R   B E R S I H</i> |               | 0,51 | 0,47 | 0,44 | 0,41 | 0,41 |
| 1.   | L i s t r i k | 0,49 | 0,45 | 0,42 | 0,38 | 0,38 |
| 2..  | Air Bersih    | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |

Sumber : PDRB Kabupaten Muna 2005-2009

#### 5. Kontruksi/ Bangunan.

Sektor Kontruksi/bangunan dalam lima tahun terakhir yakni tahun 2005-2006 memiliki nilai LQ yang beragam. Tahun 2005 memiliki nilai LQ dibawah satu yakni sebesar 0,96. Untuk tahun 2006 dan 2007 masuk dalam kategori sektor basis yaitu sebesar 1,01 dan 1,00 dan selanjutnya sampai dengan tahun 2009 sektor ini bukan lagi menjadi sektor basis dengan nilai sebesar 0,97 dan 0,93, seperti pada tabel berikut 5.9 berikut :

Tabel 5.9 LQ Sektor Konstruksi/Bangunan Kab. Muna Dalam Lingkungan Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 – 2009

| No                    | Lapangan Usaha | Nilai LQ |      |      |      |      |
|-----------------------|----------------|----------|------|------|------|------|
|                       |                | 2005     | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Konstruksi/Bangunan : |                | 0,96     | 0,10 | 1,00 | 0,97 | 0,93 |

Sumber : Data Primer Diolah 2011

Kontribusi sektor konstruksi/bangunan selama tahun 2009 seperti pada tabel 5.9, menempati urutan keempat dalam pembentukan PDRB Kabupaten Muna yaitu sebesar 7,39 persen setelah sektor pertanian, sektor jasa-jasa dan sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Kontribusi sektor ini menurun dibanding tahun 2008 yang mencapai sebesar 7,42 persen. Tahun 2005 sektor konstruksi/bangunan memberikan kontribusi sebesar 6,70 persen naik menjadi 6,92 persen tahun 2006 dan tahun 2007 naik secara signifikan yaitu sebesar 7,19 persen, seperti disajikan pada table 5.10 berikut:

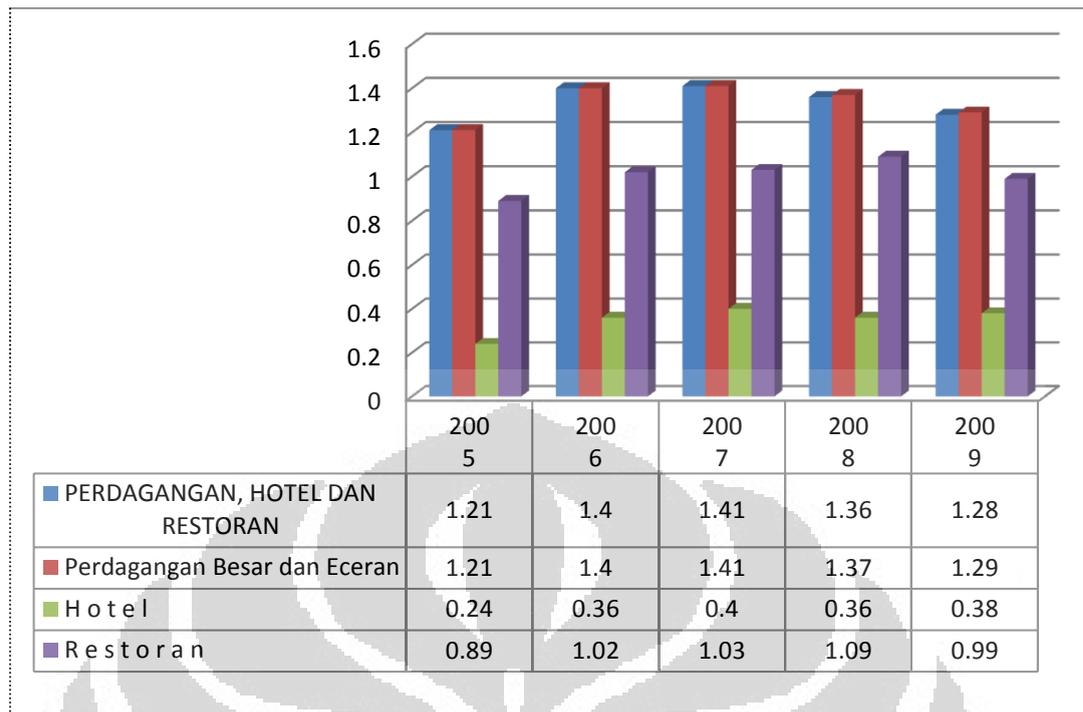
Tabel 5.10 Peranan Sektor Konstruksi/Bangunan Terhadap PDRB Kabupaten Muna Tahun 2005 – 2009 (Persen)

| No | S e k t o r                | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|----|----------------------------|------|------|------|------|------|
|    | <i>KONSTRUKSI/BANGUNAN</i> | 6,70 | 6,92 | 7,19 | 7,42 | 7,39 |

Sumber : PDRB Kabupaten Muna 2005-2009

#### 6. *Perdagangan, hotel dan restoran*

Selanjutnya adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran yang juga merupakan sektor basis, khususnya pada sub sektor perdagangan besar dan eceran, seperti pada gambar 5.3 dengan nilai LQ sebesar 1,37 pada tahun 2008 dan di tahun 2009 sebesar 1,29. Sub sektor lain yang menjadi basis adalah restoran dengan nilai LQ sebesar 1,09 pada tahun 2008, tetapi sub sektor ini di tahun 2009 tidak lagi menjadi sektor basis.



Gambar 5.3 LQ Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Kabupaten Muna Dalam Lingkungan Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 – 2009

Sumber : Data primer diolah 2011

Sub sektor perdagangan besar dan eceran ini sangat berperan dalam menunjang kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk barang dan jasa. Laju pertumbuhan sektor ini diakibatkan oleh sektor pertanian serta permintaan domestik yang menjadi komponen dalam pembentukan sub sektor perdagangan besar dan eceran.

Sektor perdagangan sebagai sektor jasa penghubung antara produsen dan konsumen memperoleh sumbangan terbesar dari sub sektor perdagangan besar dan eceran yaitu sebesar 21,24 persen di tahun 2009 dan mengalami peningkatan dibanding tahun 2008 sebesar 21,06 persen. Walaupun pertumbuhan sub sektor hotel dan restoran cukup signifikan selama lima tahun terakhir, namun kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Muna belum memberikan kontribusi yang berarti, seperti yang disajikan pada table 5.11 berikut :

Tabel 5.11 Peranan Sektor Perdagangan Hotel dan Restoran Terhadap PDRB Kabupaten Muna Tahun 2005 – 2009 (Persen)

| No | S e k t o r                            | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  |
|----|--|-------|-------|-------|-------|-------|
|    | <i>PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN</i> | 16,72 | 19,48 | 20,97 | 21,45 | 21,64 |
| 1. | Perdagangan                            | 16,42 | 19,14 | 20,62 | 21,06 | 21,24 |
| 2. | Hotel                                  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  |
| 3. | Restoran                               | 0,29  | 0,33  | 0,34  | 0,38  | 0,39  |

Sumber : Kabupaten Muna Dalam Angka 2005-2009

### 7. Pengangkutan Dan Komunikasi

Untuk sektor pengangkutan dan komunikasi, hanya sub sektor angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang menjadi basis. Pada tahun 2008 sub sektor ini mempunyai nilai LQ sebesar 1,10 dan di tahun 2009 sebesar 1,06. Pertumbuhan sub sektor ini di tahun 2008 sebesar 18,65 persen dan di tahun 2009 naik menjadi 21,01 persen, seperti terlihat pada tabel 5.12, hal ini didukung oleh adanya pelabuhan feri yang melayani pelayaran antara Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan dan Kabupaten Muna.

Tabel 5.12 LQ Sektor Pengangkutan Dan Komunikasi Tahun 2005 – 2009

| No | Lapangan Usaha                       | Nilai LQ Kab. Muna |      |      |      |      |
|----|--------------------------------------|--------------------|------|------|------|------|
|    |                                      | 2005               | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|    | Pengangkutan Dan Komunikasi :        | 0,43               | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,43 |
| 1. | Pengangkutan                         | 0,42               | 0,44 | 0,45 | 0,46 | 0,42 |
|    | a.Angkutan Jalan Raya                | 0,48               | 0,51 | 0,52 | 0,54 | 0,51 |
|    | b.Angkutan Laut                      | 0,23               | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,21 |
|    | c.Angk Sungai, Danau & Penyeberangan | 1,16               | 0,83 | 0,93 | 1,10 | 1,06 |
|    | d.Jasa Penunjang                     | 0,48               | 0,50 | 0,53 | 0,54 | 0,53 |
| 2. | Komunikasi                           | 0,51               | 0,54 | 0,56 | 0,52 | 0,48 |

Sumber : Data Primer Diolah 2011

Seiring dengan melambatnya pertumbuhan sub sektor angkutan tahun 2009, diikuti pula dengan menurunnya kontribusi sektor pengangkutan terhadap total PDRB Kabupaten Muna. Pada tahun yang sama kontribusi sub sektor pengangkutan sebesar 3,47 persen terjadi penurunan di banding tahun 2008 sebesar 3,56 persen. Kontribusi sub sektor ini di tahun 2009 berasal dari angkutan jalan raya sebesar 3,06 persen, angkutan laut 0,08 persen, angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebesar 0,04 persen dan sub sektor jasa penunjang angkutan sebesar 0,29 persen. Seperti pada disajikan pada tabel 5.13 berikut :

Tabel 5.13 Peranan Sektor Angkutan dan Komunikasi Terhadap PDRB Kabupaten Muna Tahun 2005 – 2009 (Persen)

| No | S e k t o r                                 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|----|---|------|------|------|------|------|
|    | <i>ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI</i>              | 3,27 | 3,51 | 3,85 | 4,01 | 3,93 |
| a. | Pengangkutan.                               | 2,89 | 3,08 | 3,38 | 3,56 | 3,47 |
|    | 1. Angkutan Rel                             | -    | -    | -    | -    | -    |
|    | 2. Angkutan Jalan Raya                      | 2,55 | 2,75 | 3,00 | 3,17 | 3,06 |
|    | 3. Angkutan Laut                            | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|    | 4. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|    | 5. Angkutan Udara                           | -    | -    | -    | -    | -    |
|    | 6. Jasa Penunjang                           | 0,22 | 0,21 | 0,26 | 0,27 | 0,29 |
| b. | Komunikasi                                  | 0,39 | 0,43 | 0,47 | 0,45 | 0,46 |

Sumber : Kabupaten Muna Dalam Angka 2005-2009

#### 8. *Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.*

Untuk sektor finansial dalam hal ini keuangan, persewaan dan jasa perusahaan terdapat dua sub sektor yang tergolong dalam sektor basis yaitu sub sektor bank dengan nilai LQ sebesar 1,02 di tahun 2009 dan sub sektor sewa bangunan dengan nilai LQ masing-masing sebesar 1,13 dan 1,14 pada tahun 2008 dan 2009. Secara umum kegiatan utamanya berhubungan dengan kegiatan

pengelolaan keuangan berupa penarikan dana dari masyarakat maupun pengalirannya (penyalurannya) kembali. Ini berarti bahwa sub sektor perbankan di Kabupaten Muna berperan lebih besar terhadap pendapatan daerahnya dibanding propinsi Sulawesi Tenggara. Tabel 5.14 berikut memperlihatkan nilai LQ sektor finansila Kabupaten Muna .

Tabel 5.14 LQ Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Dalam Lingkungan Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 – 2009

| No | Lapangan Usaha                         | Nilai LQ Kab. Muna |      |      |      |      |
|----|--|--------------------|------|------|------|------|
|    |  | 2005               | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|    | Keuangan, Persewaan &Jasa Perusahaan : | 0,96               | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,03 |
| 1. | B a n k                                | 0,88               | 0,90 | 0,90 | 0,94 | 1,02 |
| 2. | Lembaga Keuangan tanpa Bank            | 0,79               | 0,95 | 0,95 | 0,89 | 0,89 |
| 3. | Sewa Bangunan                          | 1,14               | 1,15 | 1,14 | 1,13 | 1,14 |
| 4. | Jasa Perusahaan                        | 0,68               | 0,73 | 0,75 | 0,68 | 0,67 |

Sumber : Data Primer Diolah 2011

Dilihat dari kontribusi sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan tahun 2009 menyumbang 5,75 persen sedikit meningkat dibanding tahun 2008 yaitu sebesar 5,64 persen. Jika dilihat dari sub sektornya porsi terbesar diberikan oleh sub sektor sewa bangunan yaitu 2,53 persen tahun 2009 menurun dibanding tahun 2008 sebesar 2,55 persen. Disamping itu sub sektor bank juga memberi porsi sebesar 2,49 persen pada tahun 2009 mengalami peningkatan dibanding tahun 2008 sebesar 2,32 persen, sedangkan sub sektor lembaga keungan tanpa bank dan sub sektor jasa perusahaan kontribusinya masih dibawah satu persen yaitu di tahun 2009 masing-masing sebesar 0,38 persen dan 0,33 persen, seperti pada tabel 5.15 berikut :

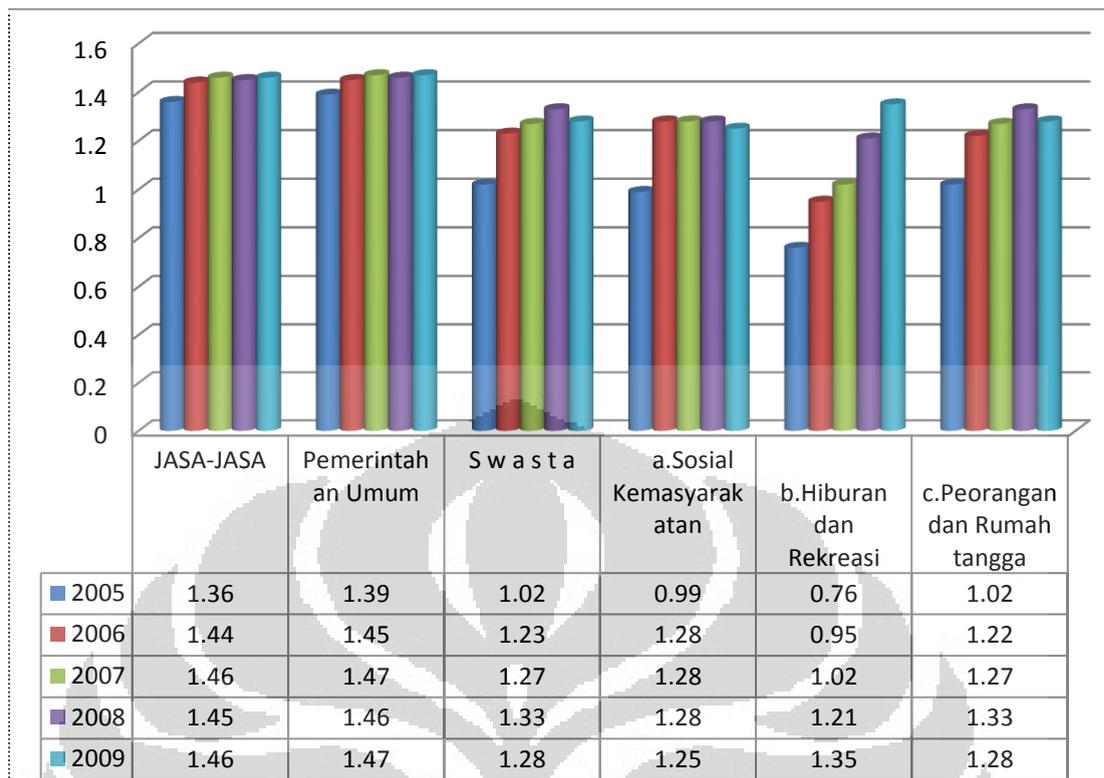
Tabel 5.15 Peranan Sektor Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan Terhadap PDRB Kabupaten Muna Tahun 2005 – 2009 (Persen )

| No   | S e k t o r                 | 2005        | 2006        | 2007        | 2008        | 2009        |
|--|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN</b> |                             | <b>4,68</b> | <b>5,55</b> | <b>5,28</b> | <b>5,64</b> | <b>5,74</b> |
| 1.   | B a n k                     | 1,25        | 1,99        | 2,08        | 2,32        | 2,49        |
| 2.   | Lembaga Keuangan Tanpa Bank | 0,32        | 0,42        | 0,40        | 0,41        | 0,38        |
| 3.   | Jasa Penunjang Keuangan     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4.   | Sewa Bangunan               | 2,77        | 2,78        | 2,45        | 2,55        | 2,53        |
| 5.   | Jasa Perusahaan             | 0,33        | 0,35        | 0,34        | 0,36        | 0,33        |

Sumber : Kabupaten Muna Dalam Angka 2005-2009

### 9. *J a s a - j a s a.*

Sebagai sektor yang memberikan kontribusi terbesar ketiga setelah sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sektor jasa-jasa mengklasifikasikan sub sektornya secara keseluruhan sebagai sektor basis seperti disajikan pada gambar 5.4, pada sub sektor pemerintahan umum di tahun 2008 dan 2009 mempunyai nilai LQ masing-masing sebesar 1,45 dan 1,46, sedangkan untuk sub sektor swasta yang terdiri dari sub sektor sosial kemasyarakatan dengan nilai LQ sebesar 1,33 dan 1,28, sub sektor hiburan dan rekreasi memiliki nilai LQ sebesar 1,28 dan 1,25 serta sub sektor perorangan dan rumah tangga dengan nilai LQ sebesar 1,33 dan 1,28.



Gambar 5.4 LQ Sektor Jasa-Jasa Kabupaten Muna Tahun 2005 – 2009.

Sumber : Data diolah 2011

Meningkatnya pertumbuhan sub sektor pemerintahan umum sebagai akibat terus meningkatnya pengeluaran pemerintah dan belanja pegawai, sedangkan sub sektor jasa-jasa didorong oleh meningkatnya jasa sosial kemasyarakatan, jasa hiburan serta jasa perorangan dan rumah tangga.

Table 5.16 berikut ini, memperlihatkan kontribusi sektor jasa-jasa dalam perekonomian Kabupaten Muna. Sektor ini dalam struktur perekonomian daerah mengalami peningkatan dibanding tahun 2008 dan merupakan penyumbang terbesar ketiga setelah sektor pertanian dan sektor perdagangan. Tahun 2009 sektor ini memberikan kontribusi 18,88 persen lebih tinggi dibanding tahun 2008 sebesar 17,98 persen.

Tabel 5.16 Peranan Sektor Jasa-Jasa Terhadap PDRB Kabupaten Muna Tahun 2005-2009 (Persen)

| No | S e k t o r            | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  |
|----|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    | JASA - JASA            | 17,29 | 18,29 | 18,26 | 17,98 | 18,88 |
| 1. | Jasa Pemerintahan Umum | 16,25 | 17,02 | 16,90 | 16,59 | 17,41 |
| 5. | Jasa Swasta            | 16,04 | 1,26  | 1,26  | 1,39  | 1,48  |

Sumber : Kabupaten Muna Dalam Angka 2005-2009

Kontribusi terbesar diberikan oleh sektor pemerintahan umum dimana pada tahun 2009 sebesar 17,41 persen meningkat dibanding tahun 2008 sebesar 16,59 persen. Sedangkan kontribusi sub sektor jasa swasta tahun 2009 memberikan porsi sebesar 1,48 persen juga meningkat dibanding tahun 2008 sebesar 1,39 persen. Meskipun peranannya kecil, namun dalam perkembangannya sub sektor jasa swasta diharapkan akan mampu menjadi faktor penting terutama sebagai pendukung aktifitas perekonomian dan permintaan domestik yang terus meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat.

### 5.3. Analisis Typology Klassen.

Setelah diketahui kondisi dan potensi sektor-sektor ekonomi baik basis maupun non basis, kemudian menentukan prioritas pengembangan sektor-sektor tersebut dengan menjabarkannya melalui suatu tipologi yang disebut dengan Tipologi Klassen (Klassen Typology).

Tipologi Klassen yang dibuat dalam analisis ini yaitu dengan menggunakan hasil perhitungan indeks LQ dan komponen Differential Shift (Sd), dengan tujuan untuk mengetahui karakteristik tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi pada daerah Kabupaten Muna . Tipologi ini mengklasifikasikan sektor basis dan non basis dengan pertumbuhan cepat atau lambat yang memiliki empat tipe yaitu :

- Tipe I : Sektor basis dengan pertumbuhan cepat
- Tipe II : Sektor basis dengan pertumbuhan lambat

- Tipe III : Sektor non basis dengan pertumbuhan cepat
- Tipe IV : Sektor non basis dengan pertumbuhan cepat

Tipologi I merupakan sektor yang sangat potensial untuk dikembangkan, sektor tersebut memiliki  $LQ > 1$  dan komponen  $Dj > 0$ . Sektor yang termasuk dalam Tipologi II cukup berpotensi untuk dikembangkan, karena sektor tersebut merupakan sektor basis dengan indeks  $LQ > 1$  walaupun nilai  $Dj < 0$ . Pada tipologi III sektor ini berpotensi untuk dikembangkan, karena memiliki nilai  $Dj > 0$  walaupun bukan sektor basis dengan indeks  $LQ < 1$ . Pada tipologi IV sektor ini tidak berpotensi untuk dikembangkan karena bukan merupakan sektor basis dengan indeks  $LQ < 1$  dan nilai komponen  $Dj < 0$ . Untuk mengetahui pembagian sektor menurut tipologinya dapat dilihat pada tabel 5.17 berikut :

Tabel 5.17 Pembagian Sektor Ekonomi Kabupaten Muna Menurut Tipologinya Tahun 2005-2009

| Tipologi | Sektor                                  | Indeks LQ Rata-Rata | Nilai (Sd) Rata-Rata |
|----------|---|---------------------|----------------------|
| I        | Perdagangan Hotel Dan Restoran          | 1,05                | 4.371,69             |
| II       | Pertanian                               | 1,45                | -10.571,53           |
|          | Jasa-Jasa                               | 1,43                | -854,23              |
| III      | Industri Pengolahan                     | 0,53                | 2.638,83             |
|          | Listrik, Gas, & Air Bersih              | 0,47                | 70,48                |
|          | Bangunan                                | 0,77                | 2.112,78             |
|          | Pengangkutan Dan Komunikasi             | 0,45                | 1.540,81             |
|          | Keuangan, persewaan Dan Jasa Perusahaan | 0,59                | 2.129,56             |
| IV       | Pertambangan dan Peggallian             | 0,40                | -489,58              |

Sumber : Data Primer diolah 2012

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa sektor-sektor yang termasuk tipologi I adalah sektor perdagangan hotel dan restoran, dimana sektor-sektor

tersebut merupakan sektor basis sekaligus pertumbuhannya cepat sehingga dapat menjadi sektor yang strategis untuk dikembangkan lebih lanjut.

Sedangkan sektor-sektor ekonomi yang termasuk tipologi II adalah sektor pertanian dan sector jasa-jasa . Sektor ini mempunyai nilai  $LQ > 1$  yang berarti merupakan sektor basis namun karena pertumbuhannya lambat maka perlu perhatian dari pemerintah, karena sektor ini cukup berpotensi untuk dikembangkan.

Untuk tipologi III yaitu sektor Industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan, pengangkutan dan kominikasi serta keuangan , persewaan dan jasa perusahaan. Sektor ini layak untuk dikembangkan menjadi sektor basis berdasarkan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Dan yang termasuk tipologi IV adalah spertambangan dan penggalian. Sektor ini dianggap tidak berpotensi karena bukan merupakan sektor basis dan pertumbuhan ekonominya lambat.

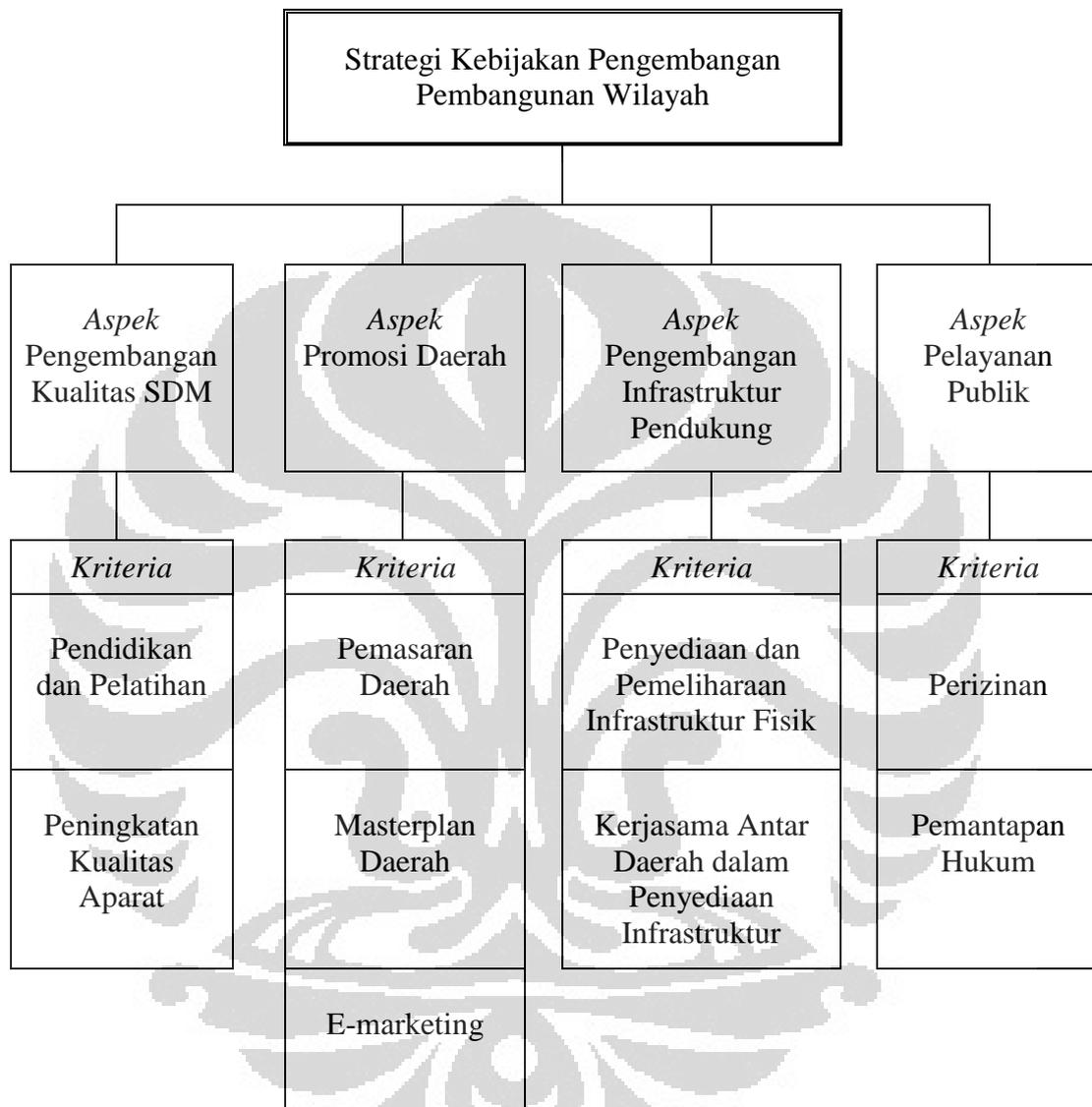
Jadi dari keseluruhan sektor tersebut ada satu sektor ekonomi yang sangat berpotensi untuk dikembangkan yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran dan ada dua sektor yang potensial untuk dikembangkan yaitu pertanian dan jasa-jasa serta ada lima sektor yang perlu untuk dikembangkan lebih lanjut yaitu sektor industry pengolahan, listrik gas dan air bersih, bangunan, pengangkutan dan komunikasi dan keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

#### **5.4. Analisis Strategi Kebijakan Pengembangan Pembangunan Wilayah ( Analisis Dengan Metode AHP ).**

##### **5.4.1. Penyusunan Hirarki Dan Kuesioner.**

Tahap awal dalam metode AHP adalah penyusunan hirarki atau lazim disebut dekomposisi. Melalui proses dekomposisi suatu permasalahan yang kompleks dan tidak terstruktur diuraikan menjadi kelompok-kelompok yang homogen dan kemudian menyusunnya ke dalam suatu hirarki. Hirarki tersebut merupakan dasar penelitian terhadap aspirasi atau penilaian berbagai pihak yang ikut berperan dalam upaya pengembangan pembangunan wilayah Kabupaten Muna. Penyusunan hirarki pada penelitian ini didasarkan pada permasalahan umum dan kondisi perekonomian Kabupaten Muna. Hirarki dari strategi kebijakan tersebut telah disusun melalui pendekatan AHP ( seperti pada gambar 5.5).

Berdasarkan pembagian jenis hirarki yang ada, maka hirarki pada gambar berikut merupakan hirarki yang saling berhubungan, dimana setiap hirarki pada suatu level berhubungan dengan hirarki pada level di atasnya.



Gambar 3.1 Hirarki Strategi Kebijakan Pengembangan Pembangunan Wilayah.

Sumber : Kuesioner Responden 2011

Bentuk dan struktur dari hirarki dalam pembuatan prioritas kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tingkat pertama adalah tujuan keputusan (Goal).

Dalam analisis ini yang menjadi tujuan keputusan (goal) dari penyusunan hirarki adalah strategi kebijakan pengembangan pembangunan wilayah yang didasarkan pada kondisi dari struktur perekonomian kabupaten Muna.

2. Tingkatan kedua adalah :

Aspek strategi kebijakan dalam rangka pengembangan pembangunan wilayah yang terdiri dari empat aspek, yaitu :

a. Aspek Pengembangan sumber daya manusia.

Penentuan aspek pengembangan sumber daya manusia ini didasarkan pada fakta terhadap tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Muna masih relatif rendah yakni sekitar 77,32 persen penduduk memiliki pendidikan tertinggi hanya sampai tingkat SLTP atau lebih rendah dan jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas dengan jumlah sekitar 28,66 persen belum/tidak tamat sekolah dasar. Aspek pengembangan sumber daya manusia dalam penelitian ini dibagi dalam dua kriteria yaitu :

*a.1. Kriteria Pendidikan dan Pelatihan.*

Banyaknya jumlah yang bekerja diberbagai sektor lapangan usaha yaitu sebanyak 70,13 persen, menjadikan dasar bahwa dengan jumlah ini, maka sebaiknya perlu didukung dengan kualitas dari para pekerja yang bekerja di berbagai sector, sehingga hal ini dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian.

*a.2. Kriteria Peningkatan Kualitas Aparat.*

Kriteria ini dijadikan sebagai salah satu variabel yang dianggap penting dalam rangka pengembangan pembangunan wilayah dengan melihat kondisi jumlah pegawai di kabupaten Muna pada tahun 2009 yang mencapai 8.812 jiwa, dimana terdapat peningkatan sebanyak 1.154 jiwa dibanding tahun 2005 sejumlah 7.658 jiwa. Adanya perbedaan jumlah maupun klasifikasi tingkat pendidikan pegawai tahun 2005 dibandingkan tahun 2009 karena disesuaikan tingkat kebutuhan dalam rangka upaya-upaya perbaikan dalam pembangunan manusia yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Muna.

b. Aspek Promosi Daerah .

Aspek ini memberikan gambaran terkait dengan upaya pemerintah dalam mengembangkan potensi daerah melalui seluruh sektor usaha. Ini dilakukan dengan cara mempromosikan potensi tersebut baik pada tingkat lokal, nasional maupun manca negara, sehingga diharapkan dapat memberikan nilai tambah dalam upaya

pengembangan pembangunan wilayah. Aspek promosi daerah dalam penelitian ini memiliki tiga kriteria yaitu ;

*b.1. Kriteria masterplan daerah.*

Maksud dari kriteria masterplan ini adalah untuk memetakan berbagai macam potensi sumber daya yang ada di daerah. Potensi yang dimaksud adalah penyesuaian lokasi dengan potensi dari masing-masing sektor usaha yang dikembangkan. Sehingga masing-masing wilayah sudah mempunyai fokus terhadap berbagai jenis usahanya.

*b.2. Kriteria pemasaran daerah.*

Kriteria ini dimaksudkan agar daerah senantiasa giat dalam memasarkan hasil-hasil produksi dari berbagai macam sektor usahanya, membuka kegiatan berupa promosi daerah melalui pameran pembangunan sehingga dari kegiatan tersebut dapat tawarkan berbagai macam jenis-jenis produk dari berbagai sektor usaha .

*b.3. Kriteria e-marketing .*

Maksud dari ini adalah untuk mempromosikan berbagai jenis komoditi unggulan daerah terutama terkait dengan sektor basis dan non basis daerah melalui media internet. Menyikapi era globalisasi sekarang ini, maka sudah sepantasnya kehadiran promosi daerah melalui media internet.

*c. Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung.*

Melihat kondisi topografi Kabupaten Muna yang terdiri dari daratan dan beberapa pulau, maka aspek pengembangan infrastruktur pendukung dalam penelitian tesis ini dianggap penting, hal ini terkait dengan berbagai instalasi dan kemudahan dasar (terutama sistim transportasi dan komunikasi ) yang sangat diperlukan oleh masyarakat dalam melakukan aktivitas perekonomian dari suatu daerah kedaerah atau negara lain. Dua kriteria yang dianggap penting dari aspek pengembangan infrastruktur pendukung yaitu

*c.1. Kriteria Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur fisik*

Kriteria ini dimaksudkan bahwa dalam kegiatan usaha perlu didukung oleh ketersediaan fasilitas atau infrastruktur fisik seperti jalan raya, pelabuhan laut dan udara sarana komunikasi (telpon) dan sumber energi atau penerangan.

*c.2. Kriteria kerjasama antar daerah dalam penyediaan infrastruktur pendukung.*

Kriteria kerjasama antar daerah dalam penyediaan infrastruktur pendukung dianggap penting dalam penelitian tesis sebab untuk melengkapi berbagai macam keterbatasan terhadap infrastruktur pada suatu daerah, sehingga perlu diadakan kerjasama dengan daerah lain.

d. Aspek Pelayanan Publik.

Aspek pelayanan publik ini mengandung pengertian terhadap pelaksanaan suatu fungsi administrasi pemerintah dalam menyediakan pelayanan terhadap masyarakat. Dalam Aspek pelayanan publik ini terdapat dua kriteria yang dianggap penting dalam rangka pengembangan pembangunan wilayah meliputi :

*d.1. Kriteria perizinan.*

Pada prinsipnya prinsipnya kriteria ini terkait dengan peraturan/kebijakan daerah atau aturan main secara formal yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam mengatur aktifitas dunia usaha dan investasi

*d.2. Kriteria pemantapan hukum*

Pemahaman dari kriteria ini adalah situasi keamanan di daerah yang mempengaruhi kegiatan usaha yang dapat mendukung atau menghambat kegiatan usaha.

Penyusunan dari hirarki tersebut dimaksudkan untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan dengan memperhatikan seluruh elemen keputusan yang terlibat dalam sistem tersebut. Inti dari proses AHP adalah membandingkan tingkat prioritas beberapa aspek atau variabel pada suatu level dari suatu susunan hirarki berdasarkan persepsi atau penilaian dari beberapa responden yang dianggap ekspert pada bidangnya, khususnya penetapan strategi kebijakan dalam rangka pengembangan pembangunan wilayah di Kabupaten Muna

Dalam tesis ini penulis menggunakan lebih dari satu responden dengan pertimbangan agar proses pengambilan keputusan dengan metode AHP ini dapat dirumuskan dari berbagai sudut pandang terkait dengan proses pemilihan strategi yang akan menghasilkan suatu kebijakan publik yang berdampak pada banyak pihak.

Untuk keperluan analisa kebijakan tersebut, penulis menghubungi sepuluh orang responden yang terdiri dari para stakeholder antara lain :

1. Tokoh birokrasi dalam hal ini mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Muna (Sekda). Responden ini dipilih atas pertimbangan pengalaman yang bersangkutan dalam menjabat sebagai birokrat dan mengepalai semua instansi dinas dan badan sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan pembangunan wilayah di Kabupaten Muna.
2. Pihak yang mewakili wilayah kecamatan, dalam hal ini kepala wilayah kecamatan daratan dan kepala wilayah kecamatan kepulauan. Ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Muna terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan, sehingga keterwakilan dari kedua kepala wilayah ini dianggap relevan memberikan analisis mengenai kebijakan pengembangan pembangunan wilayah serta responden tersebut dianggap banyak memahami karakteristik masyarakat baik wilayah daratan maupun wilayah kepulauan.
3. Pihak DPRD sebagai mitra pemerintah, dengan pertimbangan bahwa responden ini dianggap banyak mengetahui tentang berbagai macam kebijakan terkait dengan regulasi, pengawasan dan anggaran sebagai tugas pokok.
4. Bappeda yang terdiri dari Ketua Bappeda dan Kepala Bidang Penyusunan Program. Responden ini dipilih dengan pertimbangan bahwa Bappeda merupakan suatu lembaga yang terkait dengan koordinasi berbagai macam litas sektoral, sehingga dianggap relevan untuk memberikan berbagai macam analisis terkait dengan kebijakan pengembangan pembangunan wilayah di Kabupaten Muna.
5. Pihak LSM, dengan pertimbangan bahwa lembaga ini dianggap sebagai organisasi yang sering terlibat langsung dengan berbagai macam lapisan masyarakat dalam berbagai macam kegiatan.
6. Akademisi, sebagai suatu lembaga yang menjalankan tridarma perguruan tinggi, sehingga berbagai macam bentuk penelitian yang selama ini telah dilakukan mampu disinergikan dengan kebijakan pengembangan pembangunan wilayah terutama di Kabupaten Muna.
7. Kalangan masyarakat, yang diambil dari dua kelompok yakni perwakilan dari pihak perempuan dan dari pihak generasi muda dengan pertimbangan bahwa diharapkan responden tersebut mampu melihat sisi lain berbagai macam aspek dan kriteria terhadap pengembangan pembangunan wilayah.

Daftar kuesioner dibuat dengan jelas dan sesederhana mungkin, sehingga diharapkan responden dapat memberikan penilaian terhadap beberapa variabel yang diperbandingkan dengan benar tanpa ada keragu-raguan. Bagian muka daftar kuesioner memuat penjelasan singkat penelitian, prinsip dasar metode AHP, hirarki pemilihan strategi kebijakan pengembangan pembangunan wilayah, petunjuk pengisian kuesioner AHP beserta skala penilaian satu sampai dengan sembilan (1- 9) serta beberapa contoh pengisian kuesioner AHP dengan mengacu pada salah satu level dalam hirarki. Adapun daftar kuesioner dimaksud disajikan pada *Lampiran 3* dibagian akhir penulisan tesis ini.

Selanjutnya dalam proses pengisian kuesioner, semua responden menerima dan menyetujui bentuk hirarki yang telah disusun seperti pada gambar 5.5 tersebut. Persepsi atau penilaian responden terhadap elemen-elemen pada hirarki tersebut dilakukan dengan cara pengisian yang terdapat pada lembaran kuesioner, kemudian responden dihubungi secara terpisah tanpa harus dikumpulkan pada suatu tempat.

#### **5.4.2. Aspek Prioritas Kebijakan Pengembangan Pembangunan Wilayah.**

Seperti telah dikemukakan dalam bagian sebelumnya, bahwa penelitian ini menggunakan 10 responden yang berkaitan langsung dengan analisis pengembangan pembangunan wilayah. Selanjutnya dilakukan perbandingan berpasangan antara beberapa aspek yang menjadi prioritas melalui sebuah matriks yang dinamakan matriks *pair-wise* (*Lampiran.5*). Tujuannya adalah untuk merumuskan berbagai prioritas kebijakan dalam rangka pengembangan pembangunan wilayah

Hasil penilaian atau perbandingan responden dari beberapa aspek tersebut kemudian diolah secara manual dengan menggunakan sebuah matriks. Selanjutnya diperoleh sebuah pembobotan prioritas yang menunjukkan hasil akhir dari beberapa aspek yang menjadi kebijakan prioritas. Bobot prioritas responden tersebut secara rata-rata ukur disajikan pada *lampiran 7* dibagian akhir tesis ini.

Dari hasil penghitungan matriks priority vector tersebut diperoleh skala prioritas dari masing-masing aspek. Pada aspek pertama dalam hal ini aspek pengembangan sumber daya manusia, para responden berkesimpulan bahwa aspek ini dianggap sangat prioritas dalam rangka pengembangan pembangunan wilayah

di Kabupaten Muna, dengan total nilai bobot sebesar 56,38 %, selanjutnya sebagai aspek yang dianggap penting dan prioritas dalam mengembangkan wilayah adalah aspek promosi daerah dengan bobot nilai sebesar 24,51 %, aspek pengembangan infrastruktur pendukung menempati urutan ketiga dengan bobot nilai sebesar 13,02 % dan terakhir adalah aspek pelayanan publik dengan bobot nilai 6,07 %. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar 5.6 berikut :



Gambar 5.6 Hirarki Aspek Prioritas Kebijakan Pengembangan Pembangunan Wilayah.

Sumber : Data Primer Diolah 2011

Hasil kesimpulan dari beberapa responden seperti terlihat pada tabel 5.8 (bobot level pertama) tersebut menunjukkan bahwa aspek terpenting yang menduduki posisi tertinggi dan menjadi prioritas dalam rangka mengembangkan wilayah khususnya di Kabupaten Muna adalah aspek pengembangan sumber daya manusia. Ini terkait dengan pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kualitas aparat, pengembangan kualitas SDM, peningkatan skill dan keterampilan melalui penguasaan ilmu-teknologi terkini menjadi hal terpenting bagi pengembangan kualitas sumber daya manusia tersebut

Strategi ini sejalan dengan arah dan kebijakan pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Muna terhadap pengembangan kualitas sumber

daya manusia yang diarahkan untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan yakni hak untuk memperoleh akses yang cepat, mudah dan murah atas kebutuhan pendidikan dan kesehatan dalam rangka terciptanya masyarakat yang berkualitas, baik kualitas intelektual, emosional, spiritual, fisik dan kekuatan nilai-nilai kulturalnya. Hak-hak dasar masyarakat di bidang pendidikan dalam bentuk bebas dari buta aksara, kebodohan, keterbelakangan dan putus sekolah.

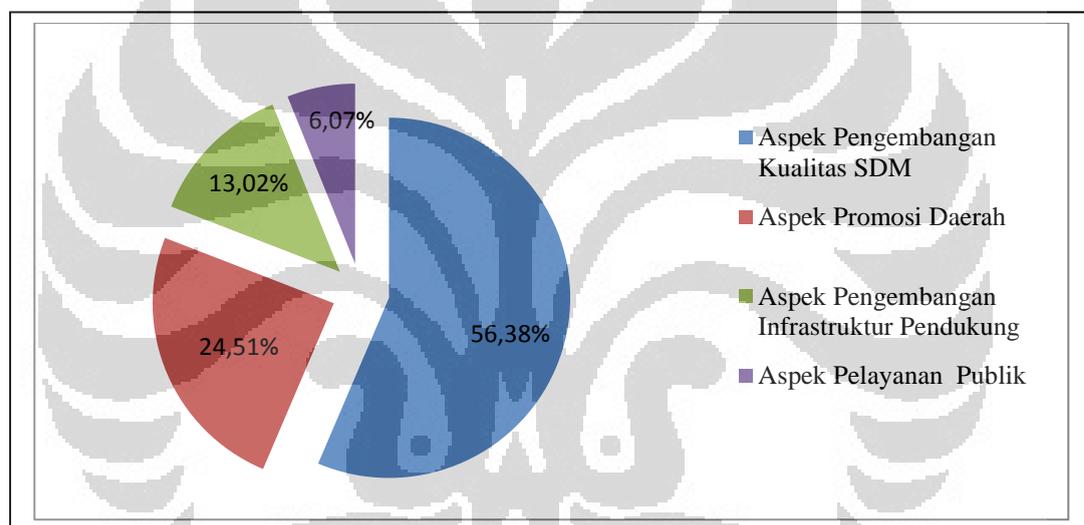
Dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas aparat pemerintah juga menekankan pada revitalisasi pemerintahan daerah yang diarahkan untuk melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui pengembangan kapasitas manajemen pemerintahan daerah, peningkatan kualitas sumberdaya aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Aspek strategi lain yang dianggap penting dan prioritas dalam rangka pengembangan pembangunan wilayah adalah pengembangan infrastruktur pendukung. Ini merupakan salah satu strategi kebijakan yang dilakukan dengan menyediakan dan memelihara infrastruktur fisik serta kerjasama antar daerah dalam penyediaan infrastruktur. Hal ini sejalan dengan arah dan kebijakan pemerintah bahwa pembangunan Infrastruktur dasar wilayah diarahkan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial budaya masyarakat dalam kerangka pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar desa dan antar kecamatan. Pembangunan transportasi dilakukan secara terpadu dengan mengembangkan jaringan pelayanan antar moda dan intra moda. Pengembangan sarana dan prasarana sumberdaya air diarahkan untuk mewujudkan fungsi air sebagai sumberdaya ekonomi dan sosial melalui pengelolaan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pembangunan telekomunikasi diarahkan untuk mendorong terciptanya masyarakat berbasis informasi. Pembangunan sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan secara memadai serta pengembangan diversifikasi energi untuk pembangkit listrik baru berbasis sumberdaya yang dapat diperbaharui.

Aspek lain yang dijadikan prioritas dalam mengembangkan wilayah di Kabupaten Muna adalah aspek pelayanan publik yang meliputi perizinan dan pematapan hukum. Perizinan yang dimaksud disini adalah sisi pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemda yakni kejelasan rantai birokrasi dalam hal pengurusan

perizinan dan hal-hal lain yang terkait dengan dunia usaha serta perilaku aparat pemda dalam melakukan pelayanan. Selanjutnya yang terkait dengan pemantapan hukum yang merupakan salah satu instrumen yang dianggap penting dan prioritas dalam rangka pengembangan pembangunan wilayah, ini terkait dengan adanya konsistensi peraturan terhadap penegakan hukum di daerah. Konsistensi peraturan yang dimaksud adalah adanya peraturan yang dapat dijadikan pedoman untuk suatu jangka waktu yang cukup, sehingga tidak terkesan setiap pergantian pejabat selalu diikuti pergantian peraturan yang bisa saling bertentangan.

Berikut adalah gambar dari level pertama yakni urutan ranking dari aspek prioritas pengembangan pembangunan wilayah di Kabupaten Muna.



Gambar 5.7 Bobot Level Pertama Aspek Prioritas Strategi Kebijakan Pengembangan Pembangunan Wilayah

Sumber : Data Primer diolah 2011.

#### 5.4.3. Analisis Prioritas Kebijakan Pengembangan Pembangunan Wilayah .

Analisis strategi kebijakan yang dirumuskan dalam penelitian ini merupakan suatu hirarki yang saling berhubungan terhadap pengembangan pembangunan wilayah di Kabupaten Muna. Penyusunan hirarki ini didasarkan pada informasi data sekunder dan hasil diskusi tentang Kabupaten Muna dan kondisi perekonomiannya. Diskusi dengan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) antara lain dari

pihak pemerintah, DPRD Muna, Bappeda, unsur masyarakat, Akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang dilakukan secara terpisah untuk mendengarkan pendapat mereka terkait dengan strategi kebijakan prioritas dalam rangka pengembangan pembangunan wilayah.

Dari beberapa gambaran mengenai kondisi perekonomian kabupaten Muna, maka pada penelitian ini mencoba memberikan alternatif prioritas kebijakan dalam rangka pengembangan pembangunan wilayah. Prioritas kebijakan yang dibuat bersumber dari beberapa responden yang dianggap ekspert, selanjutnya dianalisis dengan pedekatan AHP dan kemudian diolah secara manual dengan menggunakan matriks *pair-wise* atau matriks perbandingan berpasangan. Dari analisis tersebut diperoleh bobot prioritas dan total persepsi responden yang pada akhirnya memberikan nilai bobot final dari aspek dan kriteria yang menjadi strategi prioritas dalam rangka pengembangan pembangunan wilayah di Kabupaten Muna.

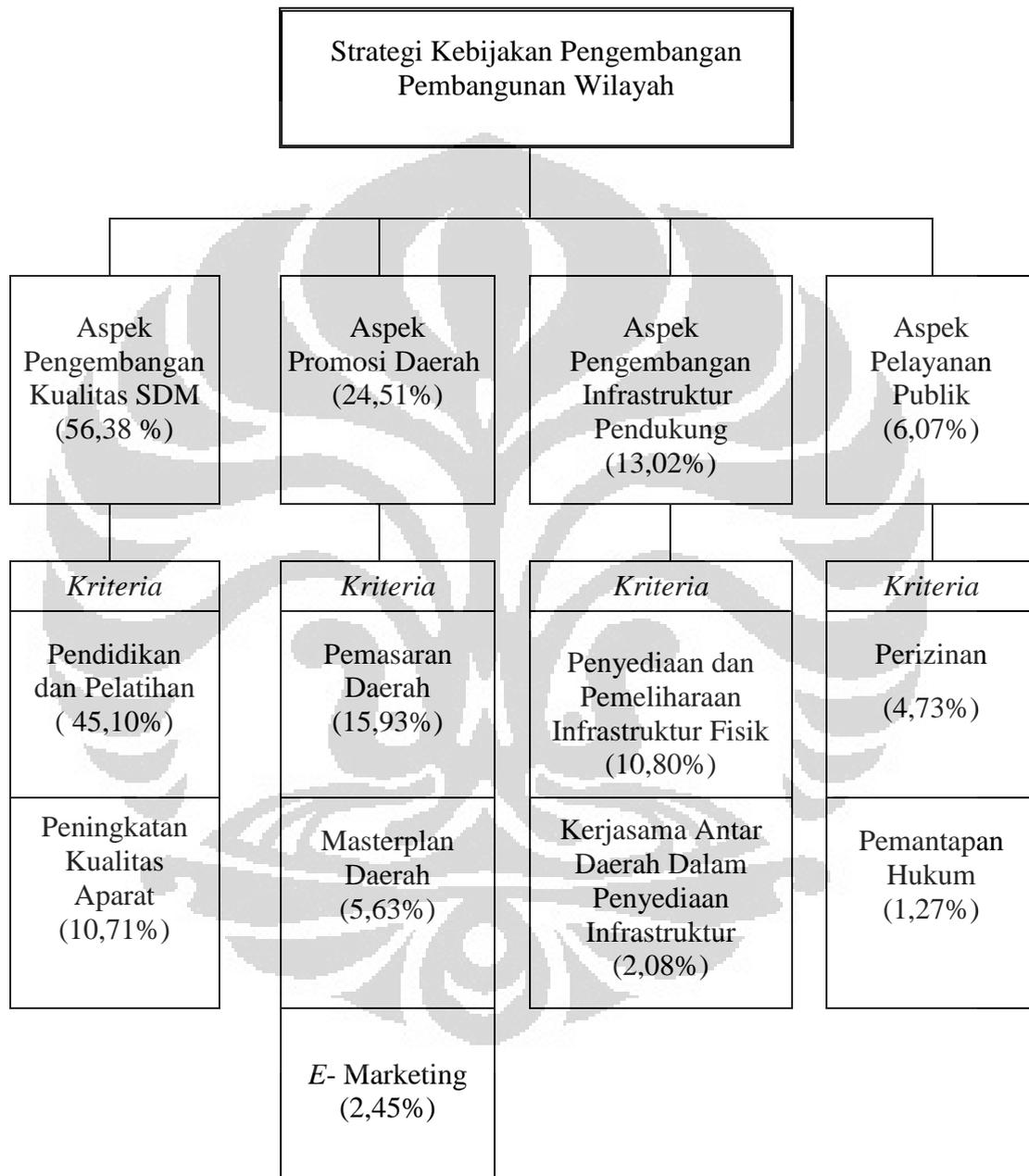
Untuk menganalisis prioritas kebijakan dalam rangka pengembangan pembangunan wilayah, maka dilakukan prosedur perhitungan bobot pada level kedua dari kriteria hirarki yang dibuat sebelumnya dan kemudian diolah secara manual dengan menggunakan matriks *pair-wise*, ini dilakukan sama dengan prosedur perhitungan pada level pertama terhadap aspek prioritas kebijakan pengembangan pembangunan wilayah.

Setelah diketahui bobot level pertama dan bobot level kedua, maka langkah selanjutnya adalah menghitung bobot nilai final yang merupakan perkalian antara bobot nilai pada level pertama dengan bobot nilai pada level kedua ( *Lampian.14* ). Hasil ini menunjukkan besaran bobot nilai yang mengindikasikan urutan prioritas dari suatu hirarki terhadap pengembangan wilayah tersebut. Bobot nilai tersebut dapat dilihat pada gambar 5.8.

Dari gambar tersebut terlihat bahwa bobot nilai aspek pada level pertama dan bobot nilai pada level kriteria (kedua) merupakan gambar yang saling berhubungan antara level pertama yakni variabel aspek dan level kedua yaitu variabel kriteria yang menjadi prioritas dalam rangka pengembangan pembangunan wilayah.

Pada aspek pengembangan sumber daya manusia dengan bobot nilai tertinggi dan memiliki dua kriteria yang menyusunnya, yaitu kriteria pendidikan dan

pelatihan serta kriteria peningkatan kualitas aparat. Dari kedua kriteria tersebut, kriteria pendidikan dan pelatihan merupakan kriteria yang dianggap sangat prioritas dari keseluruhan kriteria yang disimpulkan dari responden dengan bobot nilai sebesar 45,10 %.



Gambar 5.8 Bobot Final Hirarki Kriteria Kebijakan Pengembangan Pembangunan Wilayah Kabupaten Muna.

Sumber : Data Primer Diolah 2011

Dari hasil penelitian ini kriteria pendidikan dan pelatihan menjadi sangat prioritas, hal ini terkait dengan skill dan ketrampilan yang perlu mendapat perhatian utama sehingga diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan produksi dari para pekerja pada semua sektor lapangan usaha, terutama pada sektor pertanian yang menjadi sektor basis serta menjadi andalan dalam kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Muna. Penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi terutama terkait dengan sektor pertanian ataupun pada sektor-sektor lain yang juga merupakan sektor basis dan non basis daerah, ini mengindikasikan bahwa jika produktivitas dari para pekerja meningkat atau terciptanya sumber daya manusia yang handal, maka akan berdampak pada peningkatan produksi dan berimplikasi pada terciptanya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Perioritas berikutnya yang dianggap sangat strategis dalam rangka pengembangan pembangunan wilayah adalah pemasaran daerah dengan bobot nilai sebesar 15,93 %. Menurut persepsi responden bahwa kriteria ini dianggap strategis dan urutan kedua setelah pendidikan dan pelatihan sebab menurut mereka bahwa dalam upaya mengembangkan wilayah, maka perlu kiranya dilakukan berbagai macam upaya dalam rangka mempromosikan potensi daerah, sehingga semua potensi menjadi keunggulan daerah dapat diketahui oleh para pelaku usaha serta dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian daerah. Upaya promosi daerah melalui pemasaran hasil-hasil komoditi unggulan daerah sangatlah penting dengan tujuan untuk peningkatan pendapatan bagi daerah tersebut.

Kriteria ketiga yang menjadi prioritas dalam rangka pengembangan pembangunan wilayah adalah pemeliharaan dan penyediaan infrastruktur fisik dengan bobot nilai 10,80%. Bobot nilai ini dikemukakan oleh responden expert dengan alasan bahwa dengan mengembangkan infrastruktur wilayah secara terpadu dan mengembangkan infrastruktur perekonomian akan mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan serta simpul-simpul tataniaga sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Sarana dan prasarana dasar mempunyai peran sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan pada peran transportasi yang dapat memungkinkan orang, barang, dan jasa diangkut dari satu tempat ke tempat lain.

Ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar wilayah seperti jalan/jembatan, energi listrik, sarana komunikasi dan sumber daya air memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, kesatuan dan persatuan bangsa serta mengikat dan menghubungkan antar wilayah. Pengembangan sarana dan prasarana lainnya, seperti jalan, jembatan, prasarana dan sarana dasar permukiman merupakan modal esensial masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sosial-ekonominya.

Kondisi Infrastruktur dasar wilayah di kabupaten Muna yang meliputi prasarana jalan dan jembatan, prasarana transportasi laut, jaringan irigasi, jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi dan informatika belum memadai dalam mendukung kebutuhan riil masyarakat Muna. Kendala tersebut mempengaruhi daya saing perekonomian daerah dan belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat. Hal ini disebabkan oleh tersumbatnya koordinasi antara pemerintah kabupaten dan Pemerintah provinsi, minimnya kemampuan keuangan daerah, dan kualitas sumber daya manusia masih rendah.

Selanjutnya yang menjadi kriteria prioritas untuk mengembangkan wilayah melalui sektor-sektor basis adalah faktor peningkatan kualitas aparat dengan bobot nilai sebesar 10,71%. Beberapa hal sehingga kriteria ini dianggap penting bahwa untuk mencapai target dalam pengembangan wilayah yang optimal maka oleh responden mengharapkan agar pemerintah melalui aparatnya menciptakan suatu peningkatan kualitas dengan melakukan revitalisasi pemerintahan yang diarahkan melalui reformasi birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Ini dilakukan salah satunya melalui peningkatan kualitas sumberdaya aparatur.

Sasaran utama dalam mewujudkan pemerintahan yang sehat adalah melaksanakan tugas dan fungsinya seorang aparat mampu bekerja secara terintegrasi dan tepat waktu serta kompeten dalam mencapai target kinerjanya, yang dibekali dengan administrasi yang akuntabel. Sehingga bila sasaran tersebut dapat terintegrasi, maka akan tercipta pemerintahan yang lebih berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat, pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta

aparatus pemerintahan yang lebih bersifat mengayomi masyarakat serta bersih dari praktek-praktek kolusi, korupsi dan nepotisme.

Pada kriteria masterplan daerah dengan bobot nilai 5,63%, menempati urutan kelima pada skala prioritas perumusan kebijakan pengembangan pembangunan wilayah di Kabupaten Muna. Pentingnya pemetaan terhadap potensi sektor-sektor lapangan usaha di daerah menjadikan kriteria ini lebih prioritas dalam mengembangkan wilayah, sebab yang menjadi dasar dari adanya suatu kebijakan yang strategis seringkali diawali dengan adanya pemetaan potensi wilayah yang menjadi sasaran untuk kemudian dikembangkan dan menjadi pusat-pusat pertumbuhan daerah.

Pada beberapa kenyataan seringkali perumusan kebijakan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sangat penting terutama yang berkaitan dengan potensi perekonomian daerah, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan suatu perekonomian daerah akan lebih terstruktur dan terencana dengan baik serta juga tidak adanya program kegiatan yang tumpang tindih pada satu wilayah dan ini menjadikan wilayah akan lebih fokus terhadap berbagai jenis sektor usaha yang menjadi prioritasnya.

Kriteria selanjutnya menurut responden expert yang menjadi prioritas adalah faktor perizinan dengan bobot nilai sebesar 4,73%. Dalam pandangan responden kriteria perizinan ini merupakan salah satu faktor utama yang dianggap penting bagi para pelaku dunia usaha pada suatu daerah tidak terkecuali di Kabupaten Muna. Sehingga responden beranggapan bahwa kemudahan pelayanan atas sebuah perizinan yang diciptakan oleh pemerintah merupakan daya tarik tersendiri bagi para pengusaha dalam rangka membuka lapangan usaha di daerah yang bersangkutan dan ini akan berdampak pada terciptanya kantong-kantong pertumbuhan ekonomi.

Bagi daerah Kabupaten Muna sendiri bila dikaitkan dengan kondisi perekonomian daerah, maka perlu kiranya pemerintah membuat suatu regulasi tersendiri terhadap bentuk-bentuk perizinan, sehingga sentuhan terhadap berbagai jenis lapangan usaha terutama yang berkaitan dengan sektor-sektor basis maupun non

basis bias lebih memberi gambaran pada pencapaian target dalam menciptakan pertumbuhan pada sektor-sektor yang ada pada PDRB .

Perioritas ketujuh adalah kriteria e-marketing yang memiliki bobot nilai 2,45%, Oleh para responden kriteria ini dianggap penting dengan dasar pemikiran bahwa pada era globalisasi dengan berbagai macam sarana termasuk salah satunya adalah jaringan komunikasi dan informatika. Dampak dari hal tersebut menjadikan daerah harus dapat memanfaatkannya guna menggali potensi-potensi perekonomian daerah dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam fungsi pemasaran tradisional melalui penggunaan teknologi informasi bisnis yang dilakukan melalui internet.

Berbagai upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Muna terkait pengembangan wilayah dalam hal ini mempromosikan daerahnya melalui jaringan komunikasi dan informatika tersebut. Ini bertujuan agar seluruh potensi daerah terutama yang berkaitan dengan sektor-sektor basis dan non basis dapat lebih diketahui secara luas, sehingga berdampak pada proses pengembangan sektor-sektor tersebut dan dapat menciptakan berbagai macam kerja sama dengan berbagai pihak tidak terkecuali dengan daerah-daerah lain ataupun dengan negara lain. Peran jaringan komunikasi dan informatika ini memungkinkan pertukaran informasi secara cepat (*real time*) menembus batas ruang dan waktu. Ini dianggap penting sebab dapat menunjang dalam proses produksi maupun dalam distribusi komoditi ekonomi masyarakat.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, maka responden mengarahkan agar dilakukan pengembangan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang ditujukan untuk menjamin kelancaran arus informasi baik untuk mendukung kegiatan pemerintahan, perekonomian, maupun sosial.

Stategi kebijakan selanjutnya adalah terkait dengan pengembangan infrastruktur pendukung dalam hal ini kriteria kerjasama antar daerah dalam penyediaan infrastruktur dengan bobot nilai 2,08%. Walaupun persepsi responden terhadap kriteria ini kecil, namun ini dianggap penting dalam rangka pengembangan pembangunan wilayah. Bila melihat kondisi perekonomian daerah Kabupaten Muna secara keseluruhan menunjukkan bahwa terdapat berbagai macam kendala di daerah

dalam meningkatkan perekonomiannya, sehingga responden berpendapat bahwa salah satu upaya untuk mendukung percepatan perekonomian daerah, sebaiknya melakukan kerjasama dengan daerah lain terutama yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur pendukung.

Kriteria terakhir yang menjadi prioritas dalam rangka pengembangan pembangunan wilayah di Kabuten Muna adalah pementapan hukum yang memiliki bobot nilai 1,27%. Nilai ini tidak berbeda jauh dengan kriteria kerjasama antar daerah dalam penyediaan infrastruktur, tetapi responden menjadikan ini sebagai salah satu strategi yang menjadi prioritas. Hal ini terkait dengan para pelaku usaha sebagai subjek ataupun masyarakat sebagai objek pelaku perekonomian yang menginginkan suasana yang kondusif berupa kenyamanan, kepastian hukum, keadilan, dan keamanan dalam berinteraksi sehingga kegiatan perekonomian dapat berjalan dengan baik dan aman serta efektif.

Untuk lebih jelasnya, urutan prioritas dari seluruh kriteria sebagai bobot final yang terdapat pada hirarki kebijakan pengembangan pembangunan wilayah, dapat dilihat pada Tabel 5.18 berikut.

Tabel 5.18 Bobot Final Kriteria Strategi Kebijakan Pengembangan Pembangunan Wilayah

| <b>Strategi Kebijakan Pengembangan Pembangunan Wilayah</b> | <b>Bobot Final (%)</b> | <b>Rangking</b> |
|--|------------------------|-----------------|
| Pendidikan dan Pelatihan                                   | 45,10                  | 1               |
| Pemasaran Daerah   | 15,93                  | 2               |
| Penyediaan dan Pemeliharaan Infrast. Fisik                 | 10,80                  | 3               |
| Peningkatan Kualitas Aparat                                | 10,71                  | 4               |
| Masterplan Daerah  | 5,63                   | 5               |
| Perizinan  | 4,73                   | 6               |
| e-marketing  | 2,45                   | 7               |
| Kerjasama antar daerah dalam penyediaan Infrast.           | 2,08                   | 8               |
| Pemantapan Hukum   | 1,27                   | 9               |

Sumber : Data Primer Diolah 2011.

### 5.5. Implikasi Kebijakan .

Berdasarkan hasil-hasil analisis dapat ditarik implikasi kebijakan sebagai berikut:

Pertama, menetapkan kebijakan pembangunan dan pengembangan sektoral perekonomian daerah, sebaiknya lebih memprioritaskan subsektor potensial yakni sektor ekonomi basis tetapi tingkat pertumbuhannya lambat, walaupun demikian, sektor lainnya tetap mendapat perhatian secara proporsional sesuai dengan potensi dan peluang pengembangannya.

Kedua, untuk menggerakkan pembangunan ekonomi wilayah di Kabupaten Muna terutama sektor yang berada pada klasifikasi relatif rendah, maka diperlukan kebijakan yang dapat memberikan nilai positif bagi pengembangan sektor tersebut . Nilai positif yang dimaksud adalah berupa perbaikan sarana dan prasarana, yang selama ini menghambat laju investasi di daerah tersebut terutama pada sektor pertambangan dan penggalan yang merupakan sektor yang pertumbuhannya lambat

Ketiga, meskipun di era otonomi daerah semangat yang dibangun adalah partisipasi yang besar dari pihak swasta/masyarakat di dalam pembangunan ekonomi daerah, namun bukan berarti pemerintah tinggal diam, karena untuk mewujudkan hal tersebut merupakan tugas pemerintah daerah. Pada dasarnya pemerintah daerah memiliki empat peran dalam proses pembangunan ekonomi daerah yaitu sebagai entrepreneur, koordinator, fasilitator, dan stimulator bagi lahirnya inisiatif-inisiatif pembangunan daerah. Salah satu sarana untuk mewujudkan peran pemerintah daerah tersebut adalah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD yang disusun pemerintah harus mengedepankan upaya-upaya akselerasi pembangunan ekonomi daerah. Misalnya untuk pos belanja modal publik. Pengeluaran belanja modal publik harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan menciptakan insentif bagi terciptanya investasi-investasi baru.

Keempat, menetapkan prioritas kebijakan terhadap pengembangan sumber daya manusia di daerah, dengan mengedepankan aspek pendidikan dan pelatihan serta beberapa aspek yang lain yang menjadi prioritas utama dalam rangka pengembangan pembangunan wilayah di Kabupaten Muna .

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kesimpulan.**

Berdasarkan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Kabupaten Muna bila dilihat secara keseluruhan pada sektor usaha PDRB, daerah ini tergolong wilayah dengan kondisi sektor basis yang berfluktuatif, yakni dari sembilan sektor ada beberapa sektor yang hanya mampu memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri atau disebut juga sebagai sektor basis daerah, antara lain :
  - Sektor pertanian terkait dengan sub sektor tanaman pangan, peternakan dan kehutanan.
  - Sektor pertambangan dan penggalian.
  - Sektor perdagangan, hotel dan restoran terkait dengan sub sektor perdagangan besar dan eceran dan sub sektor restoran
  - Sektor pengangkutan dan komunikasi terkait dengan sub sektor angkutan danau, sungai dan penyeberangan
  - Sektor Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan terkait dengan sub sektor sewa bangunan , dan
  - Sektor jasa-jasa terkait dengan sub sektor jasa pemerintahan umum, dan sub sektor swasta terkait perumahan dan rumah tangga.
- b. Selain sektor basis, terdapat beberapa sektor yang tidak tergolong pada sektor non basis tetapi sektor ini potensial untuk dikembangkan yaitu :
  - Sektor konstruksi/bangunan
  - Sektor listrik, gas dan air bersih, dan
  - Sektor industri pengolahan
- c. Berdasarkan tipologi wilayahnya Kabupaten Muna memiliki satu sektor ekonomi yang sangat berpotensi untuk dikembangkan yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran dan ada dua sektor yang potensial untuk dikembangkan yaitu pertanian dan jasa-jasa serta ada lima sektor yang perlu untuk dikembangkan

lebih lanjut yaitu sektor industri pengolahan, listrik gas dan air bersih, bangunan, pengangkutan dan komunikasi dan keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

- d. Terdapat sembilan kriteria utama yang dianggap paling prioritas dan perlu mendapat pembenahan oleh pemerintah Kabupaten Muna dalam rangka pengembangan pembangunan wilayah di Kabupaten Muna, antara lain :
- Pengembangan SDM, Aspek ini terkait dengan pendidikan dan pelatihan dengan bobot 45,10 persen. Kriteria ini merupakan prioritas pertama dan perlu mendapat pembenahan serius dari pemerintah daerah.
  - Berikutnya adalah terkait dengan aspek promosi daerah terkait kriteria pemasaran daerah dengan bobot 15,93 persen dan menjadi prioritas kedua
  - Kriteria ketiga adalah penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur fisik dengan bobot prioritas sebesar 10,80 persen.
  - Prioritas keempat adalah peningkatan kualitas aparat dengan bobot prioritas sebesar 10,71 persen.
  - Masterplan daerah dengan bobot prioritas sebesar 5,63 persen pada ranking ke lima
  - Keenam adalah kriteria perizinan dengan bobot prioritas sebesar 4,73 persen.
  - Prioritas berikutnya adalah e-marketing dengan bobot prioritas sebesar 2,45 persen diurutan ketujuh .
  - Prioritas kedelapan adalah kerjasama antar daerah dalam penyediaan infrastruktur fisik dengan bobot prioritas sebesar 2,08 persen, dan
  - Terakhir adalah pemantapan hukum dengan bobot prioritas sebesar 1,27 persen.
- e. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muna 2010-2015, terdapat beberapa program yang menjadi prioritas terkait dengan kondisi sektor lapangan usaha baik basis maupun non basis antara lain
- Untuk sektor basis antara lain pertanian, perikanan dan kelautan, kehutanan, perdagangan masih, menjadi program pilihan utama sehingga diharapkan program ini mampu menopang kekuatan sektor tersebut

untuk tetap menjadi sektor andalan dalam memenuhi kebutuhan daerahnya

- Terkait dengan sektor non basis, terdapat beberapa program yang menjadi prioritas dalam rangka menciptakan kondisi yang potensial bagi sektor tersebut antara lain urusan pilihan energi dan sumber daya mineral serta urusan pilihan industri yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan hasil-hasil pertanian melalui pemanfaatan teknologi tepat guna.

**b. S a r a n .**

- a. Dalam mengakselerasikan pertumbuhan ekonomi daerah, maka oleh pemerintah perlu kiranya mengembangkan sektor-sektor usaha yang potensial dimana kondisi dari sektor usaha tersebut basis tetapi pertumbuhannya lambat.
- b. Perlu kiranya mendapat perhatian yang sangat spesifik terkait pengembangan sumber daya manusia yakni peran dari pihak pemerintah dalam rangka meningkatkan skill serta produktifitas dari para pekerja diberbagai sektor lapangan usaha baik basis maupun non basis.
- c. Diharapkan pemerintah senantiasa aktif dalam berbagai kegiatan terkait promosi daerah terhadap berbagai jenis komoditi baik lokal maupun mancanegara dalam rangka memperkenalkan/ menawarkan potensi daerah, terutama terkait dengan kondisi perekonomian Kabupaten Muna dari semua sektor lapangan usaha.
- d. Dengan melihat kondisi topografi Kabupaten Muna yang terdiri dari daratan dan kepulauan, maka perlu adanya pengembangan infrastruktur pendukung terkait dengan penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur fisik dengan memberikan kemudahan terutama dari sistim transportasi dan komunikasi yang sangat diperlukan oleh masyarakat dalam melakukan aktivitas perekonomian, sehingga untuk menjamin terpenuhinya infrastruktur wilayah, maka perlu kiranya dilakukan kerjasama antar daerah baik pada skala nasional maupun antar negara.

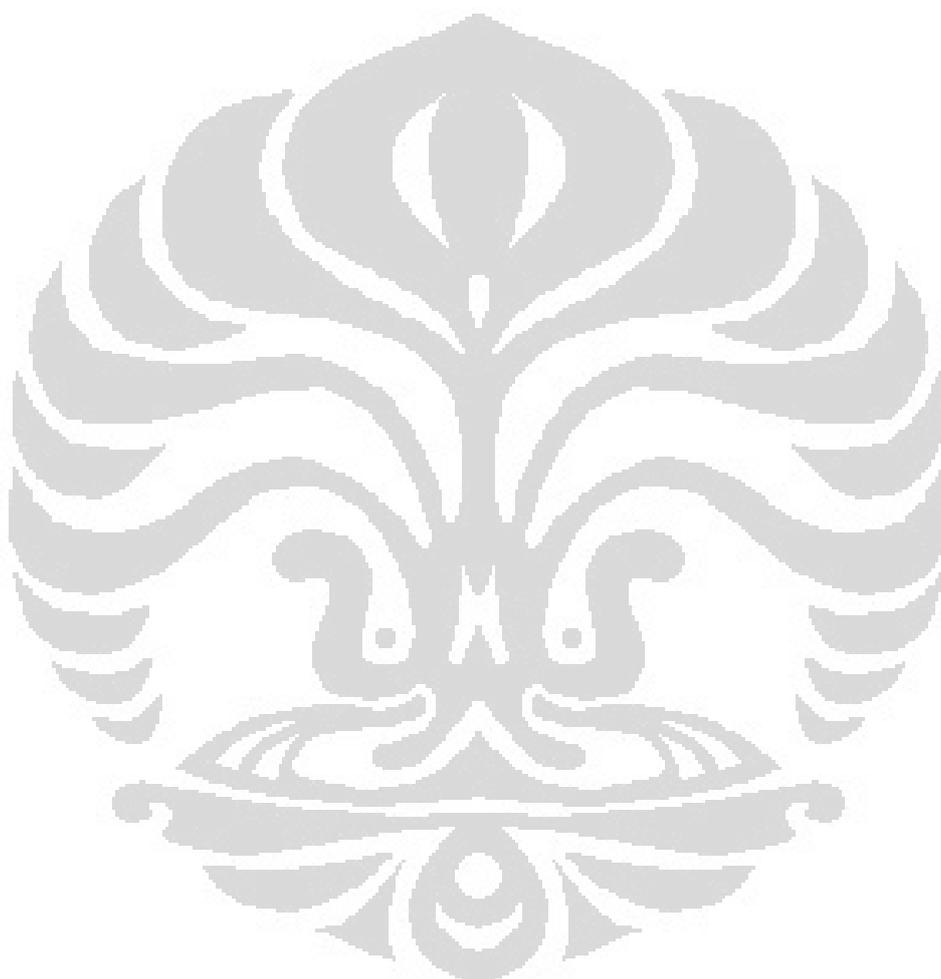
## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R.( 2005). *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Agung Pambudhi. (2007). *Regional Investment Attractiveness*, Jakarta : KPPOD
- Arsyad Lincoln. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, (Edisi Pertama), Yogyakarta : BPEF.
- Azis,IwanJ. (1994). *Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia*, Jakarta : FE UI.
- Badan Pusat Statistik. (2010). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Tenggara 2005-2009*.
- Badan Pusat Statistik, 2010. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Muna 2005-2009*.
- Badan Pusat Statistik. (2010). *Kabupaten Muna Dalam Angka*.
- Badan Pusat Statistik. 2010. *Sulawesi Tenggara Dalam Angka*.
- Budiharsono, S. (1989). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, PAUD-Ekonomi FE-UI., Jakarta
- Brodjonegoro Bambang, P.S. (1992). *Ekonomi Regional*, Jakarta : FE-UI.
- Dedi NS Setiono. (2011). *Ekonomi Pengembangan Wilayah*, (Edisi Pertama) Jakarta : FE-UI.
- Glasson, John. (1977). *Pengantar Perencanaan Regional*, (Paul Sitohang, Penerjemah). Jakarta : FE UI.
- Harry W. Richardson. (2001). *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional*, Jakarta : FE-UI.
- Hera Susanti, Moh. Ikhsan, Widyanti. (2000). *Indikator-Indikator Makro Ekonomi*, (Edisi Kedua), Jakarta : FE-UI.
- Kotler Philip. (1998), *Manajemen Pemasaran*, (Hendra Teguh & Roni A Rusli, Penerjemah ), Edisi Pertama, Jakarta : Prenhallindo.
- Lewis Arthur (2003). *The Principles Of Economic Paninning*, Edisi Pertama London :
- Michael P. Todaro. (2000). *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, ( Edisi Ketujuh), Jakarta : Erlangga.

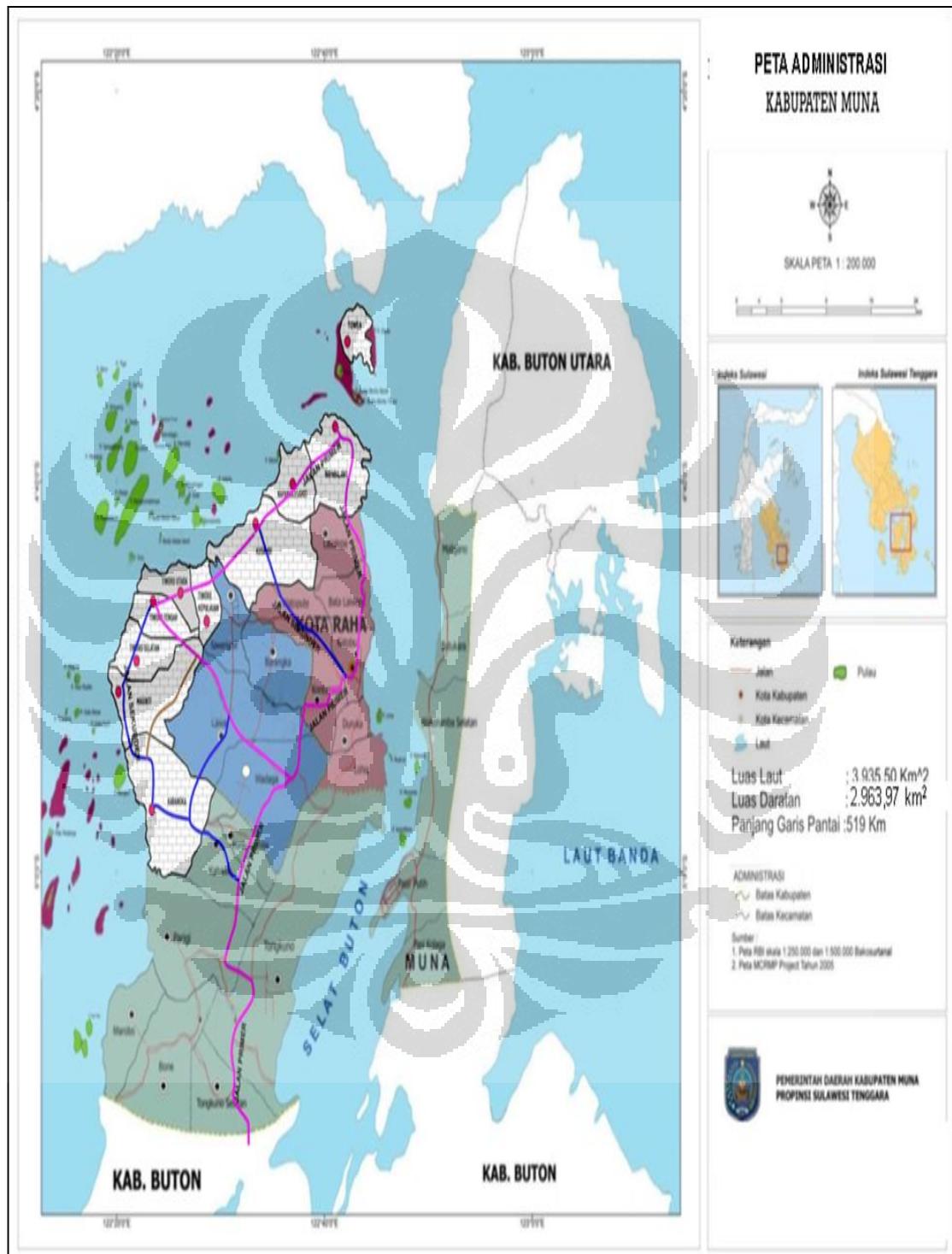
- Miraza Bachtiar Hassan. (2005). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*, ISEI Bandung
- Mulyono Sri. (1996). *Teori Pengambilan Keputusan*, Jakarta : LP-FEUI.
- Pamudji, S, (1982), *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara.
- Permadi S, Bambang. (1992). *Analytical Hierarchy Process*, Jakarta : PAU-EK-UI.
- Prasetya Irawan. (2006). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta : Departemen Ilmu Administrasi FISIP-UI.
- Richardson, Harry W. (2001). *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional*, (Paul Sitohang, Penerjemah), Jakarta : FE UI.
- Saaty Thomas L. ( 1980). *The Analytic Hierarchy Process*, New York : Mc Graw-Hill.
- Sjafrizal (1997). *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*. Jakarta. Prisma. LP3ES .
- Sedarmayanti (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Keempat)*, Bandung: Revika Aditama.
- Sukirno Sadono.(1985). *Ekonomi Pembangunan*, Jakarta : LPFE-UI.
- Sanusi Bachrawi. (2000). *Pengantar Perencanaan Pembangunan*, Jakarta : FE-UI.
- Tarigan Robinson.(2007). *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*, ( Cetakan Keempat ), Jakarta : Bumi Aksara.
- Todaro Michael P. (1998). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, (Edisi Keenam), Jakarta : Erlangga.
- (2004) *UU Nomor 32*, Tentang Pemerintahan Daerah, Bandung : Citra Umbara.
- 2004) *Undang-Undang Nomor 33*, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Bandung : Citra Umbara.
- (2008) *PP No. 8 Tahun 2008*, Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Bandung : Citra Umbara.

----- (2010) *RPJMD Kabupaten Muna 2010-2015*, Kabupaten Muna :  
Bappeda Dan PM Kabupaten Muna.

----- (2004) *Undang-Undang Nomor 25, Tentang Sistem Perencanaan  
Pembangunan Nasional*.



**Lampiran 1.**  
**Peta Administrasi Kabupaten Muna**



**Sumber : Bappeda dan PM Kab. Muna**

## Lampiran 2.

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) PROPINSI  
SULAWESI TENGGARA TAHUN 2005-2009 MENURUT LAPANGAN  
USAHA ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000.  
(Miliar Rupiah )**

| NO        | LAPANGAN USAHA  | T A H U N       |                 |                 |                 |                 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2005            | 2006            | 2007            | 2008            | 2009            |
| <b>1</b>  | <b>PERTANIAN, PETERNAKAN,<br/>KEHUTANAN &amp; PERIKANAN</b> | <b>2.992,00</b> | <b>3.128,00</b> | <b>3.303,00</b> | <b>3.469,00</b> | <b>3.564,00</b> |
|           | a.Tanaman Pangan  | 612,00          | 615,00          | 662,006         | 667,00          | 655,00          |
|           | b.Tanaman Perkebunan  | 1.037,00        | 1.097,00        | 1.147,00        | 1.184,00        | 1.140,00        |
|           | c.Peternakan dan Hasilnya                                   | 439,00          | 454,00          | 468,00          | 503,00          | 547,00          |
|           | d.Kehutanan   | 101,00          | 102,00          | 106,00          | 113,00          | 121,00          |
|           | e.Perikanan   | 803,00          | 860,00          | 920,00          | 1.002,00        | 1.101,00        |
| <b>2.</b> | <b>PERTAMBANGAN DAN<br/>PENGALIAN</b>                       | <b>460,00</b>   | <b>433,00</b>   | <b>536,00</b>   | <b>519,00</b>   | <b>551,00</b>   |
|           | a. Minyak dan Gas Bumi                                      | -               | -               | -               | -               | -               |
|           | b.Pertambangan Tanpa Migas                                  | 345,00          | 310,00          | 400,00          | 355,00          | 352,00          |
|           | c.Penggalian  | 115,00          | 123,00          | 136,00          | 164,00          | 199,00          |
| <b>3.</b> | <b>INDUSTRI PENGOLAHAN</b>                                  | <b>579,00</b>   | <b>757,00</b>   | <b>835,00</b>   | <b>887,00</b>   | <b>863,00</b>   |
|           | a.Industri Migas  | -               | -               | -               | -               | -               |
|           | 1) Pengilangan Minyak Bumi                                  | -               | -               | -               | -               | -               |
|           | 2) Gas Alam Cair  | -               | -               | -               | -               | -               |
|           | b.Industri Tanpa Migas                                      | 579,00          | 757,00          | 835,00          | 887,008         | 863,00          |
| <b>4.</b> | <b>LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH</b>                          | <b>56,00</b>    | <b>61,00</b>    | <b>64,00</b>    | <b>70,00</b>    | <b>81,00</b>    |
|           | a.Listrik   | 53,00           | 57,00           | 60,00           | 65,00           | 75,00           |
|           | b.Gas   | -               | -               | -               | -               | -               |
|           | c.Air Bersih  | 3,00            | 4,00            | 4,00            | 5,00            | 6,00            |
| <b>5.</b> | <b>KONSTRUKSI/BANGUNAN</b>                                  | <b>617,00</b>   | <b>672,00</b>   | <b>733,00</b>   | <b>816,00</b>   | <b>919,00</b>   |
| <b>6.</b> | <b>PERDAGANGAN, HOTEL DAN<br/>RESTORAN</b>                  | <b>1.247,00</b> | <b>1.306,00</b> | <b>1.428,00</b> | <b>1.577,00</b> | <b>1.808,00</b> |
|           | a.Perdagangan Besar & Eceran                                | 1.217,00        | 1,273,00        | 1.393,00        | 1.357,00        | 1.759,00        |
|           | b.Hotel   | 3,00            | 3,00            | 3,00            | 4,00            | 4,00            |
|           | c.Restoran  | 27,00           | 30,00           | 32,00           | 36,00           | 45,00           |

**(Lanjutann Lampiran 2 )**

|   |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI</b>             | <b>602,00</b>   | <b>657,00</b>   | <b>694,00</b>   | <b>789,00</b>   | <b>944,00</b>   |
| a.Pengangkutan                                    | 521,00          | 566,00          | 591,00          | 665,00          | 777,00          |
| 1) Angkutan Rel                                   | -               | -               | -               | -               | -               |
| 2) Angkutan Jalan Raya                            | 404,00          | 438,00          | 456,00          | 505,00          | 562,00          |
| 3) Angkutan Laut                                  | 20,00           | 22,00           | 22,00           | 22,00           | 25,00           |
| 4) Angkt Sungai,Danau dan Penyeberangan           | 3,00            | 4,00            | 4,00            | 4,00            | 5,00            |
| 5) Angkutan Udara                                 | 61,00           | 67,00           | 72,00           | 93,00           | 136,00          |
| 6) Jasa Penunjang                                 | 33,00           | 35,00           | 37,00           | 41,00           | 49,00           |
| b.Kominikasi                                      | 81,00           | 91,00           | 103,00          | 124,00          | 167,00          |
| <b>8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN</b> | <b>395,00</b>   | <b>478,00</b>   | <b>517,00</b>   | <b>576,00</b>   | <b>618,00</b>   |
| a.Bank  | 136,00          | 204,00          | 232,00          | 265,00          | 292,00          |
| b.Lembaga Keuangan Tanpa Bank                     | 35,00           | 37,00           | 39,00           | 45,00           | 47,00           |
| c.Jasa Penunjang Keuangan                         | -               | -               | -               | -               | -               |
| d.Sewa Bangunan                                   | 189,00          | 199,00          | 205,00          | 220,00          | 229,00          |
| e.Jasa Perusahaan                                 | 35,00           | 38,00           | 41,00           | 46,00           | 50,00           |
| <b>9. JASA-JASA</b>                               | <b>1.080,00</b> | <b>1.150,00</b> | <b>1.220,00</b> | <b>1.306,00</b> | <b>1.421,00</b> |
| a.Pemerintahan Umum                               | 995,00          | 1.052,00        | 1.117,00        | 1.187,00        | 1.280,00        |
| b.Swasta  | 85,00           | 98,00           | 103,00          | 119,00          | 141,00          |
| 1) Sosial Kemasyarakatan                          | 13,00           | 13,00           | 14,00           | 15,00           | 17,00           |
| 2) Hiburan Dan rekreasi                           | 1,00            | 1,00            | 1,00            | 1,00            | 1,00            |
| 3) Perorangan dan rumah Tangga                    | 71,00           | 84,00           | 88,00           | 103,00          | 123,00          |
| <b>TOTAL PDRB</b>                                 | <b>5.036,00</b> | <b>5.514,00</b> | <b>6.027,00</b> | <b>6.540,00</b> | <b>7.205,00</b> |

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Tenggara 2010.

## Lampiran 3.

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) KABUPATEN  
MUNA TAHUN 2005-2009 MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS  
DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000 (Jutaan Rupiah )**

| NO        | LAPANGAN USAHA  | T A H U N         |                   |                   |                   |                   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2005              | 2006              | 2007              | 2008              | 2009              |
| <b>1</b>  | <b>PERTANIAN, PETERNAKAN,<br/>KEHUTANAN &amp; PERIKANAN</b> | <b>406.242,00</b> | <b>289.664,11</b> | <b>305.625,82</b> | <b>328.423,71</b> | <b>344.423,00</b> |
|           | a.Tanaman Pangan  | 108.271,72        | 86.539,90         | 92.272,79         | 97.398,29         | 96.206,37         |
|           | b.Tanaman Perkebunan  | 81.007,59         | 55.220,10         | 56.939,93         | 63.193,39         | 65.287,01         |
|           | c.Peternakan dan Hasilnya                                   | 76.287,45         | 50.879,55         | 53.008,22         | 56.828,45         | 61.959,29         |
|           | d.Kehutanan   | 18.613,78         | 14.804,74         | 15.621,49         | 16.139,46         | 16.703,32         |
|           | e.Perikanan   | 122.061,81        | 82.219,82         | 87.783,39         | 94.873,12         | 103.972,56        |
| <b>2.</b> | <b>PERTAMBANGAN DAN<br/>PENGALIAN</b>                       | <b>18.176,17</b>  | <b>18.338,01</b>  | <b>20.063,71</b>  | <b>21.511,11</b>  | <b>25.432,95</b>  |
|           | a. Minyak dan Gas Bumi                                      | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
|           | b.Pertambangan Tanpa Migas                                  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
|           | c.Penggalian  | 18.176,17         | 18.338,01         | 20.063,71         | 21.511,11         | 25.432,95         |
| <b>3.</b> | <b>INDUSTRI PENGOLAHAN</b>                                  | <b>67.438,57</b>  | <b>49.974,47</b>  | <b>52.295,75</b>  | <b>54.771,39</b>  | <b>60.150,31</b>  |
|           | a.Industri Migas  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
|           | 1) Pengilangan Minyak Bumi                                  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
|           | 2) Gas Alam Cair  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
|           | b.Industri Tanpa Migas                                      | 67.438,57         | 49.974,47         | 52.295,75         | 54.771,39         | 60.150,31         |
| <b>4.</b> | <b>LISTRIK, GAS DAN AIR<br/>BERSIH .</b>                    | <b>3.688,64</b>   | <b>2.840,49</b>   | <b>2986,23</b>    | <b>3.182,11</b>   | <b>3.480,53</b>   |
|           | a.Listrik   | 3.509,88          | 2.708,06          | 2.840,11          | 3.013,83          | 3.280,52          |
|           | b.Gas   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
|           | c.Air Bersih  | 178,76            | 132,43            | 146,12            | 168,29            | 200,01            |
| <b>5.</b> | <b>KONSTRUKSI/BANGUNAN</b>                                  | <b>77.29,25</b>   | <b>66.099,13</b>  | <b>71.135,07</b>  | <b>76.686,56</b>  | <b>82.870,68</b>  |
| <b>6.</b> | <b>PERDAGANGAN, HOTEL<br/>DAN RESTORAN</b>                  | <b>195.679,07</b> | <b>177.272,33</b> | <b>193.178,45</b> | <b>207.651,95</b> | <b>224.561,11</b> |
|           | a.Perdagangan Besar dan<br>Eceran                           | 192.457,82        | 174.163,48        | 189.864,47        | 203.700,88        | 220.080,06        |
|           | b.Hotel   | 96,55             | 107,72            | 117,39            | 140,09            | 147,46            |
|           | c.Restoran  | 3.124,70          | 3.001,13          | 3.196,59          | 3.810,98          | 4.333,59          |

**(Lanjutan Lampiran 3)**

|   |                     |                   |                   |                   |                     |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI</b>             | <b>33.942,72</b>    | <b>29.155,72</b>  | <b>31.160,89</b>  | <b>36.007,37</b>  | <b>39.393,21</b>    |
| a.Pengangkutan                                    | 28.555,93           | 24.353,42         | 25.570,52         | 29.691,37         | 31.582,14           |
| 1) Angkutan Rel                                   | -                   | -                 | -                 | -                 | -                   |
| 2) Angkutan Jalan Raya                            | 25.398,57           | 21.839,61         | 22.864,04         | 26.615,67         | 28.028,46           |
| 3) Angkutan Laut                                  | 610,33              | 457,76            | 460,48            | 477,35            | 523,70              |
| 4) Angkt Sungai,Danau dan Penyeberangan           | 453,34              | 325,43            | 359,80            | 426,91            | 516,62              |
| 5) Angkutan Udara                                 | -                   | -                 | -                 | -                 | -                   |
| 6) Jasa Penunjang                                 | 2.093,69            | 1.730,62          | 1.886,20          | 2.171,44          | 2.513,36            |
| b.Kominikasi                                      | 5.386,79            | 4.802,30          | 5.590,37          | 6.316,00          | 7.811,07            |
| <b>8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN</b> | <b>49.074,11</b>    | <b>46.423,17</b>  | <b>49.217,08</b>  | <b>55.367,58</b>  | <b>61.654,20</b>    |
| a.Bank  | 14.144,00           | 18.013,85         | 20.124,54         | 24.302,69         | 28.894,74           |
| b.Lembaga Keuangan Tanpa Bank                     | 3.626,31            | 3.426,31          | 3.564,32          | 3.902,64          | 4.048,72            |
| c.Jasa Penunjang Keuangan                         | -                   | -                 | -                 | -                 | -                   |
| d.Sewa Bangunan                                   | 28.207,78           | 22.263,78         | 22.550,88         | 24.099,09         | 25.457,22           |
| e.Jasa Perusahaan                                 | 3.096,02            | 2.719,22          | 2.977,24          | 3.063,16          | 3.253,52            |
| <b>9. JASA-JASA</b>                               | <b>191.367,62</b>   | <b>160.674,80</b> | <b>171.046,87</b> | <b>182.630,46</b> | <b>200.100,02</b>   |
| a.Pemerintahan Umum                               | 180.142,17          | 148.771,70        | 158.437,49        | 167.338,65        | 182.577,87          |
| b.Swasta  | 11.255,45           | 11.703,10         | 12.609,38         | 15.291,81         | 17.522,15           |
| 1) Sosial Kemasyarakatan                          | 1.679,56            | 1.624,93          | 1.727,23          | 1.858,06          | 2.059,05            |
| 2) Hiburan Dan rekreasi                           | 98,77               | 92,46             | 98,85             | 116,83            | 130,68              |
| 3) Perorangan dan rumah Tangga                    | 9.447,12            | 9.985,71          | 10.783,30         | 13.316,92         | 15.332,42           |
| <b>TOTAL PDRB</b>                                 | <b>1.042.905,50</b> | <b>840.242,23</b> | <b>896.709,87</b> | <b>966.241,25</b> | <b>1.041.771,56</b> |

Sumber : Badan pusat Statistik Kabupaten Muna 2010.

## Lampiran 4 .

**Perhitungan Komponen Differential Shift (Sd)  
Kabupaten Muna Terhadap Propinsi Sulawesi Tenggara  
Tahun 2005 -2009**

| <b>S e k t o r</b>                         | <b>2005/2006</b> | <b>2006/2007</b> | <b>2007/2008</b> | <b>2008/2009</b> |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Pertanian                                  | -12.604,79       | -6.854,87        | -6.882,28        | -15.994,18       |
| Pertambangan dan<br>Penggalian             | -2.457,02        | 2.902,25         | -2.096,51        | -307,06          |
| Industri Pengolahan                        | 15.574,55        | 1.170,76         | 549,13           | -5.640,86        |
| Listrik Gas, & Air Bersih                  | 47,23            | 86,44            | 62,63            | 258,42           |
| Bangunan                                   | 978,47           | 737,84           | 2.887,93         | 3.856,86         |
| Perdagangan Hotel<br>Dan Restoran          | -5.707,72        | 2.447,03         | 6.097,82         | 14.649,64        |
| Pengangkutan Dan<br>Komunikasi             | 505,6            | -679,17          | 1.997,78         | 4.339,59         |
| Keuangan, persewaan dan<br>Jasa Perusahaan | 558,47           | 91,86            | 2.034,83         | 166,93           |
| Jasa-Jasa                                  | 2.232,78         | 3.007,56         | 390,70           | 2.214,11         |

**Sumber : Data primer diolah 2011**

## Lampiran 5.

### **KUESIONER ANALITIC HIERARCHI PROCESS ( AHP ) BAGI RESPONDEN ATAS PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH DI KABUPATEN MUNA.**

#### **1. Penjelasan Singkat Penelitian**

- a. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi atau penilaian responden yang dianggap ekspert atas perumusan suatu kebijakan yang prioritas dalam rangka pengembangan pembangunan wilayah di Kabupaten Muna.
- b. Kegunaan penelitian ini adalah untuk melengkapi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada program magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP) Universitas Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberi masukan dalam upaya pengembangan pembangunan wilayah terutama terkait dengan setor basis dan non basis di Kabupaten Muna.
- c. Persepsi atau penilaian responden atas aspek dan kriteria yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan dari masyarakat yang dianggap ekspert, mengerti akan suatu permasalahan tersebut. Sehubungan dengan perumusan prioritas kebijakan dalam rangka pengembangan pembangunan wilayah di Kabupaten Muna, maka yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah pihak pemerintah dalam hal ini Bappeda dan PM Kabupaten Muna, pemerintah kecamatan, DPRD Kabupaten Muna sebagai mitra pemerintah, Akademisi, LSM serta kalangan masyarakat.
- d. Mengingat pentingnya masukan dari Bapak/Ibu, mohon kiranya dapat memberikan penilaian dalam kuesioner berikut.  
Kami menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan Bapak/Ibu, maka penulisan tesis ini tidak dapat terwujud.
- e. Karena sifatnya penelitian, maka segala masukan yang Bapak/Ibu berikan akan dijamin kerahasiannya.

## 2. Prinsip Dasar dan Petunjuk Pengisian Kuesioner AHP.

### 2.1. Prinsip Dasar AHP.

AHP adalah suatu metode pengambilan keputusan, bentuknya sederhana, fleksibel dan berdaya guna besar (power full) untuk mendukung suatu proses pengambilan keputusan yang multi kriteria, multi tujuan dan penuh dengan situasi kompleks. Ciri utama proses AHP adalah dengan memecah suatu masalah yang kompleks dan tidak terstruktur kedalam kelompok-kelompok, kemudian diatur menjadi suatu bentuk hirarki.

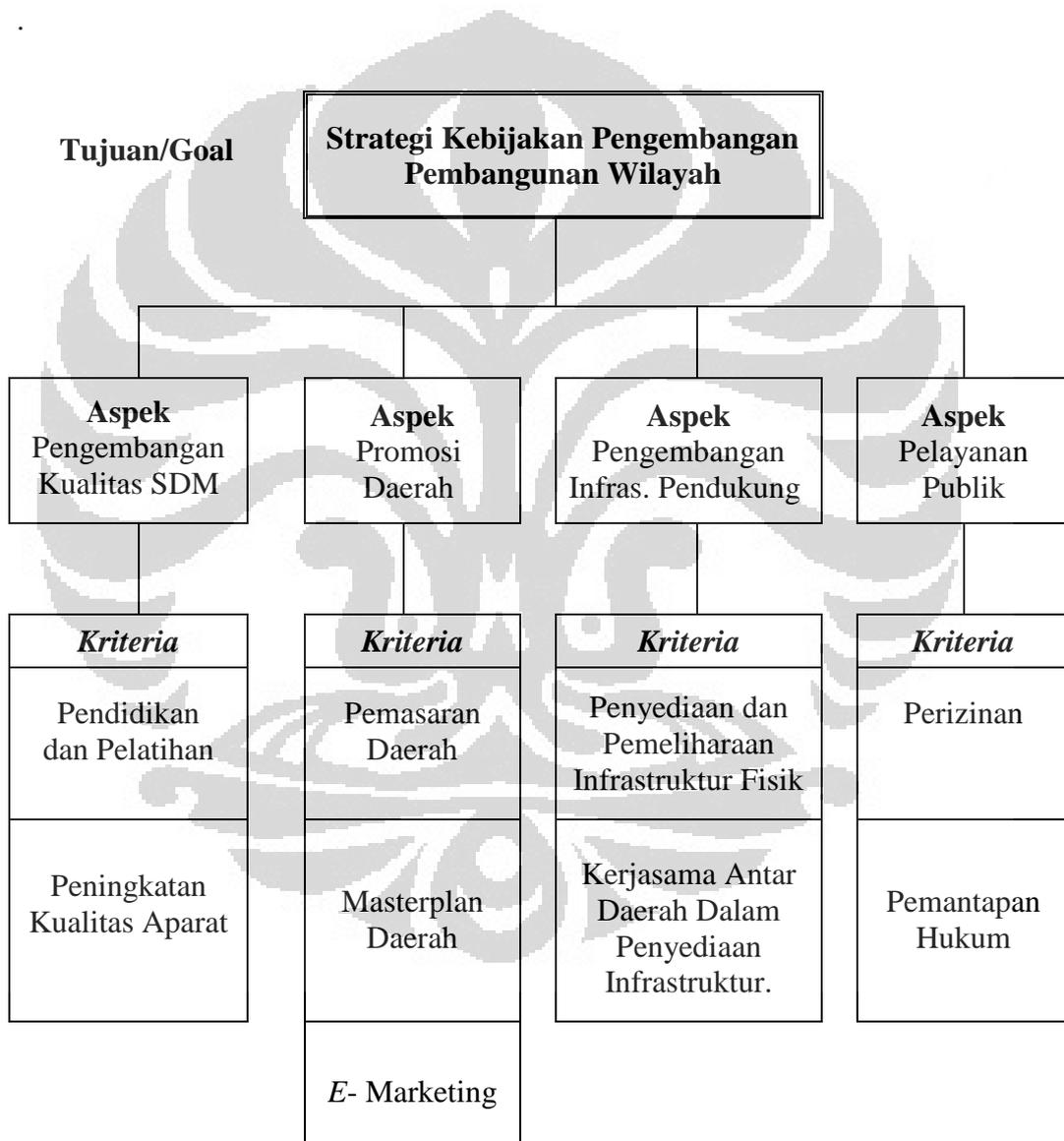
Input utama model AHP adalah persepsi atau penilaian responden. Sedangkan inti dari proses AHP adalah membandingkan tingkat prioritas beberapa elemen atau variabel pada suatu level atau tingkatan dari suatu susunan hirarki. Hasil dari proses perbandingan tersebut diberi bobot secara numerik sehingga variabel yang mendapat prioritas tertinggi dalam akhir proses analisis akan menjadi pilihan yang terbaik.

Struktur hierarki dalam pengisian kuesioner berikut ini terdiri dari :

1. Tingkatan pertama adalah tujuan atau goal yakni Strategi Kebijakan Pengembangan Pembangunan Wilayah, yang dirumuskan dengan tujuan dalam rangka Pengembangan Pembangunan Wilayah di Kabupaten Muna yang didasarkan pada sektor-sektor basis dan non basis.
2. Tingkatan kedua adalah aspek strategi kebijakan pengembangan pembangunan wilayah, yang terdiri dari :
  - a. Pengembangan kualitas sumber daya manusia
  - b. Promosi daerah.
  - c. Pengembangan infrastruktur pendukung
  - d. Pelayanan publik.
3. Tingkatan ketiga kriteria kebijakan pengembangan pembangunan wilayah, yang meliputi :
  - a. Pendidikan dan pelatihan
  - b. Peningkatan Kualitas aparat
  - c. Pemasaran daerah
  - d. Masterplan daerah
  - e. E-marketing

- f. Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur fisik
- g. Kerjasama antar daerah dalam penyediaan infrastruktur fisik
- h. Perizinan
- i. Pemantapan hukum.

Mohon Bapak/Ibu mencermati struktur hirarki pada gambar berikut, mengenai strategi kebijakan dalam rangka Pengembangan Pembangunan Wilayah di Kabupaten Muna yang didasarkan pada sektor-sektor basis dan non basis.



## 2.2. Petunjuk Pengisian Kuesioner AHP.

- a. Penilaian (judgment) terhadap elemen-elemen dari setiap level hierarki didasarkan atas bobot prioritas atau kepentingannya. Penilaian pada

responden dinyatakan secara numerik ( skala 1 sampai 9 ) dengan devenisi verbal sebagai berikut :

| <b>Intensitas Pentingnya</b> | <b>Definisi</b>             | <b>Penjelasan</b>  |
|------------------------------|-----------------------------|--|
| 1                            | Sama penting                | A dan B sama penting                                     |
| 3                            | Sedikit lebih penting       | A sedikit lebih penting dari B                           |
| 5                            | Agak lebih penting          | A agak lebih penting dari B                              |
| 7                            | Jauh lebih penting          | A jauh lebih penting dari B                              |
| 9                            | Mutlak lebih penting        | A mutlak lebih penting dari B                            |
| 2,4,6,8                      | Nilai antara angka diatas   | Ragu-ragu dalam menentukan skala missal 6 antara 5 dan 7 |
| Reciprocal                   | Jika $A/B=9$ maka $B/A=1/9$ | Asumsi masuk akal  |

- b. Proses penilaian kepentingan relatif antara dua elemen tersebut dan berlaku aksioma reciprocal, artinya jika elemn  $i$  dinilai 3 kali lebih penting dibandingkan elemen  $j$ , maka elemen  $j$  harus sama dengan  $1/3$  kali lebih penting dibandingkan elemen  $i$ .
- c. Jika elemen pada kolom sebelah kiri (kolom 1) lebih penting dibandingkan dengan elemen sebelah kanan (kolom 2), maka nilai perbandingan ditulis pada belahan sebelah kiri dan jika sebaliknya ,maka ditulis sebelah kanan.

### 3. Daftar lembar pertanyaan responden, sebagai berikut :

**LEMBAR PERTANYAAN :****Responden 01**

Nama : LA ONE, ST, MT, PG, Dipl  
 Instansi : Bappeda dan PM Kabupaten Muna  
 Alamat / Tlp : Jl. M Husni Thamrin No. 18 Raha / 081381018111  
 Tanggal Pengisian : 24 Agustus 2011.

1. Dari beberapa aspek berikut ini, manakah menurut Bapak/Ibu strategi yang paling prioritas dalam rangka pengembangan pembangunan wilayah di Kabupaten Muna? (Bandingkan beberapa aspek pada kolom 1 dengan beberapa aspek di baris yang sama pada kolom 2).

| Aspek Perioritas Kebijakan                 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | Aspek Perioritas Kebijakan                 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Aspek Pengembangan SDM                     |   |   |   |   |   | X |   |   |   | Aspek Promosi Daerah                       |
| Aspek Pengembangan SDM                     |   |   |   |   |   |   |   |   | X | Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung |
| Aspek Pengembangan SDM                     |   |   |   |   |   |   |   | X |   | Aspek Pelayanan Publik                     |
| Aspek Promosi Daerah                       |   |   |   |   |   |   | X |   |   | Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung |
| Aspek Promosi Daerah                       |   |   |   |   |   |   |   |   | X | Aspek Pelayanan Publik                     |
| Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung |   |   |   |   |   | X |   |   |   | Aspek Pelayanan Publik                     |

2. Untuk Aspek Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, menurut Bapak/Ibu, manakah kriteria yang diprioritaskan dalam mendukung pengembangan kualitas SDM? (Bandingkan kriteria pada kolom 1 dengan kriteria di baris yang sama pada kolom 2).

| Aspek Pengembangan SDM            | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | Aspek Pengembangan SDM            |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------|
| Kriteria Pendidikan Dan Pelatihan |   |   | X |   |   |   |   |   |   | Kriteria Pendidikan Dan Pelatihan |

### Lanjutan Responden 01

3. Untuk Aspek Promosi Daerah, menurut Bapak/Ibu kriteria manakah yang diprioritaskan dalam mendukung kebijakan promosi daerah ?  
( Bandingkan kriteria - kriteria pada kolom 1 dengan kriteria - kriteria di baris yang sama pada kolom 2 )

| Aspek Promosi Daerah       | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | Aspek Promosi Daerah       |
|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------|
| Kriteria Masterplan daerah |   |   |   |   | X |   |   |   |   | Kriteria Masterplan daerah |
| Kriteria Masterplan daerah |   |   |   | X |   |   |   |   |   | Kriteria E-Marketing       |
| Kriteria Masterplan daerah |   | X |   |   |   |   |   |   |   | Kriteria E-Marketing       |

4. Untuk Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung, menurut Bapak/Ibu manakah yang diprioritaskan dalam mendukung strategi pengembangan infrastruktur pendukung ? (Bandingkan kriteria - kriteria pada kolom 1 dengan kriteria di baris yang sama pada kolom 2)

| Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung               | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung                            |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kriteria Penyediaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Fisik | X |   |   |   |   |   |   |   |   | Kriteria Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Infrastruktur Fisik. |

5. Untuk Aspek Pelayanan Publik, menurut Bapak/Ibu manakah kriteria diprioritas dalam mendukung aspek pelayanan publik ?  
( Bandingkan kriteria - kriteria pada kolom 1 dengan kriteria - kriteria di baris yang sama pada kolom 2 )

| Aspek Pelayanan Publik | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | Aspek Pelayanan Publik    |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------|
| Kriteria Perizinan     |   |   |   |   |   |   |   |   | X | Kriteria Pemanjagan Hukum |

**LEMBAR PERTANYAAN :****Responden 02**

Nama : WA ODE SITTI SURIATI  
 Instansi : -  
 Alamat / Tlp : Jl. Pendidikan Raha / 081245917663  
 Tanggal Pengisian : 22 Agustus 2011.

1. Dari beberapa aspek berikut ini, manakah menurut Bapak/Ibu strategi yang paling prioritas dalam rangka pengembangan pembangunan wilayah di Kabupaten Muna? (Bandingkan beberapa aspek pada kolom 1 dengan beberapa aspek di baris yang sama pada kolom 2).

| Aspek Perioritas Kebijakan                 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | Aspek Perioritas Kebijakan                 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Aspek Pengembangan SDM                     |   |   |   | X |   |   |   |   |   | Aspek Promosi Daerah                       |
| Aspek Pengembangan SDM                     |   |   | X |   |   |   |   |   |   | Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung |
| Aspek Pengembangan SDM                     |   | X |   |   |   |   |   |   |   | Aspek Pelayanan Publik                     |
| Aspek Promosi Daerah                       |   |   |   |   |   |   | X |   |   | Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung |
| Aspek Promosi Daerah                       |   |   |   | X |   |   |   |   |   | Aspek Pelayanan Publik                     |
| Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung |   |   |   |   | X |   |   |   |   | Aspek Pelayanan Publik                     |

2. Untuk Aspek Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, menurut Bapak/Ibu, manakah kriteria yang diprioritaskan dalam mendukung pengembangan kualitas SDM? (Bandingkan kriteria pada kolom 1 dengan kriteria di baris yang sama pada kolom 2).

| Aspek Pengembangan SDM            | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | Aspek Pengembangan SDM            |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------|
| Kriteria Pendidikan Dan Pelatihan |   |   |   | X |   |   |   |   |   | Kriteria Pendidikan Dan Pelatihan |

### Lanjutan Responden 02

3. Untuk Aspek Promosi Daerah, menurut Bapak/Ibu kriteria manakah yang diprioritaskan dalam mendukung kebijakan promosi daerah ?  
( Bandingkan kriteria - kriteria pada kolom 1 dengan kriteria - kriteria di baris yang sama pada kolom 2 )

| Aspek Promosi Daerah       | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | Aspek Promosi Daerah       |
|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------|
| Kriteria Masterplan daerah |   |   |   |   |   |   | X |   |   | Kriteria Masterplan daerah |
| Kriteria Masterplan daerah |   |   |   |   |   |   |   | X |   | Kriteria E-Marketing       |
| Kriteria Masterplan daerah |   |   |   |   | X |   |   |   |   | Kriteria E-Marketing       |

4. Untuk Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung, menurut Bapak/Ibu manakah yang diprioritaskan dalam mendukung strategi pengembangan infrastruktur pendukung ? (Bandingkan kriteria - kriteria pada kolom 1 dengan kriteria di baris yang sama pada kolom 2)

| Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung               | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung                            |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kriteria Penyediaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Fisik |   |   |   |   |   | X |   |   |   | Kriteria Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Infrastruktur Fisik. |

5. Untuk Aspek Pelayanan Publik, menurut Bapak/Ibu manakah kriteria diprioritas dalam mendukung aspek pelayanan publik ?  
( Bandingkan kriteria - kriteria pada kolom 1 dengan kriteria - kriteria di baris yang sama pada kolom 2 )

| Aspek Pelayanan Publik | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | Aspek Pelayanan Publik    |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------|
| Kriteria Perizinan     | X |   |   |   |   |   |   |   |   | Kriteria Pemanjagan Hukum |

**LEMBAR PERTANYAAN :****Responden 03**

Nama : ABDUL RAHMAN HARUDDIN  
 Instansi : -  
 Alamat / Tlp : Jl. Bunga Dahlia No. 15 Raha / 081341836161  
 Tanggal Pengisian : 25 Agustus 2011.

1. Dari beberapa aspek berikut ini, manakah menurut Bapak/Ibu strategi yang paling prioritas dalam rangka pengembangan pembangunan wilayah di Kabupaten Muna? (Bandingkan beberapa aspek pada kolom 1 dengan beberapa aspek di baris yang sama pada kolom 2).

| Aspek Perioritas Kebijakan                 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | Aspek Perioritas Kebijakan                 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Aspek Pengembangan SDM                     |   |   | X |   |   |   |   |   |   | Aspek Promosi Daerah                       |
| Aspek Pengembangan SDM                     |   | X |   |   |   |   |   |   |   | Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung |
| Aspek Pengembangan SDM                     | X |   |   |   |   |   |   |   |   | Aspek Pelayanan Publik                     |
| Aspek Promosi Daerah                       |   |   |   |   | X |   |   |   |   | Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung |
| Aspek Promosi Daerah                       |   | X |   |   |   |   |   |   |   | Aspek Pelayanan Publik                     |
| Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung |   |   |   | X |   |   |   |   |   | Aspek Pelayanan Publik                     |

2. Untuk Aspek Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, menurut Bapak/Ibu, manakah kriteria yang diprioritaskan dalam mendukung pengembangan kualitas SDM? (Bandingkan kriteria pada kolom 1 dengan kriteria di baris yang sama pada kolom 2).

| Aspek Pengembangan SDM            | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | Aspek Pengembangan SDM            |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------|
| Kriteria Pendidikan Dan Pelatihan |   |   |   | X |   |   |   |   |   | Kriteria Pendidikan Dan Pelatihan |

### Lanjutan Responden 03

3. Untuk Aspek Promosi Daerah, menurut Bapak/Ibu kriteria manakah yang diprioritaskan dalam mendukung kebijakan promosi daerah ?  
( Bandingkan kriteria - kriteria pada kolom 1 dengan kriteria - kriteria di baris yang sama pada kolom 2 )

| Aspek Promosi Daerah       | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | Aspek Promosi Daerah       |
|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------|
| Kriteria Masterplan daerah |   |   |   |   |   |   | X |   |   | Kriteria Masterplan daerah |
| Kriteria Masterplan daerah |   |   |   |   |   |   |   | X |   | Kriteria E-Marketing       |
| Kriteria Masterplan daerah |   |   |   |   | X |   |   |   |   | Kriteria E-Marketing       |

4. Untuk Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung, menurut Bapak/Ibu manakah yang diprioritaskan dalam mendukung strategi pengembangan infrastruktur pendukung ? (Bandingkan kriteria - kriteria pada kolom 1 dengan kriteria di baris yang sama pada kolom 2)

| Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung               | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung                            |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kriteria Penyediaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Fisik |   |   |   | X |   |   |   |   |   | Kriteria Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Infrastruktur Fisik. |

5. Untuk Aspek Pelayanan Publik, menurut Bapak/Ibu manakah kriteria diprioritas dalam mendukung aspek pelayanan publik ?  
( Bandingkan kriteria - kriteria pada kolom 1 dengan kriteria - kriteria di baris yang sama pada kolom 2 )

| Aspek Pelayanan Publik | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | Aspek Pelayanan Publik     |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------|
| Kriteria Perizinan     |   |   |   |   | X |   |   |   |   | Kriteria Pemanjanaan Hukum |

**LEMBAR PERTANYAAN :****Responden 04**

Nama : Ir. SYAHRIR, M.Tp  
 Instansi : Bappeda Dan PM Kabupaten Muna  
 Alamat / Tlp : Jl. M Husni Thamrin No. 18 Raha / 081381018111  
 Tanggal Pengisian : 27 Agustus 2011.

1. Dari beberapa aspek berikut ini , manakah menurut Bapak/Ibu strategi yang paling prioritas dalam rangka pengembangan pembangunan wilayah di Kabupaten Muna ? ( Bandingkan beberapa aspek pada kolom 1 dengan beberapa aspek di baris yang sama pada kolom 2 ).

| <b>Aspek Perioritas Kebijakan</b>          | <b>9</b> |  | <b>7</b> |  | <b>5</b> |  | <b>3</b> |  | <b>1</b> |  | <b>3</b> |  | <b>5</b> |  | <b>7</b> |  | <b>9</b> | <b>Aspek Perioritas Kebijakan</b>          |
|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|
| Aspek Pengembangan SDM                     |          |  | X        |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          | Aspek Promosi Daerah                       |
| Aspek Pengembangan SDM                     |          |  |          |  |          |  |          |  | X        |  |          |  |          |  |          |  |          | Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung |
| Aspek Pengembangan SDM                     | X        |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          | Aspek Pelayanan Publik                     |
| Aspek Promosi Daerah                       |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  | X        |  |          |  |          |  |          | Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung |
| Aspek Promosi Daerah                       |          |  |          |  | X        |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          | Aspek Pelayanan Publik                     |
| Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung |          |  |          |  | X        |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          | Aspek Pelayanan Publik                     |

2. Untuk Aspek Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, menurut Bapak/Ibu, manakah kriteria yang diprioritaskan dalam mendukung pengembangan kualitas SDM ? ( Bandingkan kriteria pada kolom 1 dengan kriteria di baris yang sama pada kolom 2 ).

| <b>Aspek Pengembangan SDM</b>     | <b>9</b> |  | <b>7</b> |  | <b>5</b> |  | <b>3</b> |  | <b>1</b> |  | <b>3</b> |  | <b>5</b> |  | <b>7</b> |  | <b>9</b> | <b>Aspek Pengembangan SDM</b>     |
|-----------------------------------|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|-----------------------------------|
| Kriteria Pendidikan Dan Pelatihan | X        |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          | Kriteria Pendidikan Dan Pelatihan |

### Lanjutan Responden 04

3. Untuk Aspek Promosi Daerah, menurut Bapak/Ibu kriteria manakah yang diprioritaskan dalam mendukung kebijakan promosi daerah ?  
( Bandingkan kriteria - kriteria pada kolom 1 dengan kriteria - kriteria di baris yang sama pada kolom 2 )

| Aspek Promosi Daerah       | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | Aspek Promosi Daerah       |
|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------|
| Kriteria Masterplan daerah |   |   |   |   |   | X |   |   |   | Kriteria Masterplan daerah |
| Kriteria Masterplan daerah |   |   |   |   |   |   | X |   |   | Kriteria E-Marketing       |
| Kriteria Masterplan daerah |   |   |   | X |   |   |   |   |   | Kriteria E-Marketing       |

4. Untuk Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung, menurut Bapak/Ibu manakah yang diprioritaskan dalam mendukung strategi pengembangan infrastruktur pendukung ? (Bandingkan kriteria - kriteria pada kolom 1 dengan kriteria di baris yang sama pada kolom 2)

| Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung               | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung                            |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kriteria Penyediaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Fisik |   | X |   |   |   |   |   |   |   | Kriteria Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Infrastruktur Fisik. |

5. Untuk Aspek Pelayanan Publik, menurut Bapak/Ibu manakah kriteria diprioritas dalam mendukung aspek pelayanan publik ?  
( Bandingkan kriteria - kriteria pada kolom 1 dengan kriteria - kriteria di baris yang sama pada kolom 2 )

| Aspek Pelayanan Publik | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | Aspek Pelayanan Publik    |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------|
| Kriteria Perizinan     |   |   |   |   | X |   |   |   |   | Kriteria Pemantapan Hukum |

**LEMBAR PERTANYAAN :****Responden 05**

Nama : LA ODE NAFTAHU  
 Instansi : DPRD Kanupaten Muna  
 Alamat / Tlp : Jl. M Husni Thamrin No. 14 Raha / 081341572935  
 Tanggal Pengisian : 29 Agustus 2011.

1. Dari beberapa aspek berikut ini , manakah menurut Bapak/Ibu strategi yang paling prioritas dalam rangka pengembangan pembangunan wilayah di Kabupaten Muna ? ( Bandingkan beberapa aspek pada kolom 1 dengan beberapa aspek di baris yang sama pada kolom 2 ).

| Aspek Perioritas Kebijakan                 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | Aspek Perioritas Kebijakan                 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Aspek Pengembangan SDM                     |   |   |   | X |   |   |   |   |   | Aspek Promosi Daerah                       |
| Aspek Pengembangan SDM                     |   |   |   | X |   |   |   |   |   | Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung |
| Aspek Pengembangan SDM                     |   | X |   |   |   |   |   |   |   | Aspek Pelayanan Publik                     |
| Aspek Promosi Daerah                       |   |   |   |   |   |   | X |   |   | Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung |
| Aspek Promosi Daerah                       |   |   |   |   | X |   |   |   |   | Aspek Pelayanan Publik                     |
| Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung |   |   |   | X |   |   |   |   |   | Aspek Pelayanan Publik                     |

2. Untuk Aspek Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, menurut Bapak/Ibu, manakah kriteria yang diprioritaskan dalam mendukung pengembangan kualitas SDM ? ( Bandingkan kriteria pada kolom 1 dengan kriteria di baris yang sama pada kolom 2 ).

| Aspek Pengembangan SDM            | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | Aspek Pengembangan SDM            |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------|
| Kriteria Pendidikan Dan Pelatihan |   |   |   |   | X |   |   |   |   | Kriteria Pendidikan Dan Pelatihan |

### Lanjutan Responden 05

3. Untuk Aspek Promosi Daerah, menurut Bapak/Ibu kriteria manakah yang diprioritaskan dalam mendukung kebijakan promosi daerah ?  
( Bandingkan kriteria - kriteria pada kolom 1 dengan kriteria - kriteria di baris yang sama pada kolom 2 )

| Aspek Promosi Daerah       | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | Aspek Promosi Daerah       |
|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------|
| Kriteria Masterplan daerah |   |   |   |   |   | X |   |   |   | Kriteria Masterplan daerah |
| Kriteria Masterplan daerah |   |   |   |   |   |   |   | X |   | Kriteria E-Marketing       |
| Kriteria Masterplan daerah |   |   | X |   |   |   |   |   |   | Kriteria E-Marketing       |

4. Untuk Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung, menurut Bapak/Ibu manakah yang diprioritaskan dalam mendukung strategi pengembangan infrastruktur pendukung ? (Bandingkan kriteria - kriteria pada kolom 1 dengan kriteria di baris yang sama pada kolom 2)

| Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung               | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung                            |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kriteria Penyediaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Fisik |   | X |   |   |   |   |   |   |   | Kriteria Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Infrastruktur Fisik. |

5. Untuk Aspek Pelayanan Publik, menurut Bapak/Ibu manakah kriteria diprioritas dalam mendukung aspek pelayanan publik ?  
( Bandingkan kriteria - kriteria pada kolom 1 dengan kriteria - kriteria di baris yang sama pada kolom 2 )

| Aspek Pelayanan Publik | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | Aspek Pelayanan Publik    |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------|
| Kriteria Perizinan     | X |   |   |   |   |   |   |   |   | Kriteria Pemantapan Hukum |

**LEMBAR PERTANYAAN :****Responden 06**

Nama : R DJAMUN SUNJOTO, S.Pd, M.Si  
 Instansi : Pemerintah Kecamatan Duruka  
 Alamat / Tlp : Kecamatan Duruka / 081328845557  
 Tanggal Pengisian : 30 Agustus 2011.

1. Dari beberapa aspek berikut ini, manakah menurut Bapak/Ibu strategi yang paling prioritas dalam rangka pengembangan pembangunan wilayah di Kabupaten Muna? (Bandingkan beberapa aspek pada kolom 1 dengan beberapa aspek di baris yang sama pada kolom 2).

| Aspek Perioritas Kebijakan                 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | Aspek Perioritas Kebijakan                 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Aspek Pengembangan SDM                     |   |   | X |   |   |   |   |   |   | Aspek Promosi Daerah                       |
| Aspek Pengembangan SDM                     |   | X |   |   |   |   |   |   |   | Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung |
| Aspek Pengembangan SDM                     |   |   |   | X |   |   |   |   |   | Aspek Pelayanan Publik                     |
| Aspek Promosi Daerah                       |   |   |   | X |   |   |   |   |   | Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung |
| Aspek Promosi Daerah                       |   |   |   |   |   |   |   |   | X | Aspek Pelayanan Publik                     |
| Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung |   |   |   |   |   |   | X |   |   | Aspek Pelayanan Publik                     |

2. Untuk Aspek Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, menurut Bapak/Ibu, manakah kriteria yang diprioritaskan dalam mendukung pengembangan kualitas SDM? (Bandingkan kriteria pada kolom 1 dengan kriteria di baris yang sama pada kolom 2).

| Aspek Pengembangan SDM            | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | Aspek Pengembangan SDM            |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------|
| Kriteria Pendidikan Dan Pelatihan |   | X |   |   |   |   |   |   |   | Kriteria Pendidikan Dan Pelatihan |

### Lanjutan Responden 06

3. Untuk Aspek Promosi Daerah, menurut Bapak/Ibu kriteria manakah yang diprioritaskan dalam mendukung kebijakan promosi daerah ?  
( Bandingkan kriteria - kriteria pada kolom 1 dengan kriteria - kriteria di baris yang sama pada kolom 2 )

| Aspek Promosi Daerah       | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | Aspek Promosi Daerah       |
|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------|
| Kriteria Masterplan daerah |   |   |   |   |   | X |   |   |   | Kriteria Masterplan daerah |
| Kriteria Masterplan daerah |   | X |   |   |   |   |   |   |   | Kriteria E-Marketing       |
| Kriteria Masterplan daerah |   | X |   |   |   |   |   |   |   | Kriteria E-Marketing       |

4. Untuk Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung, menurut Bapak/Ibu manakah yang diprioritaskan dalam mendukung strategi pengembangan infrastruktur pendukung ? (Bandingkan kriteria - kriteria pada kolom 1 dengan kriteria di baris yang sama pada kolom 2)

| Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung               | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung                            |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kriteria Penyediaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Fisik |   |   |   |   |   |   | X |   |   | Kriteria Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Infrastruktur Fisik. |

5. Untuk Aspek Pelayanan Publik, menurut Bapak/Ibu manakah kriteria diprioritas dalam mendukung aspek pelayanan publik ?  
( Bandingkan kriteria - kriteria pada kolom 1 dengan kriteria - kriteria di baris yang sama pada kolom 2 )

| Aspek Pelayanan Publik | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | Aspek Pelayanan Publik    |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------|
| Kriteria Perizinan     |   | X |   |   |   |   |   |   |   | Kriteria Pemanjagan Hukum |

**LEMBAR PERTANYAAN :****Responden 07**

Nama : Ir. LA ODE HIDAYAT, M.Si  
 Instansi : STIP Wuna ( Akademisi )  
 Alamat / Tlp : Jl. Gatot Subroto Desa Motewe / 085341682924  
 Tanggal Pengisian : 25 Agustus 2011.

1. Dari beberapa aspek berikut ini , manakah menurut Bapak/Ibu strategi yang paling prioritas dalam rangka pengembangan pembangunan wilayah di Kabupaten Muna ? ( Bandingkan beberapa aspek pada kolom 1 dengan beberapa aspek di baris yang sama pada kolom 2 ).

| Aspek Perioritas Kebijakan                 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | Aspek Perioritas Kebijakan                 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Aspek Pengembangan SDM                     |   |   |   | X |   |   |   |   |   | Aspek Promosi Daerah                       |
| Aspek Pengembangan SDM                     |   |   | X |   |   |   |   |   |   | Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung |
| Aspek Pengembangan SDM                     |   |   |   |   |   |   |   | X |   | Aspek Pelayanan Publik                     |
| Aspek Promosi Daerah                       |   |   | X |   |   |   |   |   |   | Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung |
| Aspek Promosi Daerah                       |   |   |   |   |   | X |   |   |   | Aspek Pelayanan Publik                     |
| Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung |   |   |   |   |   |   |   | X |   | Aspek Pelayanan Publik                     |

2. Untuk Aspek Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, menurut Bapak/Ibu, manakah kriteria yang diprioritaskan dalam mendukung pengembangan kualitas SDM ? ( Bandingkan kriteria pada kolom 1 dengan kriteria di baris yang sama pada kolom 2 ).

| Aspek Pengembangan SDM            | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | Aspek Pengembangan SDM            |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------|
| Kriteria Pendidikan Dan Pelatihan |   |   |   | X |   |   |   |   |   | Kriteria Pendidikan Dan Pelatihan |

**Lanjutan Responden 07**

3. Untuk Aspek Promosi Daerah, menurut Bapak/Ibu kriteria manakah yang diprioritaskan dalam mendukung kebijakan promosi daerah ?  
( Bandingkan kriteria - kriteria pada kolom 1 dengan kriteria - kriteria di baris yang sama pada kolom 2 )

| <b>Aspek Promosi Daerah</b> | <b>9</b> |  | <b>7</b> |  | <b>5</b> |  | <b>3</b> |  | <b>1</b> |  | <b>3</b> |  | <b>5</b> |  | <b>7</b> |  | <b>9</b> | <b>Aspek Promosi Daerah</b> |
|-----------------------------|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|-----------------------------|
| Kriteria Masterplan daerah  |          |  |          |  | X        |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          | Kriteria Masterplan daerah  |
| Kriteria Masterplan daerah  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  | X        |  |          |  |          | Kriteria E-Marketing        |
| Kriteria Masterplan daerah  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  | X        |  |          | Kriteria E-Marketing        |

4. Untuk Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung, menurut Bapak/Ibu manakah yang diprioritaskan dalam mendukung strategi pengembangan infrastruktur pendukung ? (Bandingkan kriteria - kriteria pada kolom 1 dengan kriteria di baris yang sama pada kolom 2)

| <b>Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung</b>        | <b>9</b> |  | <b>7</b> |  | <b>5</b> |  | <b>3</b> |  | <b>1</b> |  | <b>3</b> |  | <b>5</b> |  | <b>7</b> |  | <b>9</b> | <b>Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung</b>                     |
|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|---|
| Kriteria Penyediaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Fisik |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  | X        | Kriteria Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Infrastruktur Fisik. |

5. Untuk Aspek Pelayanan Publik, menurut Bapak/Ibu manakah kriteria diprioritas dalam mendukung aspek pelayanan publik ?  
( Bandingkan kriteria - kriteria pada kolom 1 dengan kriteria - kriteria di baris yang sama pada kolom 2 )

| <b>Aspek Pelayanan Publik</b> | <b>9</b> |  | <b>7</b> |  | <b>5</b> |  | <b>3</b> |  | <b>1</b> |  | <b>3</b> |  | <b>5</b> |  | <b>7</b> |  | <b>9</b> | <b>Aspek Pelayanan Publik</b> |
|-------------------------------|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|-------------------------------|
| Kriteria Perizinan            |          |  | X        |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          | Kriteria Pemanjanaan Hukum    |

**LEMBAR PERTANYAAN :**

**Responden 08**

Nama : Drs. IBRAHIM RASIMU, M.Si  
 Instansi : Kecamatan Wakorumba Selatan  
 Alamat / Tlp : Wakorumba Selatan / 085341303767  
 Tanggal Pengisian : 21 Agustus 2011.

1. Dari beberapa aspek berikut ini , manakah menurut Bapak/Ibu strategi yang paling prioritas dalam rangka pengembangan pembangunan wilayah di Kabupaten Muna ? ( Bandingkan beberapa aspek pada kolom 1 dengan beberapa aspek di baris yang sama pada kolom 2 ).

| Aspek Perioritas Kebijakan                 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | Aspek Perioritas Kebijakan                 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Aspek Pengembangan SDM                     |   |   |   | X |   |   |   |   |   | Aspek Promosi Daerah                       |
| Aspek Pengembangan SDM                     | X |   |   |   |   |   |   |   |   | Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung |
| Aspek Pengembangan SDM                     | X |   |   |   |   |   |   |   |   | Aspek Pelayanan Publik                     |
| Aspek Promosi Daerah                       |   |   |   |   | X |   |   |   |   | Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung |
| Aspek Promosi Daerah                       |   |   | X |   |   |   |   |   |   | Aspek Pelayanan Publik                     |
| Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung |   |   |   |   | X |   |   |   |   | Aspek Pelayanan Publik                     |

2. Untuk Aspek Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, menurut Bapak/Ibu, manakah kriteria yang diprioritaskan dalam mendukung pengembangan kualitas SDM ? ( Bandingkan kriteria pada kolom 1 dengan kriteria di baris yang sama pada kolom 2 ).

| Aspek Pengembangan SDM            | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | Aspek Pengembangan SDM            |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------|
| Kriteria Pendidikan Dan Pelatihan | X |   |   |   |   |   |   |   |   | Kriteria Pendidikan Dan Pelatihan |

**Lanjutan Responden 08**

3. Untuk Aspek Promosi Daerah, menurut Bapak/Ibu kriteria manakah yang diprioritaskan dalam mendukung kebijakan promosi daerah ?  
( Bandingkan kriteria - kriteria pada kolom 1 dengan kriteria - kriteria di baris yang sama pada kolom 2 )

| <b>Aspek Promosi Daerah</b> | <b>9</b> |  | <b>7</b> |  | <b>5</b> |  | <b>3</b> |  | <b>1</b> |  | <b>3</b> |  | <b>5</b> |  | <b>7</b> |  | <b>9</b> | <b>Aspek Promosi Daerah</b> |
|-----------------------------|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|-----------------------------|
| Kriteria Masterplan daerah  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  | X        |  |          |  |          | Kriteria Masterplan daerah  |
| Kriteria Masterplan daerah  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  | X        |  |          |  |          | Kriteria E-Marketing        |
| Kriteria Masterplan daerah  |          |  |          |  |          |  |          |  | X        |  |          |  |          |  |          |  |          | Kriteria E-Marketing        |

4. Untuk Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung, menurut Bapak/Ibu manakah yang diprioritaskan dalam mendukung strategi pengembangan infrastruktur pendukung ? (Bandingkan kriteria - kriteria pada kolom 1 dengan kriteria di baris yang sama pada kolom 2)

| <b>Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung</b>        | <b>9</b> |  | <b>7</b> |  | <b>5</b> |  | <b>3</b> |  | <b>1</b> |  | <b>3</b> |  | <b>5</b> |  | <b>7</b> |  | <b>9</b> | <b>Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung</b>                     |
|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|---|
| Kriteria Penyediaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Fisik |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  | X        |  |          |  |          | Kriteria Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Infrastruktur Fisik. |

5. Untuk Aspek Pelayanan Publik, menurut Bapak/Ibu manakah kriteria diprioritas dalam mendukung aspek pelayanan publik ?  
( Bandingkan kriteria - kriteria pada kolom 1 dengan kriteria - kriteria di baris yang sama pada kolom 2 )

| <b>Aspek Pelayanan Publik</b> | <b>9</b> |  | <b>7</b> |  | <b>5</b> |  | <b>3</b> |  | <b>1</b> |  | <b>3</b> |  | <b>5</b> |  | <b>7</b> |  | <b>9</b> | <b>Aspek Pelayanan Publik</b> |
|-------------------------------|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|-------------------------------|
| Kriteria Perizinan            |          |  |          |  | X        |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          | Kriteria Pemanjanaan Hukum    |

**LEMBAR PERTANYAAN :****Responden 09**

Nama : Drs. LA ODE KILO  
 Instansi : -  
 Alamat / Tlp : Kelurahan Wamponiki Raha / 082190821111  
 Tanggal Pengisian : 5 Agustus 2011.

1. Dari beberapa aspek berikut ini, manakah menurut Bapak/Ibu strategi yang paling prioritas dalam rangka pengembangan pembangunan wilayah di Kabupaten Muna? (Bandingkan beberapa aspek pada kolom 1 dengan beberapa aspek di baris yang sama pada kolom 2).

| Aspek Perioritas Kebijakan                 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | Aspek Perioritas Kebijakan                 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Aspek Pengembangan SDM                     |   |   |   | X |   |   |   |   |   | Aspek Promosi Daerah                       |
| Aspek Pengembangan SDM                     |   |   |   |   |   |   |   |   | X | Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung |
| Aspek Pengembangan SDM                     |   |   |   |   |   |   |   | X |   | Aspek Pelayanan Publik                     |
| Aspek Promosi Daerah                       |   |   |   |   |   |   |   | X |   | Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung |
| Aspek Promosi Daerah                       |   |   |   |   |   |   |   |   | X | Aspek Pelayanan Publik                     |
| Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung |   |   | X |   |   |   |   |   |   | Aspek Pelayanan Publik                     |

2. Untuk Aspek Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, menurut Bapak/Ibu, manakah kriteria yang diprioritaskan dalam mendukung pengembangan kualitas SDM? (Bandingkan kriteria pada kolom 1 dengan kriteria di baris yang sama pada kolom 2).

| Aspek Pengembangan SDM            | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | Aspek Pengembangan SDM            |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------|
| Kriteria Pendidikan Dan Pelatihan |   |   |   |   |   |   | X |   |   | Kriteria Pendidikan Dan Pelatihan |

### Lanjutan Responden 09

3. Untuk Aspek Promosi Daerah, menurut Bapak/Ibu kriteria manakah yang diprioritaskan dalam mendukung kebijakan promosi daerah ?  
( Bandingkan kriteria - kriteria pada kolom 1 dengan kriteria - kriteria di baris yang sama pada kolom 2 )

| Aspek Promosi Daerah       | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | Aspek Promosi Daerah       |
|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------|
| Kriteria Masterplan daerah |   |   |   |   |   | X |   |   |   | Kriteria Masterplan daerah |
| Kriteria Masterplan daerah |   |   |   |   |   |   |   |   | X | Kriteria E-Marketing       |
| Kriteria Masterplan daerah |   |   |   | X |   |   |   |   |   | Kriteria E-Marketing       |

4. Untuk Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung, menurut Bapak/Ibu manakah yang diprioritaskan dalam mendukung strategi pengembangan infrastruktur pendukung ? (Bandingkan kriteria - kriteria pada kolom 1 dengan kriteria di baris yang sama pada kolom 2)

| Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung               | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung                            |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kriteria Penyediaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Fisik | X |   |   |   |   |   |   |   |   | Kriteria Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Infrastruktur Fisik. |

5. Untuk Aspek Pelayanan Publik, menurut Bapak/Ibu manakah kriteria diprioritas dalam mendukung aspek pelayanan publik ?  
( Bandingkan kriteria - kriteria pada kolom 1 dengan kriteria - kriteria di baris yang sama pada kolom 2 )

| Aspek Pelayanan Publik | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | Aspek Pelayanan Publik    |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------|
| Kriteria Perizinan     |   |   |   |   |   | X |   |   |   | Kriteria Pemantapan Hukum |

**LEMBAR PERTANYAAN :****Responden 10**

Nama : LA ODE SAIRUDDIN  
 Instansi : LSM  
 Alamat / Tlp : Jl. Siswa No. 6 Raha / 081341702487  
 Tanggal Pengisian : 22 Agustus 2011.

1. Dari beberapa aspek berikut ini, manakah menurut Bapak/Ibu strategi yang paling prioritas dalam rangka pengembangan pembangunan wilayah di Kabupaten Muna? (Bandingkan beberapa aspek pada kolom 1 dengan beberapa aspek di baris yang sama pada kolom 2).

| Aspek Perioritas Kebijakan                 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | Aspek Perioritas Kebijakan                 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Aspek Pengembangan SDM                     |   |   |   | X |   |   |   |   |   | Aspek Promosi Daerah                       |
| Aspek Pengembangan SDM                     |   |   |   |   | X |   |   |   |   | Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung |
| Aspek Pengembangan SDM                     |   |   | X |   |   |   |   |   |   | Aspek Pelayanan Publik                     |
| Aspek Promosi Daerah                       |   |   |   |   |   | X |   |   |   | Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung |
| Aspek Promosi Daerah                       |   |   |   |   | X |   |   |   |   | Aspek Pelayanan Publik                     |
| Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung |   |   |   | X |   |   |   |   |   | Aspek Pelayanan Publik                     |

2. Untuk Aspek Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, menurut Bapak/Ibu, manakah kriteria yang diprioritaskan dalam mendukung pengembangan kualitas SDM? (Bandingkan kriteria pada kolom 1 dengan kriteria di baris yang sama pada kolom 2).

| Aspek Pengembangan SDM            | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | Aspek Pengembangan SDM            |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------|
| Kriteria Pendidikan Dan Pelatihan |   |   |   | X |   |   |   |   |   | Kriteria Pendidikan Dan Pelatihan |

**Lanjutan Responden 10**

3. Untuk Aspek Promosi Daerah, menurut Bapak/Ibu kriteria manakah yang diprioritaskan dalam mendukung kebijakan promosi daerah ?  
( Bandingkan kriteria - kriteria pada kolom 1 dengan kriteria - kriteria di baris yang sama pada kolom 2 )

| <b>Aspek Promosi Daerah</b> | <b>9</b> |  | <b>7</b> |  | <b>5</b> |  | <b>3</b> |  | <b>1</b> |  | <b>3</b> |  | <b>5</b> |  | <b>7</b> |  | <b>9</b> | <b>Aspek Promosi Daerah</b> |
|-----------------------------|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|-----------------------------|
| Kriteria Masterplan daerah  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  | X        |  |          |  |          | Kriteria Masterplan daerah  |
| Kriteria Masterplan daerah  |          |  |          |  |          |  |          |  | X        |  |          |  |          |  |          |  |          | Kriteria E-Marketing        |
| Kriteria Masterplan daerah  |          |  |          |  | X        |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |          | Kriteria E-Marketing        |

4. Untuk Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung, menurut Bapak/Ibu manakah yang diprioritaskan dalam mendukung strategi pengembangan infrastruktur pendukung ? (Bandingkan kriteria - kriteria pada kolom 1 dengan kriteria di baris yang sama pada kolom 2)

| <b>Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung</b>        | <b>9</b> |  | <b>7</b> |  | <b>5</b> |  | <b>3</b> |  | <b>1</b> |  | <b>3</b> |  | <b>5</b> |  | <b>7</b> |  | <b>9</b> | <b>Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung</b>                     |
|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|---|
| Kriteria Penyediaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Fisik |          |  |          |  |          |  |          |  | X        |  |          |  |          |  |          |  |          | Kriteria Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Infrastruktur Fisik. |

5. Untuk Aspek Pelayanan Publik, menurut Bapak/Ibu manakah kriteria diprioritas dalam mendukung aspek pelayanan publik ?  
( Bandingkan kriteria - kriteria pada kolom 1 dengan kriteria - kriteria di baris yang sama pada kolom 2 )

| <b>Aspek Pelayanan Publik</b> | <b>9</b> |  | <b>7</b> |  | <b>5</b> |  | <b>3</b> |  | <b>1</b> |  | <b>3</b> |  | <b>5</b> |  | <b>7</b> |  | <b>9</b> | <b>Aspek Pelayanan Publik</b> |
|-------------------------------|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|-------------------------------|
| Kriteria Perizinan            |          |  |          |  |          |  |          |  | X        |  |          |  |          |  |          |  |          | Kriteria Pemanjagan Hukum     |

## Lampiran 6.

Nilai Geomean Aspek Kebijakan Pengembangan Pembangunan Wilayah Kabupaten Muna  
( Pembobotan Secara Total, yang diperoleh dari keseluruhan nilai Responden )

| Strategi Kebijakan Pengembangan Pembangunan Wilayah | JAWABAN RESPONDEN |   |   |   |   |   |   |   |   |    | Strategi Kebijakan Pengembangan Pembangunan Wilayah | Nilai Geomean |
|---|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---------------|
|   | 1                 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   |               |
| Aspek Pengembangan SDM                              | 3                 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3  | Aspek Promosi Daerah                                | 3,616550178   |
| Aspek Pengembangan SDM                              | 9                 | 5 | 7 | 1 | 3 | 7 | 5 | 9 | 9 | 1  | Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung          | 4,393377152   |
| Aspek Pengembangan SDM                              | 7                 | 7 | 9 | 9 | 7 | 3 | 7 | 9 | 7 | 5  | Aspek Pelayanan Publik                              | 6,70549586    |
| Aspek Promosi Daerah                                | 3                 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3  | Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung          | 3,061471367   |
| Aspek Promosi Daerah                                | 9                 | 3 | 7 | 5 | 1 | 9 | 3 | 5 | 9 | 1  | Aspek Pelayanan Publik                              | 4,036461445   |
| Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung          | 3                 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 1 | 5 | 3  | Aspek Pelayanan Publik                              | 3,05526797    |

Sumber : Data Primer diolah 2011

**Lampiran 7.**

**Matriks Pair-Wise Aspek Kebijakan Pengembangan Pembangunan Wilayah Kabupaten Muna**

| <b>Strategi Kebijakan Pengembangan Pembangunan Wilayah</b> | <b>Aspek Pengembangan SDM</b> | <b>Aspek Promosi Daerah</b> | <b>Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung</b> | <b>Aspek Pelayanan Publik</b> |
|--|-------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|
| <b>Aspek Pengembangan SDM</b>                              | 1                             | 3,61650178                  | 4,393377152                                       | 6,70549586                    |
| <b>Aspek Promosi Daerah</b>                                | 0,276510302                   | 1                           | 3,05526797  | 4,036461445                   |
| <b>Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung</b>          | 0,227615332                   | 0,327303533                 | 1   | 3,05526797                    |
| <b>Aspek Pelayanan Publik</b>                              | 0,149131402                   | 0,247741744                 | 0,327303533                                       | 1                             |
| <b>Jumlah</b>  | <b>1,653257037</b>            | <b>5,191547057</b>          | <b>8,775948655</b>                                | <b>14,79722528</b>            |

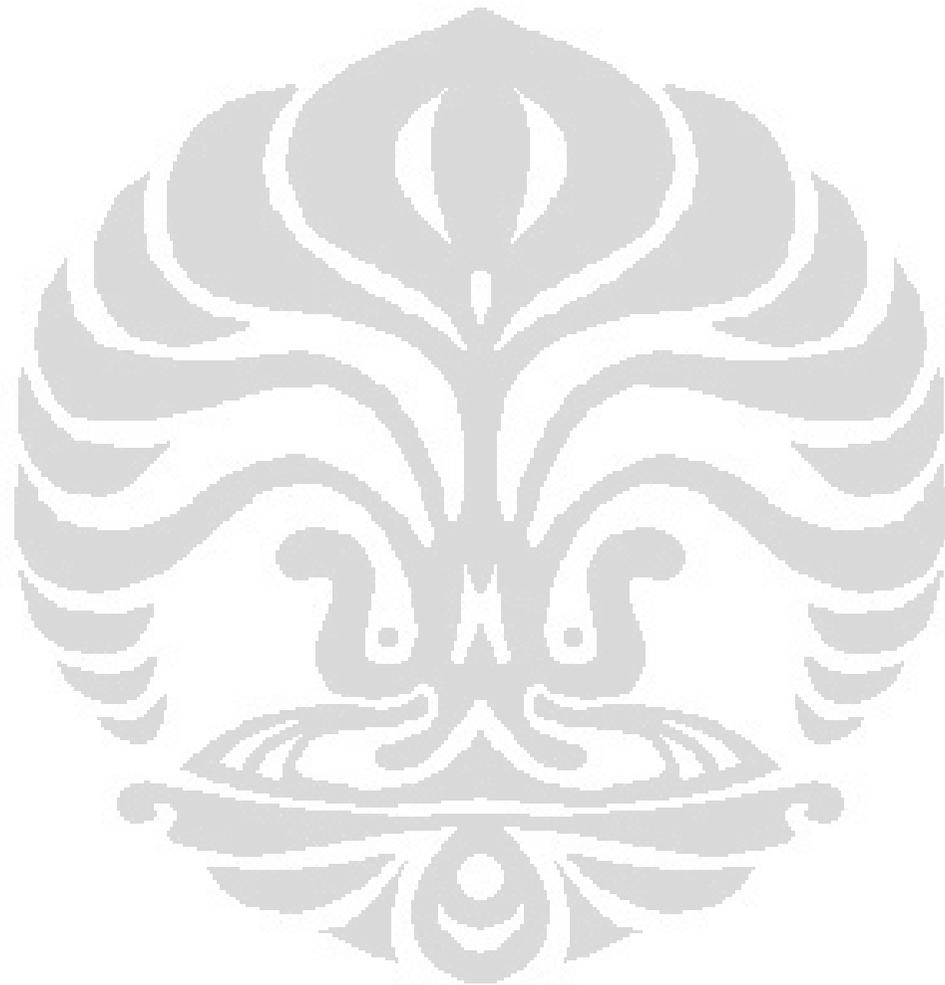
*Sumber : Data Primer diolah 2011*

**Lampiran 8.**

**Matriks Priority Aspek Kebijakan Pengembangan Pembangunan Wilayah Kabupaten Muna.**

| <b>Strategi Kebijakan Pengembangan Pembangunan Wilayah</b> | <b>Aspek Pengembangan SDM</b> | <b>Aspek Promosi Daerah</b> | <b>Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung</b> | <b>Aspek Pelayanan Publik</b> | <b>Jumlah</b> |
|--|-------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|---------------|
| <b>Aspek Pengembangan SDM</b>                              | 0,604866623                   | 0,696613503                 | 0,50061564  | 0,453159003                   | 2,255254769   |
| <b>Aspek Promosi Daerah</b>                                | 0,167251853                   | 0,19262081                  | 0,348141049                                       | 0,272785024                   | 0,980798735   |
| <b>Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung</b>          | 0,137676917                   | 0,063045472                 | 0,113947795                                       | 0,206475735                   | 0,521145919   |
| <b>Aspek Pelayanan Publik</b>                              | 0,090204608                   | 0,047720216                 | 0,037295516                                       | 0,067580238                   | 0,242800577   |
| <b>Rata-Rata</b>   | <b>0,563813692</b>            | <b>0,245299684</b>          | <b>0,13028648</b>                                 | <b>0,060700144</b>            | <b>1</b>      |

*Sumber : Data Primer diolah 2011*



**Lampiran 9.**

**Matriks Nilai Consistency Indeks ( CI) dan Consistensi Ratio (CR).  
Kebijakan Pengembangan Pembangunan Wilayah Kab. Muna**

| <b>Strategi Kebijakan Pengembangan Pembangunan Wilayah</b> | <b>Matriks Pair-Wise ( A )</b> | <b>Matriks Priority ( B )</b> | <b><math>\lambda</math> Maks ( A x B )</b> |
|--|--------------------------------|-------------------------------|--|
| <b>Aspek Pengembangan SDM</b>                              | 1,653257037                    | 0,563813692                   | 0,932128954                                |
| <b>Aspek Promosi Daerah</b>                                | 5,191547057                    | 0,245299684                   | 1,273484853                                |
| <b>Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung</b>          | 8,775948655                    | 0,13028648                    | 1,143387459                                |
| <b>Aspek Pelayanan Publik</b>                              | 14,79722528                    | 0,060700144                   | 0,898193705                                |
| <b>J u m l a h</b>   |                                |                               | <b>4,247194971</b>                         |

*Sumber : Data Primer diolah 2011*

**Lampiran 10.**  
**Nilai Random Indeks ( RI)**

| <b>n</b>  | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b> | <b>6</b> | <b>7</b> | <b>8</b> | <b>9</b> | <b>10</b> | <b>11</b> | <b>12</b> | <b>13</b> | <b>14</b> | <b>15</b> |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>RI</b> | 0,000    | 0,000    | 0,580    | 0,900    | 1,120    | 1,240    | 1,320    | 1,410    | 1,450    | 1,490     | 1,510     | 1,480     | 1,560     | 1,570     | 1,590     |

*Sumber : Sumber : Thomas L Saaty, 1980.*



## Lampiran 11.

**Nilai Geomean Kriteria Kebijakan Pengembangan Pembangunan Wilayah Kabupaten Muna  
( Pembobotan Secara Total, yang diperoleh dari keseluruhan nilai Responden )**

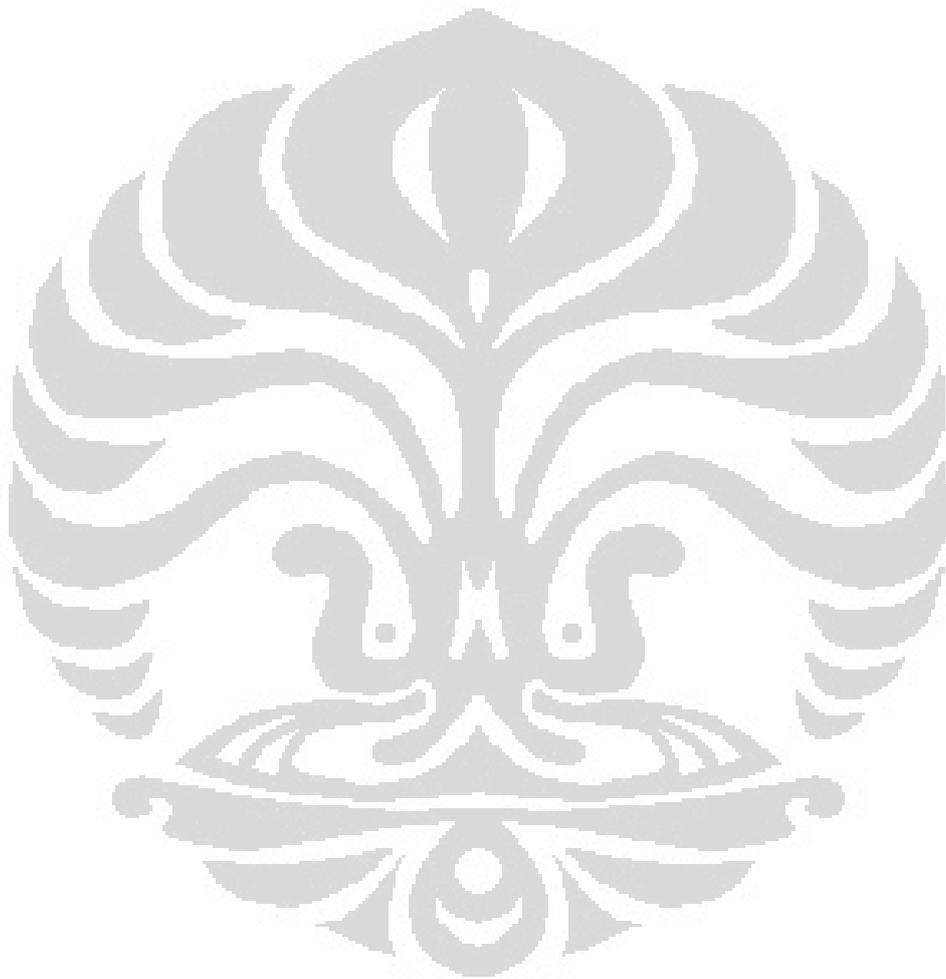
| Aspek Pengembangan SDM            | JAWABAN RESPONDEN |   |   |   |   |   |   |   |   |    | Aspek Pengembangan SDM               | Nilai Geomean |
|-----------------------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|--------------------------------------|---------------|
|                                   | 1                 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |                                      |               |
| Kriteria Pendidikan dan Pelatihan | 5                 | 3 | 3 | 9 | 1 | 7 | 3 | 9 | 5 | 3  | Kriteria Peningkatan Kualitas Aparat | 4,17177387    |

| Aspek Promosi Daerah        | JAWABAN RESPONDEN |   |   |   |   |   |   |   |   |    | Aspek Promosi Daerah | Nilai Geomean |                             |            |
|-----------------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----------------------|---------------|-----------------------------|------------|
|                             | 1                 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |                      |               |                             |            |
| Kriteria Pemasaran Daerah   |                   |   | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5  | 3                    | 5             | Kriteria Masterpalan Daerah | 3,66094779 |
| Kriteria Pemasaran Daerah   |                   |   | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5  | 9                    | 1             | Kriteria E-Marketing        | 4,90757103 |
| Kriteria Masterpalan Daerah |                   |   | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 1  | 3                    | 5             | Kriteria E-Marketing        | 2,83106594 |

| Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung               | JAWABAN RESPONDEN |   |   |   |   |   |   |   |   |    | Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung                           | Nilai Geomean |
|--|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|--|---------------|
|  | 1                 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |               |
| Kriteria Penyediaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Fisik | 9                 | 3 | 3 | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1  | Kriteria Kerjasama antar Daerah dalam Penyediaan Infrastruktur Fisik | 4,90355005    |

| Aspek Pelayanan Publik | JAWABAN RESPONDEN |   |   |   |   |   |   |   |   |    | Aspek Pelayanan Publik    | Nilai Geomean |
|------------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---------------------------|---------------|
|                        | 1                 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |                           |               |
| Kriteria Prizinan      | 9                 | 9 | 1 | 1 | 9 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1  | Kriteria Pemantapan Hukum | 3,74025736    |

Sumber : Data Primer diolah 2011



**Lampiran 12.**

Matriks Pair-Wise dan Matriks Priority Kriteria **Pengembangan Kualitas SDM** Dalam Rangka Pengembangan Pembangunan Wilayah Kabupaten Muna.

**Matriks Pair-Wise :**

| <b>Aspek Pengembangan Kualitas SDM</b> | Kriteria Pendidikan Dan Pelatihan | Kriteria Peningkatan Kualitas Aparat |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Kriteria Pendidikan Dan Pelatihan      | 1                                 | 4,172                                |
| Kriteria Pendidikan Dan Pelatihan      | 0,2396                            | 1                                    |
| <b>J u m l a h</b>                     | <b>1,2396</b>                     | <b>5,172</b>                         |

*Sumber : Data Primer Diolah 2011*

**Matriks Priority :**

| <b>Aspek Pengembangan Kualitas SDM</b> | Kriteria Pendidikan Dan Pelatihan | Kriteria Peningkatan Kualitas Aparat | Jumlah      |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| Kriteria Pendidikan Dan Pelatihan      | 0,806651199                       | 0,806651199                          | 1,613302398 |
| Kriteria Pendidikan Dan Pelatihan      | 0,193348801                       | 0,193348801                          | 0,386697602 |
| <b>Rata-Rata</b>                       | <b>0,806651199</b>                | <b>0,193348801</b>                   | <b>1</b>    |

*Sumber : Data Primer Diolah 2011*

**Lampiran 13 .**

Matriks Pair-Wise dan Matriks Priority Kriteria **Promosi Daerah** Dalam Rangka Pengembangan Pembangunan Wilayah Kabupaten Muna.

**Matriks Pair-Wise :**

| <b>Aspek Pengembangan Kualitas SDM</b> | Kriteria Pemasaran Daerah | Kriteria Masterplan Daerah | Kriteria E-Marketing |
|--|---------------------------|----------------------------|----------------------|
| Kriteria Pemasaran Daerah              | 1                         | 3,6609                     | 0,9076               |
| Kriteria Masterplan Daerah             | 0,273156874               | 1                          | 2,8311               |
| Kriteria Masterplan Daerah             | 0,203765588               | 0,35219597                 | 1                    |
| <b>Jumlah</b>                          | <b>1,476922462</b>        | <b>5,014119597</b>         | <b>8,7387</b>        |

*Sumber : Data Primer Diolah 2011*

**Matriks Priority :**

| <b>Aspek Pengembangan Kualitas SDM</b> | Kriteria Pemasaran Daerah | Kriteria Masterplan Daerah | Kriteria E-Marketing | Jumlah    |
|--|---------------------------|----------------------------|----------------------|-----------|
| Kriteria Pemasaran Daerah              | 0,677083615               | 0,730118205                | 0,56159383           | 1,9687957 |
| Kriteria Masterplan Daerah             | 0,184950044               | 0,199436807                | 0,323972673          | 0,7083595 |
| Kriteria Masterplan Daerah             | 0,137966341               | 0,070444988                | 0,114433497          | 0,3228448 |
| <b>Rata-Rata</b>                       | <b>0,656265217</b>        | <b>0,236119841</b>         | <b>0,10761494</b>    | <b>1</b>  |

*Sumber : Data Primer Diolah 2011*

**Lampiran 14.**

Matriks Pair-Wise dan Matriks Priority Kriteria **Pengembangan Infrastruktur Pendukung** Dalam Rangka Pengembangan Pembangunan Wilayah Kab. Mun.

**Matriks Pair-Wise :**

| <b>Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung</b>                           | <b>Kriteria Penyediaan Dan Pemeliharaan Infrastruktur Fisik</b> | <b>Kriteria Kerjasama antar Daerah Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Fisik</b> |
|---|---|--|
| Kriteria Penyediaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Fisik                    | 1   | 4,904  |
| Kriteria Kerjasama antar Daerah Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Fisik | 0,203915171   | 1  |
| <b>J u m l a h</b>  | <b>1,203915171</b>  | <b>5,904</b>   |

*Sumber : Data Primer Diolah 2011*

**Matriks Priority :**

| <b>Aspek Pengembangan Kualitas SDM</b>                                      | <b>Kriteria Penyediaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Fisik</b> | <b>Kriteria Kerjasama antar Daerah Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Fisik</b> | <b>Jumlah</b> |
|---|---|--|---------------|
| Kriteria Penyediaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Fisik                    | 0,830623306   | 0,830623306  | 1,661246612   |
| Kriteria Kerjasama antar Daerah Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Fisik | 0,169376694   | 0,169376694  | 0,338753388   |
| <b>Rata-Rata</b>  | <b>0,830623306</b>  | <b>0,169376694</b>   | <b>1</b>      |

*Sumber : Data Primer Diolah 2011*

**Lampiran 15.**

Matriks Pair-Wise dan Matriks Priority Kriteria **Pelayanan Publik** Dalam Rangka Pengembangan Pembangunan Wilayah Kabupaten Muna.

**Matriks Pair-Wise :**

| <b>Aspek Pengembangan Kualitas SDM</b> | Kriteria Perizinan | Kriteria Pemantapan Hukum |
|--|--------------------|---------------------------|
| Kriteria Perizinan                     | 1                  | 3,74                      |
| Kriteria Pemantapan Hukum              | 0,267379           | 1                         |
| <b>Jumlah</b>                          | <b>1,2673</b>      | <b>4,74</b>               |

*Sumber : Data Primer Diolah 2011*

**Matriks Priority :**

| <b>Aspek Pengembangan Kualitas SDM</b> | Kriteria Perizinan | Kriteria Pemantapan Hukum | Jumlah      |
|--|--------------------|---------------------------|-------------|
| Kriteria Perizinan                     | 0,789029536        | 0,789029536               | 1,578059072 |
| Kriteria Pemantapan Hukum              | 0,210970464        | 0,210970464               | 0,421940928 |
| <b>Rata-Rata</b>                       | <b>0,789029536</b> | <b>0,210970464</b>        | <b>1</b>    |

*Sumber : Data Primer Diolah 2011*

**Lampiran 16.**

Bobot Level Pertama dan Level Kedua ( Bobot Final ) .

Prioritas Kebijakan Pengembangan Pembangunan Wilayah Kabupaten Muna.

| Level Pertama                                |       | Level Kedua  |      | Bobot Final |
|--|-------|--|------|-------------|
| Aspek Pengembangan SDM                       | 0,563 | Kriteria Pendidikan Dan Pelatihan                              | 0,80 | 0,4510      |
|  |       | Kriteria Peningkatan Kualitas Aparat                           | 0,19 | 0,1071      |
| Aspek Promosi daerah                         | 0,245 | Kriteria Pemasaran Daerah                                      | 0,65 | 0,1593      |
|  |       | Kriteria Masterplan Daerah                                     | 0,23 | 0,0563      |
|  |       | Kriteria E-Marketing   | 0,10 | 0,0245      |
| Aspek Pengembangan Infrastruktural Pendukung | 0,130 | Kriteria Penyediaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Fisik       | 0,83 | 0,1080      |
|  |       | Kriteria Kerjasama Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Fisik | 0,16 | 0,0208      |
| Aspek Pelayanan Publik                       | 0,060 | Kriteria Perizinan   | 0,78 | 0,0473      |
|  |       | Kriteria Pemantapan Hukum                                      | 0,21 | 0,0127      |
| <b>T o t a l</b>                             |       |  |      | <b>1</b>    |

*Sumber : Data Primer Diolah 2011*